

KAJIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PEMBANGUNAN DI SULAWESI SELATAN



BAPPELITBANGDA
**(BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH)**
NOVEMBER 2021

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA
PEMBANGUNAN DI SULAWESI SELATAN**

Pelaksana

Ketua Tim Peneliti

Dr. Bramastyo B. Prastowo., M.E.

Menyetujui

Penanggung Jawab Kegiatan

Dr. Muhammad Taufik, S.Pt., M.Si

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. A. Darmawan Bintang, MDevPlg

Kata Pengantar

Kajian Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan merupakan hasil publikasi dari BAPPEDALITBANG Provinsi Sulawesi Selatan yang diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan kajian mengenai kepuasan masyarakat secara keseluruhan terhadap kinerja pembangunan. Data yang disajikan merupakan primer dengan menggunakan *face to face interview* langsung kepada masyarakat seluruh Sulawesi Selatan dan kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk analisis.

Secara garis besar, Kajian Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan 2021 memuat 15 isu strategis yang dipilih berdasarkan adjustment isu-isu kedaerahan yang sesuai dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Yaitu: Infrastruktur Jalan, Keamanan Ketertiban, Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Pendidikan (SMA), Bantuan Sosial, Birokrasi Perizinan, Masalah Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pariwisata, Kesehatan, Fasilitas umum Terbuka Hijau, Lingkungan, Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan, dan penanganan Covid-19.

Kompilasi terhadap data survey terus diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data yang disajikan. Untuk itu, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan juga semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Semoga dengan diterbikannya publikasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para *stakeholder* pembangunan Sulawesi Selatan dan pengguna data survey pada umumnya.

Makassar, Desember 2021

Kepala BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan

Ir. A. Darmawan

Bintang, MDePlg

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini berisi tentang persepsi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan penelitian Kelly (2003), menyebutkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Pemerintah mungkin merupakan **penilaian** kontekstual dari masyarakat daripada evaluasi objektif berdasarkan kinerja layanan. Bahkan kepuasan masyarakat dinilai sebagai pengalaman pribadi. Hal tersebutlah yang dilihat dalam kajian ini. Proses identifikasi harapan dan kinerja melalui metode *Survey Stratified Random Sampling* seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan yang berusia 17 tahun ke atas. Jumlah responden dalam kajian ini 1.200 orang responden dengan *margin of error* pada 2,82 persen.

Secara domisili, tampak sebaran dan proporsi responden di setiap Kota/Kabupaten yang diambil bersesuaian dengan data tahun 2019. Walaupun ada perbedaan namun relatif kecil dan tidak mempengaruhi hasil penelitian. Sampel juga tersebar di 24 Kota/Kabupaten dan 121 Kecamatan. Hal ini penting untuk dipastikan agar aspirasi dari responden survei dapat mewakili dengan baik aspirasi masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Selatan.

Karakter demografi responden juga bersesuaian dengan karakter demografi populasi masyarakat Indonesia yang di ambil dari data BPS. Hal ini

menunjukkan bahwa karakter sampel sudah relatif bersesuaian dengan karakter populasi, sehingga aspirasi responden yang disampaikan dalam survei juga mampu mewakili aspirasi populasi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum. Data pendapatan menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Mayoritas pekerjaan responden adalah Ibu Rumah Tangga, petani dan wiraswasta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik secara demografis maupun strata ekonomi, karakter responden survei telah mampu mewakili populasi masyarakat Sulawesi Selatan, sehingga aspirasi yang disampaikan oleh responden survei juga mampu mewakili aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan dengan tingkat kesalahan sebesar 2,82%.

Secara umum tingkat kepuasan Masyarakat Sulawesi Selatan dengan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah (44.6%). Karena umumnya pemerintah daerah akan dianggap baik jika tingkat kepuasan kinerjanya berada diatas level 65%. Karena itu menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk memenuhi ekspektasi publik akan kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan menyelesaikan atau minimal memperbaiki hal hal yang dianggap menjadi masalah krusial bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun 3 masalah besar yang krusial dan akan berpengaruh terhadap kinerja pembangunan adalah :

- ❖ Ekonomi & kesejahteraan

- ❖ Perbaikan Jalan
- ❖ Perbaikan Fasilitas Umum
- ❖ Pemerataan Bantuan Sosial

Karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk memilih fokus diantara 4 masalah utama tersebut yang memang menjadi domain dan sesuai dengan postur anggaran pemerintah provinsi.

Setelah upaya maksimal dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi maksimal terhadap capaian dan upaya yang telah dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan:

Tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah (dibawah 50%) disebabkan salah satunya karena tingkat keterkenalan Plt. Gubernur Sudirman Sulaiman sebagai representasi Pemerintah Provinsi yang juga rendah. Sehingga masih banyak responden yang memilih untuk tidak menjawab, sebab belum tahu program apa yang sudah berhasil dilaksanakan dalam janji kampanye sebelumnya. Sehingga perlu bagi pemerintah provinsi di tahun 2022 dan 2023 untuk fokus pada keempat isu yaitu Infrastruktur jalan, Penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT, Ekonomi Masyarakat dan Pengangguran dan lapangan pekerjaan. Seluruh anggaran agar difokuskan di keempat isu tersebut dengan prioritas daerah-daerah kota dan kabupaten yang memiliki persoalan dalam prioritas pertamanya.

Menentukan target agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pembangunan semakin meningkat dan di akhir periode 2024 sudah di atas 65%.

- ❖ Tahun 2021 : 44,6%
- ❖ Tahun 2022 : 54,6 %
- ❖ Tahun 2023 : 64,6%
- ❖ Tahun 2024 : 74,6%

Selanjutnya adalah dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media-media luar seperti baliho, spanduk, kalender guna mensosialisasikan keberhasilan pembangunan, termasuk pemerintah provinsi sudah mulai massif untuk masuk di media sosial di Sulawesi Selatan. Kemudian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga perlu untuk menentukan daerah-daerah prioritas yang akan dibangun melalui sinkronisasi perencanaan di RPJMD dengan hasil kebutuhan prioritas utama hasil survei ini di setiap Kota Kabupaten. Prioritas tersebut bisa dilakukan dengan kriteria- kriteria misalnya:

- ❖ Daerah Prioritas Pertama, terdapat proyek nasional, wilayah dan masih tertinggal di prioritas utama
- ❖ Daerah prioritas kedua, terdapat proyek nasional dan wilayah namun sudah lebih baik penanganan isu strategis

- ❖ Daerah prioritas ketiga, terdapat sedikit proyek nasional dan dianggap tidak terjadi hal luar biasa seperti bencana alam besar dan lain sebagainya.

Dengan menggunakan metode *Importance Performance Analysis* (IPA) terhadap kinerja pembangunan di Sulawesi Selatan, berikut ini adalah Isu strategis yang dianggap masih perlu diperbaiki kinerjanya:

- ❖ Infrastruktur Jalan
- ❖ Penyaluran Bantuan Sosial seperti Raskin dan BLT
- ❖ Ekonomi masyarakat
- ❖ Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Infrastruktur jalan. Pada variable ini setidaknya dua SKPD yang menjadi *leading sector*. SKPD yang menangani pekerjaan umum diharapkan, pertama, fokus kepada pelayanan infrastruktur di kabupaten/kota yang paling prioritas berdasarkan temuan IPA dan Sosialisasi *before and after* pekerjaan infrastruktur yang dianggap relatif bagus, namun namun tingkat kepuasaannya belum maksimal.

Penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT. Pada poin ini, kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Sosial, pertama, perlu mengevaluasi proses distribusi terhadap 25 program nasional berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya berkaitan dengan penyaluran raskin (BPNT,

Beras Sejahtera, PKH, maupun bantuan-bantuan lainnya). Kedua, perlu adanya kajian efektivitas terhadap program penanggulangan kemiskinan secara khusus, sebagai upaya masukan kepada pemerintah pusat, dan bahan kebijakan menindaklanjuti dengan program turunan pemerintah provinsi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Ketiga, Aktivasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi selatan.

Ekonomi Masyarakat. Pada variable ini, pertama, diperlukannya harmonisasi dan koordinasi yang baik, karena isu ekonomi banyak berhubungan dengan berbagai SKPD dan tidak terkesan ego sektoral. Kedua, mengelaborasi Bersama *stakeholder* lainnya dalam upaya membangun kerja pemerintah dengan pendekatan *collaborative Governance*. Keempat, Pemerintah Provinsi memberi kemudahan dalam hal akses dan *disbursement* dana untuk penguatan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek *good governance*. Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang terjadi, sehingga program tersebut dapat optimal digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Kelima, Mendesain program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 berdasarkan kebutuhan (*bottom up approach*), salah satunya adalah harmonisasi dengan perbankan untuk sosialisasi berkaitan dengan restrukturisasi kredit serta

kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Keenam, Penguatan ekosistem digital dan Pemulihan sektor pariwisata. Program penguatan terhadap UMKM, perlu didorong tidak hanya dari informal ke formal, melainkan penguatan transformasi ke digital. Para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk. Pembinaan dan pendampingan menyeluruh bagi UMKM perlu dilakukan, selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan.

Adapun dari Pemulihan sektor pariwisata adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif

ABSTRAK

Pada level Provinsi secara umum, tingkat kepuasan masyarakat Sulawesi Selatan dengan kinerja pembangunan berada pada level 44,6%. Bukti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah penting untuk memenuhi ekspektasi publik dengan menyelesaikan atau minimal memperbaiki hal-hal yang dianggap menjadi masalah krusial bagi masyarakat Sulawesi Selatan

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode survey *Multistage Random Sampling* yang diambil secara proporsional berjumlah 1.200 responden. Penelitian ini menggunakan analisis *Importance and Performance Analysis* (IPA), pendekatan ini berguna untuk memahami kepuasan masyarakat terhadap kinerja daerah.

Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa isu strategis yang masih dipersepsikan masyarakat perlu diperbaiki adalah infrastruktur jalan, penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT, Ekonomi masyarakat serta pengangguran dan lapangan pekerjaan. Adapun kinerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang perlu terus dipertahankan adalah dalam bidang Pendidikan, Pelayanan Kesehatan, dan Penanganan Covid-19.

Keyword: Citizen Satisfaction, importance-performance analysis, survey analysis, quadrant analysis

ABSTRACT

At the provincial level in general, the level of satisfaction of the people of South Sulawesi with development performance is at the level of 44.6%. This evidence shows that it is important for local governments to meet public expectations by resolving or at least improving things that are considered to be crucial problems for the people of South Sulawesi.

The data used in this study is primary data using the survey method Multistage Random Sampling taken proportionally totaling 1,200 respondents. This study uses Importance and Performance Analysis (IPA), this approach is useful for understanding community satisfaction with regional performance.

Based on the results of the analysis, it was found that the strategic issues that are still perceived by the community as needing to be improved are road infrastructure, distribution of social assistance such as Raskin and BLT, community economy as well as unemployment and employment opportunities. The performance of the South Sulawesi Provincial government that needs to be maintained is: Education, Health Services, and Handling Covid-19.

Keyword: Citizen Satisfaction, importance-performance analysis, survey analysis, quadrant analysis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Grafik.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Ruang Lingkup.....	5
1.5. Dasar Hukum.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM, KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	14
2.1. Gambaran Umum.....	14

2.1.1.	Aspek Geografi dan Demografi	14
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	30
2.1.3.	Aspek Layanan Umum	41
2.2.	Kajian Pustaka.....	57
2.3.	Kerangka Pikir.....	61
BAB 3 METODE PENELITIAN		63
3.1.	Tahap Persiapan	63
3.1.1.	Instrumen Survei.....	63
3.1.2.	Rancangan Sampel Survei	66
3.1.3.	Manajemen Surveyor	68
3.2.	Tahap Pelaksanaan Survey	70
3.3.	Tahap Pelaporan dan Presentasi.....	73
3.4.	Profil Demografi Responden.....	73
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN		79
4.1.	Evaluasi Pemerintahan	79
4.2.	Importance and Perfomance Analysis (IPA).....	86
4.3.	Hasil dan Pembahasan IPA	89
4.4.	Media Sosialisasi.....	156

BAB 5 KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN	159
5.1. Kesimpulan.....	159
5.2. Saran Kebijakan	160
5.3. Rekomendasi Kebijakan.....	162
Daftar Pustaka.....	168
Daftar Lampiran	169
Lampiran 1: Sampel.....	169
Lampiran 2: Kuesioner	176

Daftar Tabel

Tabel 2.1. Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2010 dan 2020.....	29
Tabel 2.2. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020.....	32
Tabel 2.3. Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019.....	33
Tabel 2.4. Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019.....	35
Tabel 2.5. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2018.....	35
Tabel 2.6. Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019.....	36
Tabel 2.7. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	37
Tabel 2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019.....	38
Tabel 2.9. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, 2019.....	42
Tabel 2.10 Rasio Jumlah Panjang Jalan dengan Penduduk.....	45
Tabel 2.11. Potensi Pariwisata Sulawesi Selatan	52
Tabel 2.12: Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan	53

Tabel 2.13. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017.....	55
Tabel 3.1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (%)	74
Tabel 3.2. Profil Responden Berdasarkan Usia (%).....	74
Tabel 3.3. Profil Responden Berdasarkan Agama (%).....	74
Tabel 3.4. Profil Responden Berdasarkan Suku (%).....	75
Tabel 3.5. Sebaran Responden per Kota Kabupaten (%)	75
Tabel 4.1. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	90
Tabel 4.2. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantaeng	93
Tabel 4.3. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru	96
Tabel 4.4. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bone.....	98
Tabel 4.5. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba.....	101
Tabel 4.6. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Enrekang	103

Tabel 4.7. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa.....	106
Tabel 4.8. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jeneponto.....	108
Tabel 4.9. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.....	111
Tabel 4.10. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu.....	113
Tabel 4.11. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.....	116
Tabel 4.12. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.....	118
Tabel 4.13. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Makassar.....	121
Tabel 4.14. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Maros.....	123
Tabel 4.15. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Palopo.....	126
Tabel 4.16. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	128

Tabel 4.17. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Parepare	131
Tabel 4.18. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pinrang.....	133
Tabel 4.19. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.....	136
Tabel 4.20. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sinjai.....	138
Tabel 4.21. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng.....	140
Tabel 4.22. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Takalar.....	143
Tabel 4.23. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja.....	146
Tabel 4.24. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara.....	148
Tabel 4.25. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Wajo.....	151
Tabel 4.26. Prioritas Utama Peningkatan Kinerja	152

Tabel 5.1. Program Terkait Isu Strategis Berdasarkan Hasil Survey 165

Daftar Grafik

Grafik 2.1. Kerangka Pikir	62
Grafik 3.1. Sebaran Pendapatan Responden.....	76
Grafik 3.2. Sebaran Pekerjaan Responden	76
Grafik 4.1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi.....	79
Grafik 4.2. Masalah Utama di Sulawesi Selatan	81
Grafik 4.3. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.....	82
Grafik 4.4. Kekurangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	84
Grafik 4.5. Kuadran <i>Cartesius</i> IPA	89
Grafik 4.6. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan	90
Grafik 4.7. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantaeng	93
Grafik 4.8. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru	95
Grafik 4.9. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bone.....	98
Grafik 4.10. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba.....	100
Grafik 4.11.. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Enrekang.....	103
Grafik 4.12. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa.....	105
Grafik 4.13 Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jeneponto.....	108
Grafik 4.14. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kepulauan Selayar	110

Grafik 4.15. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu	113
Grafik 4.16. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Luwu Timur	115
Grafik 4.17. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara	118
Grafik 4.18. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Makassar	120
Grafik 4.19. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Maros	123
Grafik 4.20. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Palopo.....	125
Grafik 4.21 Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	128
Grafik 4.22. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Parepare.....	130
Grafik 4.23. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pinrang.....	133
Grafik 4.24. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Sidenreng Rappang	135
Grafik 4.25. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sinjai	138
Grafik 4.26. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng	140
Grafik 4.27. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Takalar	143
Grafik 4.28. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja	145
Grafik 4.29. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Toraja Utara	148
Grafik 4.30. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Wajo.....	150
Grafik 4.31. Pemilik Akun Media Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan.....	156

Grafik 4.32. Akun Media Sosial yang sering digunakan di Provinsi Sulawesi Selatan	157
Grafik 4.33. Media Sosialisasi Keberhasilan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan	158

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan inti dari modernisasi sektor publik (Walle and Bouckaert 2007). Ketidakpercayaan public sering kali dikaitkan dengan buruknya fungsi layanan publik. Dalam konteks wacana politik, pelayanan publik yang berfungsi dengan baik dikatakan apabila menciptakan kepercayaan kepada pemerintah. Walle dan Bouckaert (2007) juga mengatakan bahwa kinerja administrasi publik memiliki dampak tertentu pada kepercayaan terhadap pemerintah, tetapi tingkat kepercayaan yang ada pada pemerintah juga berdampak pada persepsi kinerja pemerintah. Terjadi kausalitas di antara kinerja dan kepercayaan publik.

Hubungan kinerja dan kepercayaan masyarakat tidak cukup hanya mengukur evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan membandingkannya dengan kepercayaan masyarakat di pemerintah. Untuk meningkatkan legitimasi pemerintah dengan memodernisasi layanan publik hanyalah strategi parsial (Walle and Bouckaert 2007), karena kinerja aktual tidak sama dengan kinerja yang dirasakan, dan karena perbedaan mungkin ada di benak masyarakat tentang definisi dan kebutuhan kinerja layanan publik. Fokus pada kinerja saja tidak akan cukup, karena persepsi dan definisi kinerja tidak hanya tercipta dalam interaksi pemerintah-masyarakat, tetapi juga dalam hubungan warga sehari-hari. Memulihkan kepercayaan pada pemerintah tidak bisa

hanya didasarkan pada rencana aksi manajerial tetapi juga membutuhkan rekayasa sosial. Oleh karena itu, pertanyaan intinya adalah bagaimana pemerintah dapat mengubah persepsi dan kriteria evaluasi ini dengan cara yang dapat diterima dalam masyarakat demokratis seperti di Indonesia.

Dalam kerangka ini, Kajian Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan bertujuan untuk memperoleh penilaian masyarakat terhadap pembangunan yang telah dikerjakan dan untuk mengetahui permasalahan utama yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun survey ini juga diharapkan akan diperoleh preferensi masyarakat dalam arah pembangunan selanjutnya

Untuk mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan pada tahun 2021.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah:

1. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan Tahun 2021,

2. Memperoleh penilaian masyarakat terhadap pembangunan yang telah dikerjakan
3. Mengetahui preferensi utama yang dirasakan oleh masyarakat

Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Terukurnya persepsi masyarakat terhadap pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
2. Terukurnya penilaian masyarakat terhadap pembangunan
3. Teridentifikasinya harapan masyarakat akan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai bahan acuan dasar dalam upaya perbaikan kualitas pembangunan;
2. Tersedianya dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pembangunan di Sulawesi Selatan.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi ini, meliputi :

- a. Ruang Lingkup
 1. Konsolidasi awal Kegiatan ini merupakan langkah awal setelah ditandatanganinya SPMK oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Persiapan survei lapangan kegiatan ini berkaitan dengan :
 - a) Pembuatan rancangan pengambilan sampel, penentuan responden baik yang bersifat individu;
 - b) Perumusan indikator dan penyusunan kuesioner;
 - c) Persiapan surat tugas bagi tenaga ahli dan surveyor;
 - d) Koordinasi tim lapangan
 3. Pelaksanaan survei lapangan;
 4. Pengolahan data hasil survei lapangan;
 5. Pelaporan.
 - a) Lokasi pekerjaan jasa konsultansi, adalah seluruh Kota dan Kabupaten di Sulawesi Selatan.
 - b) Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/KPA/PPK adalah bantuan pendampingan pada saat observasi lapangan (apabila diperlukan);

1.5. Dasar Hukum

Dalam kajian Survey Kinerja Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan 2021, ada beberapa dasar hukum yang dipakai dalam kerangka analisis.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang - Undang No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Caca Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

21. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

22. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);

27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor

- 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 - 2023 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 280);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 302);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN UMUM, KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara astronomis, Sulawesi Selatan terletak antara $0^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan 8° Lintang Selatan dan antara $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 00. Berdasarkan posisi geografisnya, provinsi Sulawesi Selatan memiliki batas-batas: Utara – Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah; Selatan – Laut Flores; Barat – Selat Makassar; Timur – Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan letak geografisnya, Sulawesi Selatan mempunyai dua kabupaten kepulauan, yaitu Kepulauan Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep). Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, yaitu: Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Pangkep, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, Kota Pare-Pare dan Kota Palopo.

Wilayah Sulawesi Selatan membentang mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi. Kondisi Kemiringan tanah 0 sampai 3 persen merupakan tanah yang relatif datar, 3 sampai 8 persen merupakan tanah relatif bergelombang, 8 sampai 45 persen merupakan tanah yang kemiringannya agak curam, lebih dari 45 persen tanahnya curam dan bergunung. Wilayah daratan terluas berada pada 100 hingga 400 meter DPL, dan sebahagian merupakan dataran yang berada pada 400 hingga 1000 meter DPL

Daerah Sulawesi Selatan termasuk ke dalam Provinsi Busur Vulkanik Tersier Sulawesi Barat, yang memanjang dari Lengan Selatan sampai ke Lengan Utara. Secara umum, busur ini tersusun oleh batuan-batuan plutonik-vulkanik berumur Paleogen- Kuartar serta batuan-batuan metamorf dan sedimen berumur Tersier. Geologi Sulawesi Selatan bagian timur dan barat sangat berbeda, di mana keduanya dipisahkan oleh Depresi Walanae yang berarah UUB-SST. Secara struktural, Sulawesi Selatan terpisah dari anggota Busur Barat Sulawesi lainnya oleh suatu depresi berarah UB-ST yang melintas di sepanjang Danau Tempe (van Leeuwen, 1981). Struktur geologi batuan di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik geologi yang dicirikan oleh adanya berbagai jenis satuan batuan yang bervariasi. Struktur dan formasi geologi wilayah Provinsi Sulawesi

Selatan terdiri dari volkan tersier, Sebaran formasi volkan tersier ini relatif luas mulai dari Cenrana sampai perbatasan Mamuju, daerah Pegunungan Salapati (Quarles) sampai Pegunungan Molegraf, Pegunungan Perombengan sampai Palopo, dari Makale sampai utara Enrekang, di sekitar Sungai Mamasa, Sinjai sampai Tanjung Pattiro, di deretan pegunungan sebelah barat dan timur Ujung Lamuru sampai Bukit Matinggi. Batuan volkan kwarter, Formasi batuan ini ditemukan di sekitar Limbong (Luwu Utara), sekitar Gunung Karua (Tana Toraja) dan di Gunung Lompobattang (Gowa).

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 aliran sungai, dengan jumlah aliran terbesar di Kabupaten Luwu, yakni 23 aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada satu sungai yakni Sungai Saddang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan, Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 km. Di Sulawesi Selatan terdapat empat danau yakni Danau Tempe dan Sidenreng yang berada di Kabupaten Wajo, serta danau Matana dan Towuti yang berlokasi di Kabupaten Luwu Timur.

Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya sama dengan daerah lain yang ada di Indonesia, mempunyai dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan

musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Berdasarkan pengamatan digital Stasiun Klimatologi (Maros, Hasanuddin dan Maritim Paotere) selama tahun 2010 rata-rata suhu udara 27,4 C di Kota Makassar dan sekitarnya tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Suhu udara maksimum di stasiun klimatologi Hasanuddin 32,1 C dan suhu minimum 24,0 C. Berdasarkan klasifikasi tipe iklim menurut Oldeman, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 5 jenis iklim, yaitu Tipe iklim A termasuk kategori iklim sangat basah dimana curah hujan rata-rata 3500-4000 mm/Tahun. Wilayah yang termasuk ke dalam tipe ini adalah Kabupaten Enrekang, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Tipe Iklim B, iklim basah dimana curah hujan rata-rata 3000-3500 mm/tahun. Wilayah tipe terbagi 2 tipe yaitu (B1) meliputi kab. Tana toraja, Luwu utara, Luwu timur. Tipe B2 meliputi Gowa, Bulukumba dan Bantaeng, tipe C termasuk iklim agak basah dimana curah hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun. Tipe iklim C terbagi 3 yaitu iklim tipe C1 meliputi kabupaten Wajo, Luwu dan Tana toraja. Iklim C2 meliputi Kabupaten Bulukumba, Bantaeng, Barru, Pangkep, Enrekang, Maros dan Jenepono. Sedangkan tipe iklim C3 terdiri dari Makassar, Bulukumba Jenepono, Pangkep, Barru, Maros, Sinjai, Gowa, Enrekang, Tana toraja, Parepare, Selayar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tercatat 46.717,48 km persegi yang meliputi 21 Kabupaten dan 3 Kota. Kabupaten Luwu Utara kabupaten terluas dengan luas 7.502,58 km persegi atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,06 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sementara itu, Kota Pare - Pare merupakan kabupaten dengan luas wilayah terkecil dengan luas 99,33 km persegi atau 0,21 persen dari wilayah Sulawesi Selatan.

Pengembangan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang, baik Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) maupun Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mewujudkan ruang Sulawesi Selatan yang produktif, kompetitif, inklusif dan berkelanjutan, yang diarahkan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur wilayah, peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, maka upaya yang akan dilakukan melalui pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dengan mengutamakan pengembangan wilayah

berbasis rencana tata ruang melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah antara lain adalah kawasan pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi; kawasan strategis prioritas seperti Kawasan Industri (KI) sebagai pusat pengolahan sumber daya alam; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai pusat pengembangan jasa pariwisata; serta kawasan perkotaan berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagai pusat pelayanan jasa dan perdagangan.

Potensi pengembangan kawasan budidaya di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada RTRWP Sulawesi Selatan yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di Sulawesi Selatan melalui pengembangan kawasan budidaya diantaranya meliputi kawasan perikanan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan pertambangan.

1. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Pemerintah telah menetapkan lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk pengembangan komoditas tanaman pangan di Sulawesi Selatan yaitu lokasi pengembangan komoditas tanaman padi di Kabupaten

Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Wajo, sedangkan lokasi pengembangan komoditas tanaman jagung yaitu di Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bone, Kabupaten Jeneponto dan Kota Palopo; sementara lokasi pengembangan komoditas kedelai yaitu di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, dan Kabupaten Wajo; dan lokasi pengembangan komoditas ubi kayu di Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.

Pengembangan komoditas pertanian hortikultura diarahkan, sebagai berikut:

- bawang merah di Kabupaten Pinrang, Bone, Enrekang, Gowa, Jeneponto, dan Takalar;
- tanaman cabai di Kabupaten Pinrang, Bone, Maros, Enrekang, dan Takalar;

- tanaman jeruk di Kabupaten Bulukumba, Bantaeng dan Pangkajene Kepulauan;
- perkebunan tebu diprioritaskan di Kabupaten Gowa, Takalar, dan Bone;
- perkebunan kopi di Kabupaten Sinjai, Bantaeng, Jeneponto;
- perkebunan kakao di Kabupaten Bone, Luwu Timur, Soppeng, Wajo, Luwu Utara, Luwu, dan Bulukumba;
- komoditas perkebunan lada di Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Luwu Timur;
- komoditas perkebunan cengkeh di Kabupaten Luwu, Sinjai, Wajo, dan Bone dan Kabupaten Bulukumba.

Sedangkan pengembangan komoditas prioritas peternakan di Sulawesi Selatan, untuk komoditas sapi potong diarahkan lokasinya di Kabupaten Bulukumba, Gowa, Sinjai, Bone, Pangkajene Kepulauan, Barru, Sidenreng Rappang, Wajo, Pinrang dan Maros. Sementara lokasi pengembangan komoditas peternakan sapi perah diarahkan di Kabupaten Enrekang dan lokasi pengembangan komoditas ayam buras diarahkan di Kabupaten Bantaeng.

Memperhatikan kontribusi pertanian terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan sebagai kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan peran Sulawesi Selatan sebagai lumbung pangan

nasional, maka penting untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.

Untuk itu dalam revisi RTRWP Sulawesi Selatan ditetapkan keberadaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di 24 Kabupaten/kota dengan luasan 582.924 hektar yang proporsi luasan terbesarnya adalah Kabupaten Wajo sebesar 17,80 persen dengan luasan 103.748 hektar, Kabupaten Bone sebesar 14,71persen dengan luasan 85.737 hektar, dan Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 9,18 persen dengan luasan sebesar 53.488 hektar.

2. Kawasan Perikanan

Sumber daya kemaritiman dan kelautan termasuk di dalamnya perikanan merupakan salah satu Sumberdaya Alam yang menjadi modal utama dalam pembangunan Sulawesi Selatan. Pengelolaan kawasan perikanan di Sulawesi Selatan diarahkan dengan kebijakan pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, khususnya pada komoditas yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan guna mendukung target ekspor dan ketahanan pangan. Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Sulawesi Selatan diarahkan dengan mengacu pada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi Perairan Selat Makassar, Laut Flores, Laut Jawa, Teluk

Bone, Kepulauan Spermonde, Kepulauan Selayar dan sekitar Kepulauan Tana Keke yang meliputi wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Sinjai, Pangkajene Kepulauan, Bone, dan Kota Makassar.

Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi kawasan peruntukan budidaya laut yang lokasi pengembangannya dialokasikan di Kabupaten Bantaeng, Jeneponto, Barru, Pangkajene Kepulauan, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Sinjai, Pinrang, Kepulauan Selayar, Takalar, Bone, Bulukumba, Kabupaten Wajo, dan Kota Palopo. Sedangkan pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya air payau dialokasikan di Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Bulukumba, Takalar, Pangkajene Kepulauan, Barru, dan Kabupaten Pinrang.

Selain kawasan perikanan, pengembangan sumber daya kemaritiman dan kelautan di Sulawesi Selatan juga diarahkan untuk memprioritaskan pengembangan komoditas garam di Kabupaten Jeneponto, Pangkajene Kepulauan, Kepulauan Selayar dan Kabupaten Takalar.

3. Kawasan Industri

Kebijakan pembangunan nasional mengamanatkan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui transformasi struktural yang membutuhkan dukungan berupa revitalisasi industri pengolahan. Kebijakan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan yang menetapkan kawasan industri di kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan yaitu kawasan perkotaan Mamminasata dan kawasan perkotaan di Kabupaten Bone, Pangkajene dan Kepulauan, Barru, Bantaeng, Luwu Timur, Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan kota Makassar.

Selain itu RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan pula kawasan industri khusus yang mengolah bahan baku komoditas pertambangan di sentra komoditas pertambangan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Maros, Luwu Timur dan Bantaeng, Serta menetapkan beberapa sentra industri kecil dan menengah yang diarahkan pada sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industry rakyat sebagai komoditas lokal. Di samping itu, kebijakan pembangunan nasional juga mengarahkan transformasi ekonomi Sulawesi Selatan diantaranya melalui peningkatan nilai tambah pertambangan yang mendukung pengembangan industry hilir untuk

meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan akhir. Demikian pula Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan maupun RZWP3K Sulawesi Selatan juga mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan di Sulawesi Selatan.

RZWP3K mengarahkan pengembangan komoditas pertambangan pasir laut di Kabupaten Takalar, Jeneponto, dan Kabupaten Luwu Utara. Sementara untuk pengembangan Blok Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Sinjai, Bone, Wajo, dan Kabupaten Luwu. Pada perspektif RTRWP Sulawesi Selatan menetapkan wilayah usaha pertambangan, meliputi batubara, mineral logam dan mineral radioaktif. Wilayah usaha pertambangan batubara di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Maros, Pangkajene Kepulauan, Sidenreng Rappang, Sinjai dan Kabupaten Soppeng, wilayah usaha pertambangan mineral logam di seluruh wilayah Kabupaten/kota kecuali kota Makassar dan kota Parepare, dan wilayah usaha pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Barru, Bone, Enrekang, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan, Pinrang, Sidenreng Rappang dan Kota Parepare.

4. Kawasan Pariwisata

Potensi pariwisata Sulawesi Selatan meliputi pengembangan potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Potensi wisata alam meliputi pariwisata bahari dan ekowisata. Pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Takabonerate dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang; pariwisata alam berbasis ekowisata di Taman Wisata Alam (TWA) Danau Matano – Mahalona dan TWA Danau Towuti di Kabupaten Luwu Timur, TWA Malino di Kabupaten Gowa, TWA Cani Sirenreng di Kabupaten Bone, TWA Lejja di Kabupaten Soppeng, Taman Nasional Bantimurung – Bulusarang di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Taman Buru Ko'mara di Kabupaten Takalar dan Taman Buru Bangkala di Kabupaten Jeneponto, TWA Danau Tempe - Sidenreng di Kabupaten Wajo dan Sidenreng Rappang, TWA Laut Kepulauan Spermonde di Kota Makassar, TWA Kebun Raya Enrekang; TWA Kebun Raya Pucak di Kabupaten Maros, TWA Sungai Saddang di Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang, Taman Rutan Rakyat (Tahura) Abdul Latief di Kabupaten Sinjai, dan Tahura Nanggala di kota Palopo.

Pengembangan wisata budaya berbasis heritage tourism dan wisata sejarah di kawasan Toraja di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, kawasan pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu di Kota

Makassar, kawasan permukiman Adat Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, kawasan wisata pelabuhan perahu tradisional Paotere di kota Makassar, dan kawasan industri perahu tradisional Phinisi di Kabupaten Bulukumba, Taman Wisata Sejarah Fort Rotterdam dan Situs Benteng Tallo di kota Makassar, Makam Syech Yusuf di kota Makassar, Masjid Tua Katangka di Kabupaten Gowa, dan Masjid Jami Tua Palopo di Kota Palopo

Sedangkan pengembangan wisata buatan diarahkan di kawasan perkotaan antara lain berupa meeting-incentive-convention exhibition (MICE), wisata kebugaran, wisata kesehatan dan wisata olah raga. Kawasan perkotaan yang dimaksud adalah kawasan Makassar dan sekitarnya, Bulukumba dan sekitarnya, Parepare dan sekitarnya, Watampone dan sekitarnya dan Palopo dan sekitarnya,

5. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan di Sulawesi Selatan berdasarkan arahan Rencana Tata Ruang, meliputi: Sistem perkotaan nasional berupa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah, dan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang merupakan kawasan perkotaan mengemban fungsi sebagai pusat pengolahan dan distribusi barang dan jasa, simpul transportasi, pusat

jasa pemerintahan kabupaten/kota serta pusat pelayanan publik berskala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Sistem Perkotaan Nasional di Provinsi Sulawesi Selatan meliputi, Pusat Kegiatan Nasional yang terdiri dari Kabupaten/Kota Takalar, Gowa, Maros dan Makassar dan Pusat Kegiatan Wilayah mencakup Kabupaten/Kota Bulukumba, Jeneponto, Pangkep, Barru, Bone, Parepare dan Palopo. Sedangkan sistem perkotaan provinsi berupa Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi Kabupaten Kepulauan Selayar, Bantaeng, Sinjai, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur dan Toraja Utara.

Jumlah penduduk di setiap provinsi sangat beragam dan bertambah dengan laju pertumbuhan yang sangat beragam. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Di Sulawesi Selatan jumlah penduduk mengalami peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Sulawesi Selatan 8.060,4 ribu jiwa, lalu tahun 2020 meningkat dengan laju pertumbuhan 1,18% menjadi 9.037,5 ribu jiwa. Sementara itu jumlah penduduk tertinggi di provinsi Sulawesi Selatan ialah kota Makassar dengan jumlah 1.423,9 ribu jiwa dan jumlah penduduk terendah berada di Kepulauan Selayar dengan jumlah penduduk 137,1 ribu jiwa. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk

terbanyak di provinsi Sulawesi Selatan berada di kelompok umur 15-19 tahun. Tahun 2020, Rasio jenis kelamin yang dimiliki Provinsi Sulawesi Selatan berjumlah 98,6% dengan jumlah laki-laki 4.504.641 jiwa dan perempuan 4.568.868 jiwa.

Tabel 2.1. Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan, 2010 dan 2020

Kabupaten/Kota	Tahun	Tahun
	2010	2020
Kepulauan Selayar	122,1	137,1
Bulukumba	394,6	437,6
Bantaeng	176,7	196,7
Jeneponto	342,7	401,6
Takalar	269,6	300,9
Gowa	652,9	765,8
Sinjai	228,9	259,5
Maros	319	391,8
Pangkajene Dan Kepulauan	305,7	345,8
Barru	166	184,5
Bone	717,7	801,8
Soppeng	223,8	235,2
Wajo	385,1	379,1
Sidenreng Rappang	271,9	320
Pinrang	351,1	404
Enrekang	190,2	225,2
Luwu	332,5	365,6
Tana Toraja	221,1	280,8
Luwu Utara	287,5	322,9
Luwu Timur	243,1	296,7
Toraja Utara	216,8	261,1
Kota Makassar	1338,7	1423,9
Kota Parepare	129,3	151,5
Kota Palopo	147,9	184,7
Sulawesi Selatan	8034,8	9073,5

Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka (BPS, 2021)

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk bekerja sebanyak 4.006.620 orang dengan persentase terhadap angkatan kerja 93,69%. Kelompok umur yang mendominasi bekerja ada pada kelompok 30-34 tahun . Jika dilihat Menurut Kabupaten/ Kota, persentase bekerja terhadap angkatan kerja paling tinggi di kabupaten Jeneponto yaitu 97,69% dan paling rendah di kota Makassar yaitu 84,8%. Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lulusan SMP ke bawah paling banyak mengisi lapangan usaha pertanian. Sedangkan untuk lulusan SMA dan perguruan tinggi paling banyak mengisi sektor jasa. Jam kerja seluruh dan jam kerja utama penduduk umur 15 tahun ke atas yang paling sedikit peminatnya yaitu 1-4 jam sedangkan yang paling banyak peminatnya dengan jam kerja 35+ jam.

Pada tahun ajaran 2019/2020, jumlah sekolah di Sulawesi Selatan pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) 4.404 sekolah, Raudhatul Athfal (RA) 712 sekolah, Sekolah Dasar (SD) 6.465 sekolah ,Madrasah Ibtidaiyah (MI) 714 sekolah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1.680 sekolah, MTs 778 sekolah, SMA 579 sekolah dan MA 424 sekolah, SMK 441 sekolah dan 242 perguruan tinggi. Distribusi persentase wanita berusia 15-49 tahun yang pernah

kawin dan melahirkan hidup menggunakan penolong persalinan paling banyak adalah bidan 61,26%.

Secara rata-rata persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan di Provinsi Sulawesi Selatan 41,02% dimana Kabupaten Takalar dengan persentase tertinggi yaitu 62,82%.

Kelompok umur penduduk yang paling banyak merokok yaitu kelompok umur 25-34 tahun sebanyak 24,46%. Jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki yaitu BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran sejumlah 50,17%. Jumlah Klinik Keluarga Berencana dan PPKBD di tahun 2020 masing-masing 633 dan 3.070 unit.

Distribusi persentase bahan bakar utama yang paling banyak digunakan yaitu elpiji 89,66%. Sementara menurut status penguasaan bangunan tempat tinggal paling banyak yaitu milik sendiri dengan persentase 83,40%. Jenis lantai terluas bukan tanah mencapai 98,79% di Sulawesi Selatan. Kejadian bencana alam pada tahun 2020 terdiri dari tanah longsor 21 kejadian, banjir 45 kejadian, angin puting beliung 51 kejadian, gelombang pasang 4 kejadian. Dimana korban yang paling banyak ialah korban banjir 221.955.

Persentase penduduk miskin di provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2015 mengalami penurunan hingga tahun 2020. Dimana pada

kondisi Maret tahun 2015 persentase penduduk miskin 9,39% dan tahun 2020 8,72%. Jika dirinci Menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada Maret 2020, daerah perdesaan memiliki persentase penduduk miskin yang tinggi yaitu 11,97% sementara di perkotaan 4,49%. Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sejak tahun 2015 hingga 2020. Pada tahun 2015 IPM provinsi Sulawesi Selatan 69,15 sementara di tahun 2020 mencapai 71,93.

Tabel 2.2. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kep. Selayar	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91
2	Bulukumba	65,58	66,46	67,08	67,7	68,28
3	Bantaeng	66,2	66,59	67,27	67,76	68,3
4	Jeneponto	61,61	61,81	62,67	63,33	64
5	Takalar	64,07	64,96	65,48	66,07	66,94
6	Gowa	66,87	67,7	68,33	68,87	69,66
7	Sinjai	64,48	65,36	65,8	66,24	67,05
8	Maros	67,13	67,76	68,42	68,94	69,5
9	Pangkep	66,65	66,86	67,25	67,71	68,29
10	Barru	68,64	69,07	69,56	70,05	70,6
11	Bone	63,11	63,86	64,16	65,04	65,67
12	Soppeng	65,33	65,95	66,67	67,6	68,26
13	Wajo	66,9	67,52	68,18	68,57	69,05
14	Sidrap	69	69,39	69,84	70,6	71,05
15	Pinrang	69,24	69,42	69,9	70,62	71,12
16	Enrekang	70,03	70,79	71,44	72,25	72,66
17	Luwu	68,11	68,71	69,02	69,6	70,39
18	Tana Toraja	65,75	66,25	66,82	67,66	68,25
19	Luwu Utara	67,44	67,81	68,35	68,79	69,46
20	Luwu Timur	70,43	70,95	71,46	72,16	72,8
21	Toraja Utara	66,76	67,49	67,9	68,49	69,23

22	Makassar	80,53	80,53	81,13	81,73	82,25
23	Pare-Pare	76,48	76,48	76,68	77,19	77,62
24	Palopo	76,45	76,45	76,71	77,3	77,98
25	Sulawesi Selatan	67,92	68,49	69,15	70,34	71,66

Sumber: BPS 2021

Dalam penghitungan indeks Pendidikan sebagai dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2013-2019, tren Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada tahun 2019, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,15 persen. Sedangkan tren rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan yang signifikan pada periode yang sama. Pada tahun 2019, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 2,99 persen. Perkembangan indeks Pendidikan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Indeks Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Lama Sekolah	12.99	13.16	13.28	13.34	13.36
Rata-Rata Lama Sekolah	7.64	7.75	8.02	8.26	8.26
Indeks Pendidikan	61.55	62.39	63.79	64.64	64.64

Sumber: RPJMD Sulawesi Selatan

Dari tabel di atas, meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2019, Harapan Lama Sekolah di Sulawesi Selatan telah mencapai 13,36 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus Diploma. Sementara itu, Rata-Rata Lama Sekolah di Sulawesi Selatan rata-rata tumbuh 1,9 persen per tahun selama periode 2015 hingga 2019. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sulawesi Selatan yang lebih baik. Hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas II).

Indeks Kesehatan digambarkan melalui angka harapan hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata-rata lamanya seorang bayi yang dilahirkan dapat bertahan hidup semakin panjang, dengan asumsi kondisi dan tingkat kesehatan sama dengan kondisi pada saat bayi dilahirkan. Secara umum kualitas kesehatan masyarakat Sulawesi Selatan meningkat berdasarkan rata-rata angka harapan hidup yang semakin panjang. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Indeks Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	Tahun	69,8	69,82	69,84	70,08	70,43
Indeks Kesehatan	Nilai	76,62	76,65	76,65	76,65	76,65

Sumber: Dinas Kesehatan, Dalam RPJMD Sulsel

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Sulawesi Selatan telah berjalan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi Sulawesi selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Sulawesi Selatan 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Selatan	CC	CC	CC	CC	B

Sumber: Biro Organisasi dan Tata Laksana, Dalam RPJMD Sulawesi Selatan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui penilaian terhadap Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

(SAKIP). Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah. Adapun capaian kinerja Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.6. Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2018-2019

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai		Capaian Kinerja	
		2018	2019	2018	2019
Perencanaan Kinerja	30	21,23	21,74	70,77	72,47
Pengukuran Kinerja	25	12,27	13,22	49,08	52,88
Pelaporan Kinerja	15	11,72	11,25	78,13	75
Evaluasi Kinerja	10	7,24	6,6	72,4	66
Capaian Kinerja	20	11,82	12,25	59,1	61,25
Nilai Hasil Evaluasi	100	64,28	65,06	64,28	65,06
Akuntabilitas		B	B	B	B

Sumber: RPJMD Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai SAKIP mengalami peningkatan pada tahun 2019 yang mencapai nilai 65,06 dari nilai 64,28 pada tahun 2018. Adapun komponen yang capaian kinerja tertinggi adalah pelaporan kinerja, sedangkan yang terendah adalah pengukuran kinerja. Nilai SAKIP tahun 2019 berada pada kategori yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja

yang handal meskipun belum optimal. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD nilai B, maka target pada tahun 2019 telah tercapai.

Pelayanan publik menjadi salah satu prioritas pemerintah provinsi Sulawesi selatan. Penilaian terhadap kualitas pelayanan publik diukur melalui indeks pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dimaksudkan untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan yaitu berkembangnya inovasi dalam pelayanan publik yang dinilai pada 10 (sepuluh) unsur pelayanan. Pengukuran indeks kepuasan masyarakat didasarkan pada hasil survey pelayanan publik pada 9 (sembilan) unit kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh nilai sebesar 80,92 pada tahun 2019 yang termasuk dalam kategori B. Jika dibandingkan dengan target dalam RPJMD dengan nilai D, maka target pada tahun 2019 telah tercapai bahkan melampaui menjadi nilai B. Seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.7. Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat	44,58	44,626	44,63	51,55	80,92

Sumber: RPJMD Sulawesi Selatan

Selain menggunakan IKM, mengukur tingkat kepuasan juga dengan menggunakan indeks pelayanan publik sebagai mana yang di atur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Adapun Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2018 adalah 3,49 (B-) yaitu kategori baik dengan catatan dan 2019 bernilai 4 (B) yaitu berkategori baik.

Selanjutnya, Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan sangat dipengaruhi dari Pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan anggaran yang memadai, sumberdaya manusia yang cukup dan terampil serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik. Target nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2019 sebesar 73,33 belum dapat dicapai secara optimal. Kurangnya pendanaan untuk merealisasikan jumlah target dan kurangnya sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama kurang optimalnya pencapaian target nilai indeks kualitas lingkungan hidup.

Tabel 2.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Indeks Kualitas Air	Angka	56,29	75,44	54,29	56,15	54,93
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Angka	76,8	85,8	88,66	88,67	88,69
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	Angka	50,85	55,43	54,81	60,41	61,14
IKLH		67,01	70,54	73,24	65,37	67,54

Sumber: Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulsel 2020

Profil emisi Gas Rumah di Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 11 tahun 2020 menunjukkan bahwa prediksi emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2030 adalah 63.597.394 ton CO₂eq. Dari total emisi

GRK tersebut, distribusi emisi GRK terbesar adalah pada bidang energi yang menyumbang 60% emisi gas rumah kaca diikuti dengan bidang penggunaan lahan dengan emisi 26%, bidang pertanian dengan emisi 11% dan terakhir adalah bidang limbah dengan emisi 1,2% dari total emisi GRK Provinsi Sulawesi Selatan. Emisi GRK di Sulawesi Selatan di bidang energi utamanya berasal dari sub bidang transportasi. Tingginya tingkat emisi GRK bidang transportasi disebabkan karena prediksi penggunaan kendaraan bermotor yang memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun dan menyebabkan berbagai permasalahan transportasi.

Berdasarkan hasil perhitungan Business as Usual (BaU) baseline untuk masing-masing bidang, maka target penurunan emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sulawesi selatan adalah 5,6% di tahun 2030. Mitigasi penurunan emisi GRK diharapkan dapat disumbang oleh bidang penggunaan lahan (kehutanan) yang menyumbang penurunan emisi GRK sebesar (4,39%), bidang energi (0,74%), bidang limbah (0,32%) dan bidang pertanian (0,14%). Rendahnya target

penurunan emisi pada bidang energi dibandingkan emisi yang ditimbulkan disebabkan karena kegiatan-kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK pada sektor energi membutuhkan biaya yang lebih tinggi per satuan ton penurunan emisi GRK bila dibandingkan dengan biaya penurunan emisi GRK di bidang lainnya.

Hingga tahun 2019 capaian penurunan emisi GRK adalah 0,89 juta ton CO₂Eq. Pencapaian penurunan emisi GRK dilaksanakan dengan program/kegiatan mitigasi penurunan emisi GRK di masing-masing OPD dengan capaian terbesar adalah dari bidang penggunaan lahan dengan kegiatan utama rehabilitasi hutan dan lahan termasuk didalamnya rehabilitasi kawasan pesisir dan penanaman tanaman perkebunan, bidang pertanian dengan kegiatan utama penggunaan pupuk organik

serta pengembangan biogas, bidang energi dengan kegiatan utama pengembangan energi baru terbarukan dan sub bidang transportasi dengan kegiatan manajemen pengelolaan lalu lintas/transportasi dan bidang limbah dengan kegiatan utama pengelolaan sampah. Selain itu dalam menunjang aksi adaptasi dan mitigasi.

2.1.3. Aspek Layanan Umum

Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah adalah perbandingan jumlah siswa SMA sederajat berapapun usianya dibagi dengan jumlah penduduk berusia 16 hingga 18 tahun. Hal ini memberikan informasi mengenai tingkat serapan pendidikan dan partisipasi penduduk pada setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APK berarti semakin tinggi pula akses penduduk suatu daerah terhadap pendidikan, serta semakin tinggi tingkat kemampuan daerah tersebut dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Tahun 2018 Target (APK) Sekolah Menengah yaitu 80,50% dan realisasi adalah 81,74% yang berarti bahwa capaian sebesar 101,21%. Sedangkan Tahun 2019 Target APK 88,12% dan realisasi 86,09% yang berarti capaian sebesar 97,70%, Penurunan capaian tahun 2018 dan 2019 disebabkan karena kenaikan target yang cukup tinggi di tahun 2019. Pada tahun 2019 (APK) Siswa Sekolah Menengah belum mencapai target, hal ini dapat disebabkan antara lain karena kondisi layanan pendidikan antar wilayah belum berimbang, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap usia sekolah. Angka Partisipasi kasar (APK) tertinggi dari 24 Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 tercapat pada Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan Kota Makassar dengan nilai diatas 100%, yang berarti bahwa jumlah

siswa sekolah menengah dan sederajat diwilayah tersebut melampaui jumlah anak usia 16 – 18 Tahun.

Dalam konteks aspek layanan kesehatan, Rasio Puskesmas dan Pustu Persatuan Penduduk di kabupaten/kota yang tertinggi pada tahun 2019 ditunjukkan oleh Kabupaten Selayar dan terendah adalah Kota Makassar. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh jumlah penduduk dimana sebagai ibukota provinsi, Kota Makassar memiliki jumlah penduduk terbanyak dari 23 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan. Meskipun demikian beberapa upaya yang terus dilakukan diantaranya mendorong ketersediaan dana di tingkat Puskesmas, pemerataan pelayanan kesehatan pada masing-masing Kabupaten/Kota, kebijakan pemerintah masing-masing Kabupaten/Kota yang lebih responsive terhadap ketersediaan fasilitas yang aksesibel bagi semua lapisan masyarakat. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel 2.9. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan, 2019

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Jumlah	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk
1	Kep. Selayar	14	65	79	138.420	0,57
2	Bulukumba	20	60	80	437.209	0,18
3	Bantaeng	13	69	82	200.457	0,41
4	Jeneponto	19	55	74	412.570	0,18

No	Kabupaten/Kota	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Jumlah	Jumlah Penduduk	Rasio Puskesmas per 1000 penduduk
5	Takalar	15	55	70	290.450	0,24
6	Gowa	26	123	149	755.235	0,2
7	Sinjai	16	62	78	259.385	0,3
8	Maros	14	26	40	383.921	0,1
9	Pangkep	23	64	87	362.364	0,24
10	Barru	12	34	46	180.509	0,25
11	Bone	38	75	113	869.301	0,13
12	Soppeng	17	44	61	236.156	0,26
13	Wajo	23	55	78	372.512	0,21
14	Sidrap	14	48	62	316.951	0,2
15	Pinrang	17	36	53	401.858	0,13
16	Enrekang	14	67	81	236.312	0,34
17	Luwu	22	99	121	378.987	0,32
18	Tana Toraja	21	31	52	285.687	0,18
19	Luwu Utara	14	61	75	368.801	0,2
20	Luwu Timur	17	77	94	299.975	0,31
21	Toraja Utara	26	24	50	245.490	0,2
22	Makassar	46	33	79	1.659	0,05
23	Parepare	7	21	28	147.322	0,19
24	Palopo	12	37	49	187.236	0,26

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2019

Sedangkan dalam Rasio tenaga medis per satuan penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan, memperlihatkan kecenderungan yang tidak tetap jumlahnya. Pada tahun 2015, rasio tenaga medis 47,99/100.000 penduduk, kemudian tahun 2016 dan tahun 2017 turun menjadi 41,61 dan 37,70 per 100.000 penduduk. Hal ini disebabkan pada tahun 2017 pendataan tenaga medis sudah mulai dilakukan secara online sehingga tenaga medis di unit fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya

tercover. Tahun 2018 rasio ini meningkat menjadi 42,72/100.000 penduduk, hal ini disebabkan karena adanya penempatan Dokter melalui Program Nusantara Sehat berbasis Tim dan berbasis Individu, pemanfaatan Dokter Spesialis melalui Program Pendayagunaan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pemerintah serta adanya upaya Pemerintah Daerah untuk merekrut tenaga dokter di masing-masing Kabupaten/Kota. Tahun 2019 rasio ini kembali menurun menjadi 41,11/100.000 penduduk, disebabkan karena kurangnya partisipasi beberapa rumah sakit swasta dalam penginputan SDM Kesehatan secara online.

Aspek Pelayanan Umum dalam bidang Infrastruktur jalan merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pilar utama pembangunan nasional. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat dari terinduksinya biaya transportasi dan meningkatnya waktu tempuh, yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi di Sulawesi Selatan yang menjadikan panjang jalan kewenangan provinsi meningkat dari 1.500,15 km menjadi 2.009,35 km. Perubahan

Keputusan Gubernur terhadap kewenangan jalan berdampak pada persentase kondisi jalan yang menurun pada tahun 2018. Walaupun pada kenyataannya, jumlah panjang jalan kondisi mantap meningkat secara signifikan. pembangunan transportasi jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, kondisi jalan tidak mengalami perubahan panjang jalan dimana kondisi jalan baik tahun 2015 adalah 42.11persen meningkat pada tahun 2016 sebesar 42.22 persen, pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan 2.60 persen, hal ini disebabkan karena bertambahnya ruas jalan kewenangan provinsi menjadi 2.009,35%, namun pada tahun 2019 jalan dengan kondisi baik telah mengalami peningkatan sebesar 1,63% atau Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik tahun 2019 sebesar 33,85 persen.

Tabel 2.10 Rasio Jumlah Panjang Jalan dengan Penduduk

Jalan	2015	2016	2017	2018	2019
Nasional	1.745,92	1.745,92	1.745,93	1.745,92	1.745,92
Provinsi	1.147,51	1.500,15	1.500,15	2.009,35	2.015,23
Kab/Kota	25.379,58	25.379,58	26.772,63	26.772,63	26.708,39
Total Panjang	28.273,01	28.625,65	28.625,65	30.347,01	30.469,54
Jumlah penduduk Jiwa	8.520.304	8.606.375	8.690.294	8.771.970	8851240
Rasio Panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,00332	0,00333	0,00329	0,00345	0,00344

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam RPJMD

Penggunaan sempadan sungai sebagai tempat tinggal (bangunan liar) di Sulawesi Selatan khususnya di kabupaten/Kota

masih banyak. Peningkatan tersebut disebabkan karena masih kurangnya pengawasan pengendalian dan pemanfaatan ruang sempadan sungai dari pemerintah daerah untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sempadan sungai melalui penerbitan undang-undang tentang sempadan sungai. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tercatat hingga 2019 35 persen sempadan sungai yang dipakai bangunan liar.

Peningkatan capaian luas irigasi kondisi baik seiring dengan peningkatan kondisi saluran induk dan saluran sekunder pada Daerah irigasi Kewenangan Provinsi. Saluran induk kondisi baik sepanjang 140.239 meter atau sebesar 72 persen dan saluran sekunder kondisi baik sepanjang 162.892 meter atau 67 persen. Persentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik cukup tinggi di tahun 2015 mengalami peningkatan di tahun 2019 sebesar 62.89 persen di mana luas irigasi kewenangan provinsi sebesar 58.858 Ha saat ini luas irigasi provinsi dalam keadaan kondisi baik 42.674 Ha.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa : Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan

kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Ada 4 (empat) Kriteria rumah layak huni , yaitu : ketahanan bangunan (bahan bangunan atap, dinding, dan lantai memenuhi syarat bangunan); kecukupan luas tempat tinggal (luas lantai kurang lebih 7,2 m²), akses air minum layak dan akses sanitasi aman atau layak. Rasio rumah layak huni menggambarkan adanya perbandingan dalam bentuk angka meningkatnya akses rumah tangga terhadap rumah layak huni. Tahun 2019 besaran rasio rumah layak huni di Sulawesi Selatan sebesar 0,200 yang menunjukkan adanya peningkatan rasio dari 0,195 pada tahun 2018. Pencapaian rasio rumah layak huni menunjukkan bahwa target rasio rumah layak huni melampaui target dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,196. Kenaikan pencapaian rasio rumah layak huni didukung tingginya investasi pembangunan rumah bersubsidi di Kawasan strategis nasional (KSN) Mamminasata yang merupakan penyangga Kota Makassar.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan sasaran utama pelayanan sosial. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan Sosial adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur

tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Tahun 2019 Jumlah PMKS yang diberikan bantuan sebanyak 287.692 jiwa lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 355.136 jiwa pada tahun 2018. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan pada tahun 2019 adalah sebanyak 462.125 jiwa. Secara persentase pada tahun 2019, PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 57,11 persen lebih rendah 12,37 persen dari tahun 2018 yaitu 70,48 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang dapat menggambarkan keadaan penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tingginya angka TPAK perlu dicermati karena apabila disebabkan oleh bertambahnya penduduk yang bekerja menunjukkan partisipasi yang baik, akan tetapi jika disebabkan oleh bertambahnya jumlah pencari kerja, maka menunjukkan rendahnya kesempatan kerja. Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) Provinsi Sulawesi Selatan Agustus 2019 sebanyak 6.407.285 orang. Dari jumlah tersebut, penduduk yang tergolong angkatan kerja mencapai 4.030.400 orang, naik 42.371 orang disbanding Agustus 2018. Angkatan kerja terdiri

dari penduduk bekerja 3.830.096 orang dan pengangguran 200.304 orang. Dibandingkan Agustus 2018, jumlah penduduk bekerja bertambah 55.172 orang, sedangkan pengangguran berkurang sebanyak 12.801 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2019 sebesar 62,90 persen. Indikator ini lebih rendah 0,11 persen poin dibanding TPAK Agustus 2018. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja yang menurun.

Jumlah penganggur di Sulawesi Selatan berdasarkan angka terbanyak jumlahnya di regional Pulau Sulawesi, namun hal ini diakibatkan oleh besarnya jumlah penduduk Sulawesi Selatan dibanding provinsi lain di pulau Sulawesi yaitu 8.851.240. jika dibandingkan secara persentase dengan jumlah angkatan kerja maka besarnya 4,97 persen terbesar kedua setelah Sulawesi Utara. Memperhatikan tren penambahan jumlah penganggur di Sulawesi Selatan menunjukkan adanya peningkatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan khususnya terkait kesesuaian antara pemenuhan kebutuhan tenaga kerja dengan angkatan kerja. Memperhatikan perubahan pertumbuhan jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan, maka diperoleh gambaran bahwa upaya penanganan jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan belum

menunjukkan keberhasilan yang diindikasikan dengan perubahan pertumbuhan jumlah penganggur tahun 2019 sebesar 5,71 persen. Capaian ini jauh di bawah nasional dan 4 (empat) provinsi lainnya di Pulau Sulawesi yang berhasil menurunkan jumlah pengangguran di daerahnya masing-masing. Untuk itu perlu dilakukan adanya kebijakan dan upaya yang tepat guna mengatasi angka pengangguran di Sulawesi Selatan, terlebih lagi dengan adanya dampak pandemic Covid-19 yang akan mempengaruhi bertambahnya jumlah pengangguran.

Dalam urusan Pariwisata, dimana Pariwisata merupakan investasi yang sangat menjanjikan. Hal ini karena investasi yang dilakukan untuk pengembangan wisata biasanya hanya sekali dan dilanjutkan dengan pengelolaan dan peralatan, sedangkan penggunaan atas pemanfaatan bisa berulang-ulang.

Realisasi jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami peningkatan yang fluktuatif setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2015 dimana tingkat pencapaian atas kunjungan mencapai 7.128.826 kunjungan atau 129% dari yang ditargetkan dan mengalami peningkatan di tahun 2016 dengan jumlah kunjungan sebanyak 8.426.528 kunjungan atau meningkat 18,20% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami penurunan sebesar 58.780 kunjungan atau (-0,70) dari tahun 2016, sehingga realisasi

kunjungan wisatawan nusantara di tahun 2017 sebesar 8.367.748 kunjungan. Untuk tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan nusantara sebanyak 10.167.715 kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 21% dari tahun sebelumnya. Namun untuk 2019 jumlah kunjungan wisatawan nusantara mengalami penurunan sebesar (-14%) dari tahun 2018, sehingga jumlah kunjungan wisatawan nusantara di tahun 2019 sebanyak 8.681.275 kunjungan. Disisi lain rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara per hari tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 2015 – 2019. Sedangkan untuk belanja kunjungan wisatawan nusantara per tahunnya mengalami peningkatan yang pesat di akhir tahunnya, dimana pada Tahun 2016 sebesar Rp. 26.73,- trilyun dan meningkat sebesar 31,61% di tahun 2019 dengan total belanja sebesar Rp. 35.18,- Trilyun.

Pencapaian target kunjungan wisatawan nusantara setiap tahunnya tentunya tidak lepas dari peran dari pemerintah untuk terus mengembangkan potensi destinasi wisata yang ada di wilayahnya yang bertujuan meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung atau berlibur di Sulawesi Selatan walaupun tidak dapat dipungkiri juga terdapat penurunannya jumlah kunjungan, namun penurunan jumlah wisatawan ini didasari atas pesatnya destinasi-destinasi lain, baik destinasi di dalam dan luar negeri yang tumbuh sebagai pesaing

destinasi wisata Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah potensi daerah pariwisata di Sulawesi Selatan

Tabel 2.11. Potensi Pariwisata Sulawesi Selatan

No	Kabupaten Kota	Nama Destinasi Wisata
1	Makassar	a. Benteng Rotterdam b. Benteng Sumba Opu c. Taman Wisata Peraian Pulau Kapoposang
2	Selayar	Taman laut Takabonerate
3	Maros	a. Taman Nasional Bantimurung b. TWA Kebun Raya Pucak
4	Gowa	TWA Malino
5	Bulukumba	a. Pantai Tanjung Bira b. Pusat Kerajinan Perahu Phinisi (Tana beru)
6	Tanah Toraja	Wisata Kete Kesu
7	Toraja Utara	a. Wisata Londa b. Wisata Musium ne'Gandeng c. Negeri diatas Awas (Lolai)
8	Luwu Timur	a. TWA Danau Matano –Mahalona b. TWA Danau Towuti
9	Bone	TWA Cani Sidenreng
10	Soppeng	TWA Lejja
11	Takalar	Taman Buru Komara
12	Jeneponto	Taman Buru Bangkala
13	Wajo-Sidrap	TWA Danau Tempe

Sumber: RPJMD Sulawesi Selatan

Sedangkan, dalam konteks perekonomian secara umum, Sulawesi Selatan selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 7,62 persen, namun dalam kurun waktu pada tahun 2014 sampai tahun 2017 pertumbuhan ekonomi kembali menurun dari 7,54 persen hingga 7,23 persen. Namun demikian, dalam kurun waktu

2013-2017 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi Nasional dengan laju pertumbuhan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan telah melampaui kinerja Nasional, bahkan mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2015 ketika pertumbuhan nasional menurun.

Tabel 2.12: Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan

No	Pertumbuhan Ekonomi	Satuan	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	Nasional	%	4,88	5,02	5,05	5,17	5,02	5,10
2	Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,19	7,42	7,23	7,06	6,92	7,40

Sumber: BPS

Trend pertumbuhan ekonomi tersebut, sejalan dengan perkembangan secara nasional. Pola perkembangan ekonomi nasional juga menunjukkan besaran peningkatannya yang menurun antara Tahun 2013-2017 sebesar 0,39%. Sebagaimana yang terlihat pada Tahun 2016, baik provinsi dan nasional mengalami perlambatan, dan memasuki Tahun 2017, provinsi dan nasional mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun, dibandingkan dengan kondisi nasional pada umumnya, laju pertumbuhan ekonomi Sulsel selalu berada di atas rata-rata nasional.

Memperhatikan lebih jauh pada struktur perekonomian Sulsel, berdasarkan Lapangan Usaha, diketahui bahwa sektor primer, yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kontributor yang paling besar, pada Tahun 2017 nilai PDRB-ADHK sektor ini sebesar Rp 61,47 trilyun dari total PDRB Sulsel, Sektor kedua adalah Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ini sebesar Rp. 42,48 Trilyun. Sektor ketiga adalah Industri Pengolahan dengan nilai PDRB pada Tahun 2017 sebesar Rp. 40,41 trilyun. Sektor keempat adalah Konstruksi, dengan kontribusi sebesar Rp. 34,76 Trilyun terhadap total PDRB

Dari segi distribusi lapangan usaha terhadap PDRB yang terbesar adalah pertanian,kehutanan dan perikanan sebesar 22,89%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,94% dan kemudian industri pengolahan sebesar 13,71%. Selama kurun waktu 2013-2017, gambaran tentang perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan PDRB ADHK seluruh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen pengeluaran terbesar yaitu 53,65%.

Isu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bahan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk diatas garis

kemiskinan adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diatas garis kemiskinan. Jadi, penduduk dikatakan miskin jika pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan mendasar dalam pembangunan. Tingkat kemiskinan di Sulawesi selatan sekalipun relative menurun, tetapi persentasenya masih cenderung tinggi. Persoalan kemiskinan penduduk berdampak pada keterbelakangan akses penduduk terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan sanitasi lingkungan perumahan yang diakibatkan rendahnya daya beli masyarakat karena rendahnya tingkat pendapatan.

Tabel 2.13. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2017

Uraian	Satuan	Tahun						
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan	Ribu Orang	160,61	154,40	157,18	150,60	166,50	168,7	162,39
Jumlah Penduduk Miskin Pedesaan	Ribu Orang	701,61	651,95	707,34	646,21	659,47	610,94	597,19
Jumlah Penduduk Miskin Kota +Desa	Ribu Orang	863,23	806,35	864,51	796,81	825,97	779,64	759,58
Persentase Penduduk Miskin Perkotaan	%	5,23	4,93	4,93	4,47	4,76	4,48	4,22
Persentase Penduduk Miskin Pedesaan	%	13,31	12,25	13,22	12,30	12,65	12,15	11,9
Persentase Penduduk Miskin Kota + Desa	%	10,32	9,54	10,12	9,24	9,48	8,87	8,56

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan terus mengalami fluktuasi. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 864,51 ribu jiwa (10,12%). Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan tahun 2013-2017 didominasi oleh penduduk pedesaan. Berdasarkan data statistik (Maret 2018) jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 792,63 ribu jiwa (9,06%). Peningkatan persentase penduduk diatas garis kemiskinan di Sulawesi Selatan yaitu 90,60% (2016) menjadi 90,62% (2017) mengindikasikan bahwa jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan mengalami penurunan. Peranan komoditi makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan makanan dan non makanan diantaranya adalah bandeng, telur ayam ras, mie instan, daging sapi dan rokok filter.

Perbandingan jumlah penduduk miskin kabupaten/kota di Sulawesi Selatan sebagaimana terlihat pada tabel 2.14 menunjukkan persentase penduduk miskin yang berada diatas rata-rata penduduk miskin Sulawesi Selatan adalah Kab.Pangkep (16,22%), Kab. Jeneponto (15,40%), Kab. Toraja Utara (14,41%), Luwu Utara (14,33%), Luwu (14,01%), Selayar (13,28%), Enrekang (13,16%), Tana Toraja (12,62%), Maros (11,14%), Bone (10,28%), Barru

(9,71%) dan Bantaeng (9,66%). Menurunnya angka kemiskinan menjadi target utama pemerintah melalui beberapa program penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan dengan memfokuskan program terkait penanggulangan kemiskinan jumlah penduduk diatas garis kemiskinan semakin meningkat.

2.2.Kajian Pustaka

Banyak pemerintah daerah di seluruh Eropa dan Amerika Utara telah mulai secara teratur mensurvei warganya dalam upaya untuk menilai kebutuhan mereka dan mengukur kepuasan mereka terhadap kualitas layanan pemerintah daerah. Tren ini mencerminkan penekanan baru pada pengukuran kinerja dan minat untuk membuat pemerintah daerah lebih berfokus pada masyarakat dan responsif terhadap warganya.

Beberapa inisiatif menonjol di sepanjang garis ini termasuk Alat Pengukuran Umum Kanada (Institute for Citizen Centered Service 2005), Survei Warga Nasional Amerika Serikat (Asosiasi Manajemen Kota/County Internasional 2005), Indeks Kepuasan Pelanggan Amerika (2006) dan Komisi Eropa Eurobarometer (Komisi Eropa 2005). Namun, sebagian besar survei warga tetap merupakan kegiatan yang masih direncanakan dan dilakukan di tingkat lokal. Sebagian

besar analisis survei warga terus mengandalkan statistik deskriptif dasar dan garis tren untuk menafsirkan hasil; namun seringkali sulit untuk memahami peringkat yang diberikan warga untuk berbagai layanan dan menggunakan peringkat ini untuk membandingkan kualitas dan kinerja layanan secara bermakna. Alat baru diperlukan untuk mengekstrak informasi yang lebih berguna dari hasil survei warga.

Beberapa publikasi, yang ditujukan untuk memberikan saran kepada pemerintah daerah tentang analisis survei warga, menganjurkan penggunaan analisis kinerja kepentingan (Importance-Performance), kadang-kadang disebut analisis kuadran. (Ryzin dan Immerwahr 2007)

Ryzin dan Immerwahr (2007) menggunakan beberapa variabel yang diukur dalam konteks analisis survei warga dengan menggunakan kinerja kepentingan (Importance-Performance Analysis). Adapun variabel yang diukur adalah:

- 1) kebersihan jalan dan trotoar (CLEAN);
- 2) pemeliharaan jalan dan jalan (ROAD);
- 3) taman dan tempat bermain (PARK);
- 4) perpustakaan umum (tidak termasuk perpustakaan perguruan tinggi atau universitas) (LIBRARY);
- 5) pengumpulan sampah (WASTE);

- 6) perlindungan polisi (POLICE);
- 7) hubungan polisi-masyarakat (POL-COM);
- 8) proteksi kebakaran (FIRE);
- 9) pendidikan umum (K-12) (SCHOOL);
- 10) kemudahan perjalanan mobil dalam kota (TRAFFIC); dan
- 11) kemudahan perjalanan dengan transportasi umum (TRANSIT).

Hasilnya menunjukkan bahwa Importance-Performance Analysis menawarkan alat yang berguna bagi pelaku Administrasi Publik dan pembuat kebijakan untuk lebih memahami penilaian subjektif warga negara terhadap kinerja pemerintah. Alat ini dapat bekerja dengan menggunakan ukuran kepentingan yang dinyatakan secara eksplisit atau ukuran kepentingan yang diturunkan dari analisis regresi. Pertanyaan yang muncul secara alami adalah: metode mana yang lebih disukai dari sudut pandang atau pandangan administrator public atau analisis kebijakan yang merencanakan survey masyarakat?

Berbeda dengan Ryzin (2007), evaluasi terhadap kinerja pemerintah bisa dilihat dari kepuasan masyarakat dari beberapa variabel umum (Walle and Bouckaert 2007):

- 1) Pelayanan Kesehatan
- 2) Sistem Pendidikan
- 3) Pelayanan Pos

- 4) Air Bersih dan Listrik
- 5) Pelayanan Telekomunikasi
- 6) Televisi dan Radio

Importance-Performance Analysis (IPA) adalah teknik penelitian yang dibangun sebagai sebuah alat dalam analisis pasar dan manajemen strategi. Meskipun pada awalnya digunakan untuk kepentingan pemasaran, teknik ini digunakan juga dalam berbagai bidang seperti Pariwisata, Layanan Makanan, pendidikan, kesehatan, perbankan, administrasi public, e-business, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. (Sever 2015)

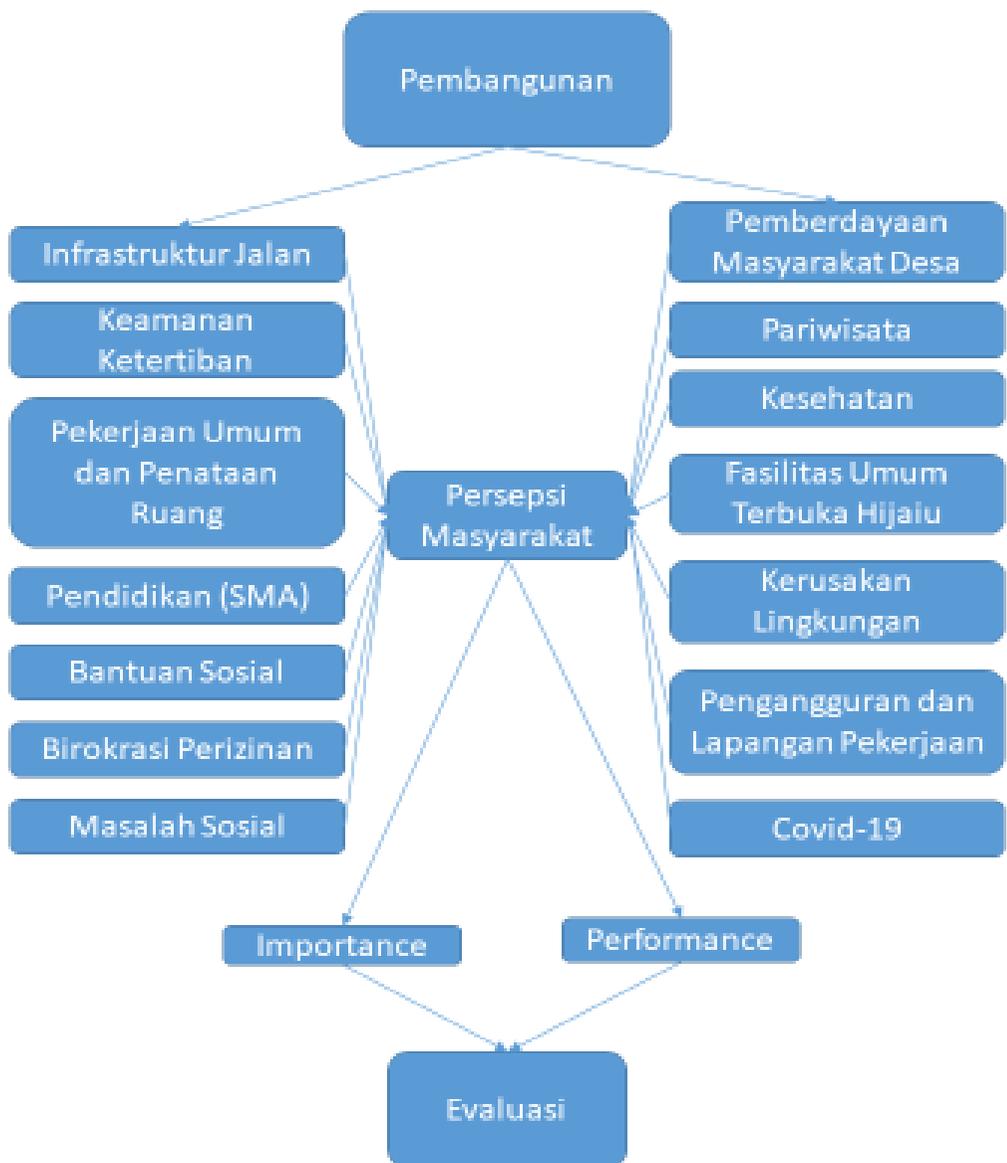
IPA mendapatkan popularitas karena kesederhanaan dan penerapannya dalam menjelaskan kepuasan pelanggan dan menyarankan strategi manajemen. Namun, validitas empiris dan kegunaannya dipertanyakan karena kurangnya kriteria standar, bersama dengan masalah konseptual dan metodologis.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada *link* antara kepuasan masyarakat dengan kinerja administrative dari pemerintah daerah?(Kelly 2003). Dengan menggunakan sampel pelayanan di kepolisian dan pemadam kebakaran, Kelly(2003) menyebutkan bahwa hubungan antara kinerja pelayanan kebakaran dan kepolisian dan kepuasan masyarakat adalah tidak dapat ditolak. Bahwa kepuasan

masyarakat terhadap layanan mungkin merupakan penilaian kontekstual dari masyarakat daripada evaluasi objektif berdasarkan kinerja layanan atau bahkan pengalaman pribadi.

2.3. Kerangka Pikir

Dari keseluruhan isu strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, setidaknya ada 15 isu strategis yang dipilih dalam survey ini sebagai variabel yang akan ditanyakan kepada masyarakat. Isu strategis ini dipilih berdasarkan referensi terkait dengan penelitian sebelumnya dengan dilakukan penambahan isu strategis lainnya untuk mengetahui lebih banyak terkait pembangunan. Berikut ini adalah kerangka pikir dalam riset survey kepuasan masyarakat terhadap kinerja pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan



Grafik 2.1. Kerangka Pikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari tahap konsolidasi dan persiapan survei lapangan. Pada tahap konsolidasi, konsultan mengkonfirmasi ruang lingkup survei kepada pengguna jasa. Sekaligus mengajukan rancangan kegiatan survei (persiapan survei) yang meliputi:

3.1.1. Instrumen Survei

Instrumen yang dipergunakan dalam kegiatan ini ada 2 yaitu adalah kuesioner dan form observasi. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian, diantaranya:

1. Identitas responden

Bagian ini berisi data identitas responden, data ini terutama digunakan untuk proses Quality Control dan pengelompokan responden. Data identitas responden meliputi: nama, kelurahan desa/kecamatan, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan responden.

2. Pendapat masyarakat

Pada bagian ini ditanyakan pendapat masyarakat yang meliputi kepuasan dan harapan atas prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan diambil berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019.

Sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif.

Dari visi tersebut dan berdasarkan RPJMD kemudian disusun pertanyaan yang akan berfokus pada pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk pertanyaan kepuasan, responden diminta memilih 1 jawaban diantara 4 pilihan jawaban yaitu:

- 1) STP : Sangat Tidak Puas
- 2) TP: Tidak Puas
- 3) P: Puas
- 4) SP: Sangat Puas

Sedangkan untuk pertanyaan tentang harapan, responden diminta memilih 1 jawaban diantara 4 pilihan jawaban yaitu:

- 1) STP: Sangat Tidak Penting
- 2) Tidak Penting
- 3) Penting
- 4) Sangat Penting

3. Keluhan dan Saran Pada bagian ini, masyarakat dapat menyampaikan:

1. Keluhan yang pernah dirasakan responden terhadap pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Selatan
2. Saran responden untuk perbaikan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun Form Observasi diberikan kepada surveyor untuk mencatat hal-hal yang menjadi cacatan yang tidak tertera dalam kuesioner, seperti kondisi pelayanan publik, ruang terbuka hijau, dan lain-lain.

3.1.2. Rancangan Sampel Survei

Penentuan responden dalam survei ini dilakukan melalui metode *Multistage Random Sampling*. Prinsip utama dalam penentuan rancangan sampel bahwa jumlah unit sampel yang ada serta keharusan untuk mengakomodir terambilnya responden yang representatif, yaitu sejauh mana jumlah responden mampu merepresentasikan persepsi populasi yang sebenarnya, yang hal ini akan menentukan tingkat akurasi penelitian. Dalam kegiatan survey ini, tingkat keakuratan dalam penelitian ditetapkan dalam angka margin of error (MoE) sebesar 2.88%, atau dengan akurasi kepercayaan sebesar 97,12%. Dengan margin error 2.88% tersebut maka kemudian ditentukan jumlah responden dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana:

n adalah ukuran sampel

N adalah jumlah populasi

e adalah batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan disebutkan bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada

tahun 2020 berjumlah 9.073.509 jiwa. Adapun masyarakat yang akan ditanyakan dalam survei ini adalah yang berusia 17 tahun ke atas. Data yang digunakan secara berkala adalah dengan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Data Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dipakai karena merekap masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki hak pilih (17 tahun ke atas) dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas sikap dan pilihannya. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2021 dengan jumlah sebanyak **6.212.508 (enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus delapan)** pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 3.014.337 (tiga juta empat belas ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 3.198.171 (tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh satu) pemilih, tersebar di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Dengan menggunakan rumus Sloven diatas, maka jumlah responden yang akan diambil berjumlah

$$\begin{aligned}n &= \frac{6.212.508}{1 + (6.212.508) * (2,88)^2} \\ &= 1.205 \text{ Responden}\end{aligned}$$

Untuk mendapatkan sejumlah sampel sesuai perhitungan, maka dilakukan dengan Pengambilan sampel dari rumah ke rumah dari 24 Kota dan Kabupaten se Sulawesi Selatan.

3.1.3. Manajemen Surveyor

Pelaksanaan survey akan menggunakan lapangan pengumpul data (surveyor). Metode pelaksanaan survey akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Kualifikasi Tenaga Surveyor Surveyor bertugas dalam hal pengumpulan data (melalui survey dan observasi). Surveyor memilik kualifikasi :

- 1) Memiliki penguasaan yang baik terhadap wilayah survey
- 2) Pendidikan minimal SMA/ SMK (Sedang mengambil pendidikan tinggi (S1)
- 3) Memiliki pengalaman minimal 3 (tiga) kali melakukan pengumpulan data primer dan menangani administrasi kegiatan survei.

Surveyor diusulkan dan dipilih dari berdasarkan kualifikasi yang dimiliki dan bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan, dan lebih diutamakan Kota atau Kabupaten terkait, namun selain itu

surveyor yang akan diusulkan berikut kandidat lainnya akan menjalani seleksi ulang dengan :

- 1) Mengisi tes kuesioner (dinilai pemahaman, kelengkapan dan kesesuaian isi)
- 2) Wawancara untuk kesediaan / kesanggupan menjadi surveyor dalam kegiatan survei di Provinsi Sulawesi Selatan sekaligus menjaga kerahasiaan informasi dalam kegiatan survei ini.

2. Pelatihan Surveyor

Pelatihan diberikan kepada surveyor sebelum jalannya survei untuk memastikan agar setiap surveyor mendapatkan pemahaman yang sama dalam melaksanakan survei. Materi pelatihan untuk interviewer adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan tentang gambaran umum survei (deskripsi)
- 2) Penjelasan tentang target responden dan teknis pemilihan responden (siapa dan berapa banyak target perolehan)
- 3) Penjelasan tentang teknis pelaksanaan survei (perizinan, pengenalan dan cara mewawancara/ observasi)
- 4) Penjelasan detail tentang setiap pertanyaan dalam kuesioner (kuesioner wawancara maupun observasi) dilengkapi dengan interviewer guideline

- 5) Tanya jawab, diskusi tentang materi wawancara dan observasi dan roleplay wawancara dan observasi

3.2. Tahap Pelaksanaan Survey

Tahap pelaksanaan kegiatan terdiri dari 2 (dua) kegiatan utama, yaitu : (1) Pengumpulan Data Primer dengan Metode Survey; dan (2) Proses *QC (Quality Control)* dan *QA (Quality Assurance)* terhadap proses pengumpulan data.

3.2.1. Survey Lapangan (Fieldwork) untuk Pengumpulan Data Primer

Sejalan dengan pendekatan *Quantitative*, maka pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey melalui wawancara langsung tatap muka (*face to face interview*) dengan responden. Responden yang akan diwawancarai yaitu responden dari masyarakat.

3.2.2. Proses Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA)

Kesuksesan pelaksanaan survey pada akhirnya sangat ditentukan oleh *attitude* petugas lapangan, dalam hal ini adalah surveyor, team leader dan supervisor yang harus memiliki integritas diri yang tinggi dan dapat dipercaya.

Petugas lapangan seringkali melakukan kecurangan (*cheating*) dalam mengumpulkan data hasil wawancara. Umumnya kecurangan dilakukan oleh surveyor dengan cara mengisi sendiri jawaban pertanyaan dalam kuesioner dan merekayasa identitas responden (responden fiktif).

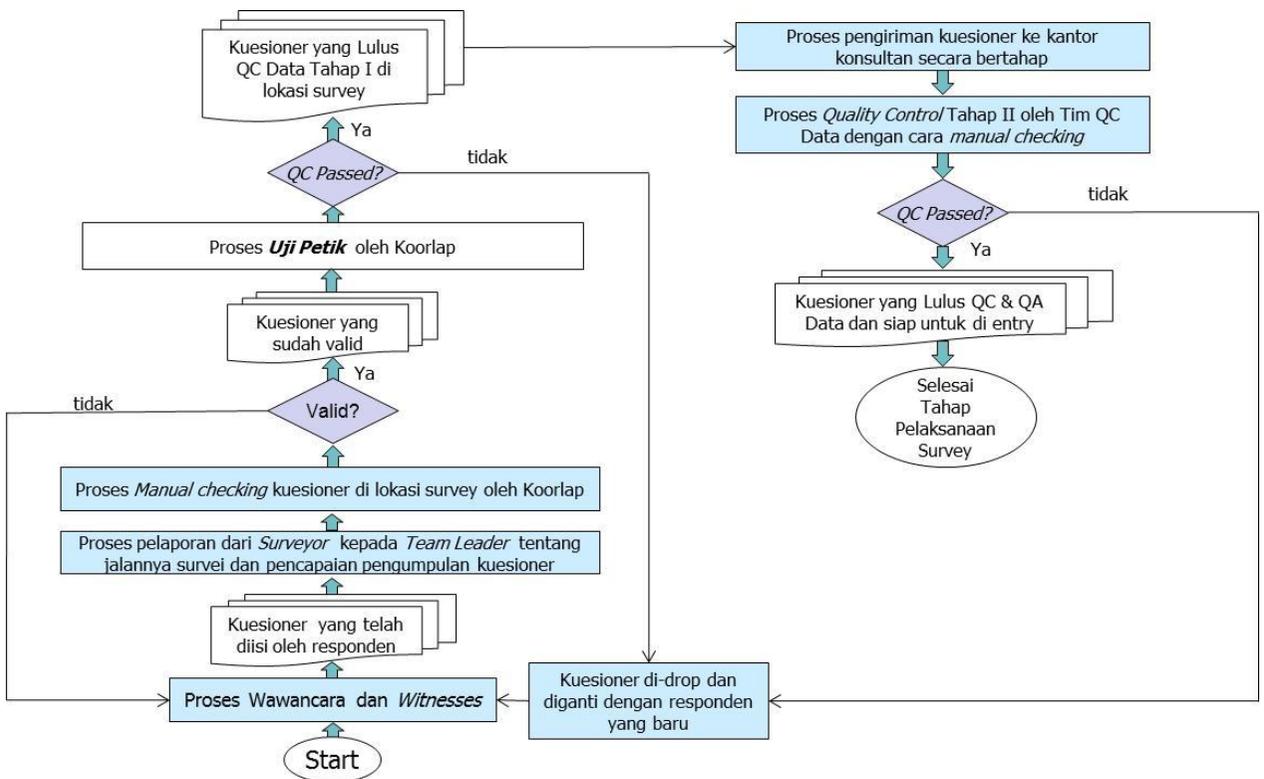
Untuk mengatasi kecurangan (*cheating*) petugas lapang ini, maka diperlukan QC dan QA Data yang sangat ketat. QC Data dimaksudkan untuk memastikan data yang terkumpul benar-benar valid dan akurat, sedangkan QA untuk memastikan bahwa **responden yang diwawancarai benar-benar ada** (bukan responden fiktif) sesuai dengan kriteria dan **proses wawancara benar-benar telah dilakukan** (bukan hasil rekayasa surveyor), sesuai dengan panduan wawancara yang ditetapkan.

QA dilakukan dengan cara *witnesses*, sedangkan QC dilakukan dengan cara *manual checking* dan Uji Petik.

- ❑ *Witnesses* dilakukan oleh *team leader* dengan cara mendampingi surveyor dalam melakukan wawancara.
- ❑ *Manual checking* dilakukan dengan cara memeriksa lembar kuesioner secara manual untuk mendeteksi kesalahan dalam pengisian kuesioner dan kelengkapan jawaban responden,

- ❑ Uji petik dilakukan dengan cara mengambil beberapa lembar kuesioner yang telah valid secara acak, kemudian dilakukan *back-checked* dengan cara menghubungi responden via sambungan telepon (*Call-backed*). Uji petik berjumlah 25 persen dari total sampling.

Agar pelaksanaan survey lapangan dapat berjalan dengan baik, perlu disusun diagram alur pekerjaan dan dokumen seperti terlihat pada Gambar berikut ini. Alur ini merupakan bagian dari proses keseluruhan metode survey dengan *quality control* mulai dari tahap uji petik dan juga dengan cara *manual checking*.



Sumber: diolah

3.3. Tahap Pelaporan dan Presentasi

Aktivitas terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan adalah penyusunan laporan kegiatan dan memaparkannya di hadapan Pimpinan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data yang dihasilkan pada tahap pengolahan dan analisis data secara keseluruhan, interpretasi dari masing-masing hasil analisis data, serta masukan-masukan dari Tim Teknis dan Tim Tenaga Ahli Konsultan maka dapat disusun sebuah Laporan Hasil Kegiatan Rekomendasi Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil tersebut akan dikonsultasikan dengan Tim Pengendali Mutu Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian diseminarkan hasilnya.

3.4. Profil Demografi Responden

Responden dibagi berdasarkan Jenis Kelamin yaitu Pria dan Wanita, yang akan disesuaikan dari hasil sensus Badan Pusat Statistik. Berikut ini adalah profil responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 3.1. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin (%)

Jenis Kelamin	Populasi	Sampel
Pria	48,52	47.8
Wanita	51.48	52.2

Sumber: Diolah

Adapun berikutnya, responden dipilih berdasarkan usia.

Berikut ini adalah hasil sensus BPS

Tabel 3.2. Profil Responden Berdasarkan Usia (%)

Usia	Populasi	Sampel
Dibawah 20 Tahun	6.4	5.2
20 - 29 Tahun	24.5	22.2
30 - 39 Tahun	21.6	23.1
40 - 49 Tahun	18.8	21.4
50 - 59 Tahun	14.3	15.2
60 Tahun / Lebih	14.4	12.8

Sumber: Diolah

Untuk selanjutnya, profil demografi responden dilihat berdasarkan agama. Berikut ini adalah hasil sensus BPS

Tabel 3.3. Profil Responden Berdasarkan Agama (%)

Agama	Populasi	Sampel
Islam	86.1	89.9
Protestan	9.1	7.0
Katolik	2.8	1.8
Hindu	1.4	1.2
Budha	0.5	0
Konghuchu	0.1	0

Sumber: Diolah

Terakhir, profil responden akan disesuaikan berdasarkan suku yang ada di Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah hasil dari sensus BPS

Tabel 3.4. Profil Responden Berdasarkan Suku (%)

Suku	Populasi	Sampel
Bugis	45.1	47.5
Makasar	29.7	28.3
Toraja	7.34	10.2
Luwu	4.9	7.4
Jawa	2.9	3.3
Lainnya	10.1	3.3

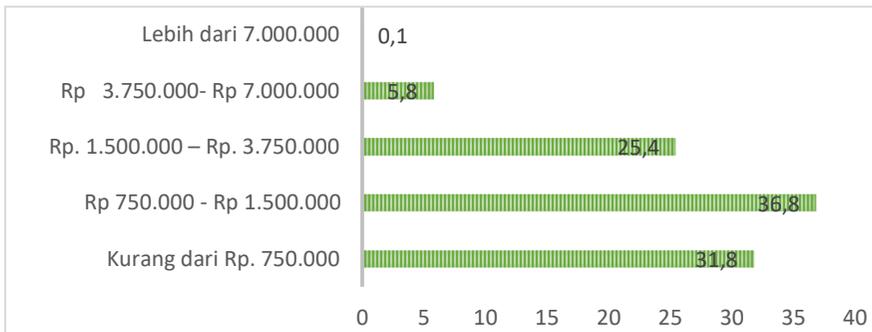
Sumber: Diolah

Tabel 3.5. Sebaran Responden per Kota Kabupaten (%)

Kota / Kabupaten	Populasi	Sampel
Bantaeng	2.17	2.3
Barru	2.03	2.1
Bone	8.84	8.7
Bulukumba	4.82	4.8
Enrekang	2.48	2.5
Gowa	8.44	8.5
Jeneponto	4.43	4.5
Kepulauan Selayar	1.51	1.5
Luwu	4.03	4.0
Luwu Timur	3.27	3.2
Luwu Utara	3.56	3.5
Kota Makassar	15.7	15.6
Maros	4.32	4.3
Kota Palopo	2.04	2.0
Pangkajene Dan Kepulauan	3.81	3.9
Kota Parepare	1.67	1.7
Pinrang	4.45	4.4
Sidenreng Rappang	3.53	3.5
Sinjai	2.86	2.8
Soppeng	2.59	2.6
Takalar	3.32	3.3
Tana Toraja	3.09	3.3
Toraja Utara	2.88	2.9
Wajo	4.18	4.3

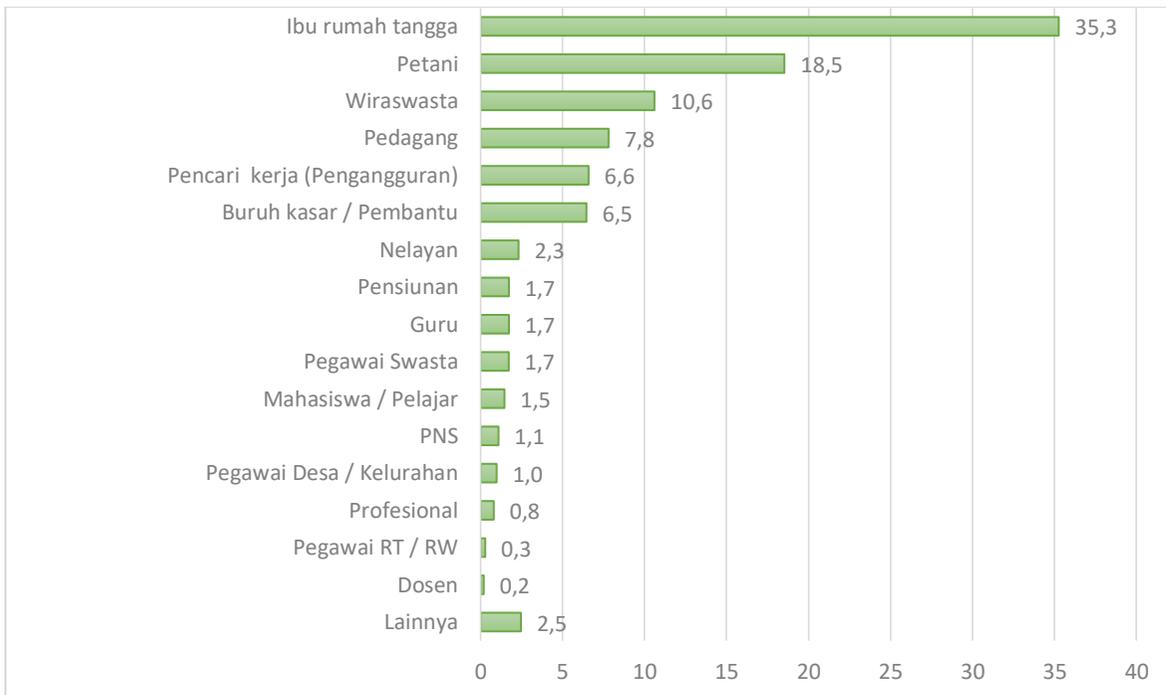
Sumber: Diolah

Grafik 3.1. Sebaran Pendapatan Responden



Sumber: Diolah

Grafik 3.2. Sebaran Pekerjaan Responden



Sumber: Diolah

Secara domisili, tampak sebaran dan proporsi responden di setiap Kota/Kabupaten yang diambil bersesuaian dengan data KPU

tahun 2019. Walaupun ada perbedaan namun relatif kecil dan tidak mempengaruhi hasil penelitian.

Sampel juga tersebar di 24 Kota/Kabupaten dan 121 Kecamatan. Hal ini penting untuk dipastikan agar aspirasi dari responden survei dapat mewakili dengan baik aspirasi masyarakat di seluruh pelosok Sulawesi Selatan.

Karakter demografi responden juga bersesuaian dengan karakter demografi populasi masyarakat Indonesia yang di ambil dari data BPS.

Hal ini menunjukkan bahwa karakter sampel sudah relatif bersesuaian dengan karakter populasi, sehingga aspirasi responden yang disampaikan dalam survei juga mampu mewakili aspirasi populasi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum

Data pendapatan menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Mayoritas pekerjaan responden adalah Ibu Rumah Tangga, petani dan wiraswasta.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik secara demografis, aspirasi politik maupun strata ekonomi, karakter responden survei telah mampu mewakili populasi masyarakat Sulawesi Selatan,

sehingga aspirasi yang disampaikan oleh responden survei juga mampu mewakili aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan dengan tingkat kesalahan sebesar 2,88%.

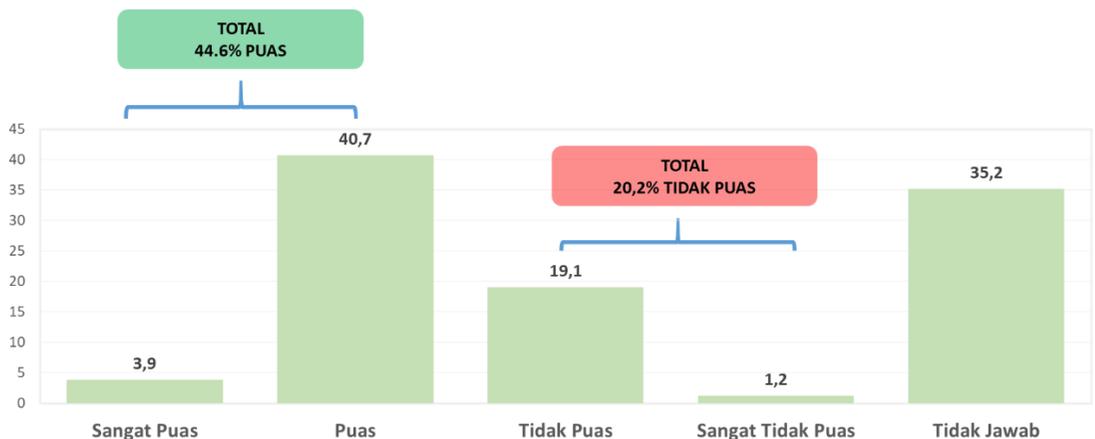
BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Evaluasi Pemerintahan

Pertanyaan pertama mengenai evaluasi pemerintahan adalah Hingga saat ini apakah anda sangat puas, puas, Tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi secara umum dan Gubernur Sulawesi Selatan saat ini secara khusus? berikut ini adalah respon masyarakat.

Grafik 4.1. Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi



Sumber: Diolah

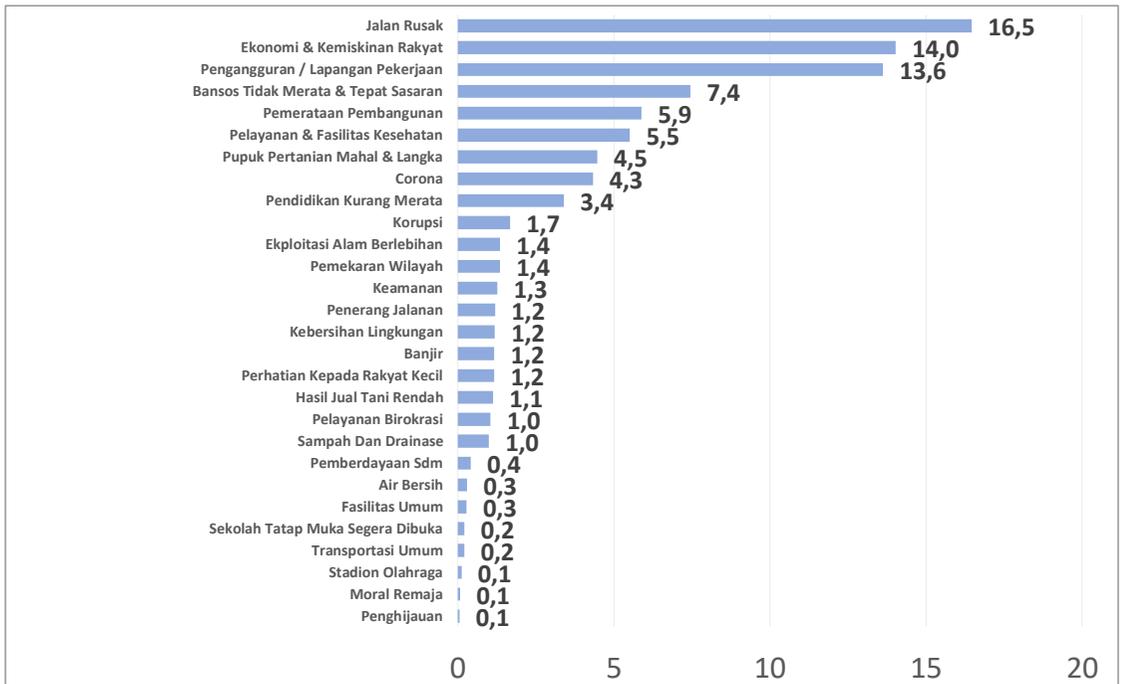
Berdasarkan hasil dari Grafik 4.1. menunjukkan bahwa masyarakat masih puas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dengan total 44,6 persen yang menyatakan puas dan 20,2 persen yang

menyatakan tidak puas. Sisanya 35,2 persen menyatakan tidak menjawab.

Angka 44,6 sebenarnya tidak terlalu menggembirakan. Kepuasan masyarakat yang baik, pada umumnya diperoleh dengan persentase diatas 65 persen. Hal ini yang menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi secara umum untuk segera berbenah dan memperbaiki kinerja disertai dengan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

Selanjutnya, responden ditanya secara terbuka mengenai masalah-masalah utama yang ada di Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah hasilnya.

Grafik 4.2. Masalah Utama di Sulawesi Selatan



Sumber: Diolah

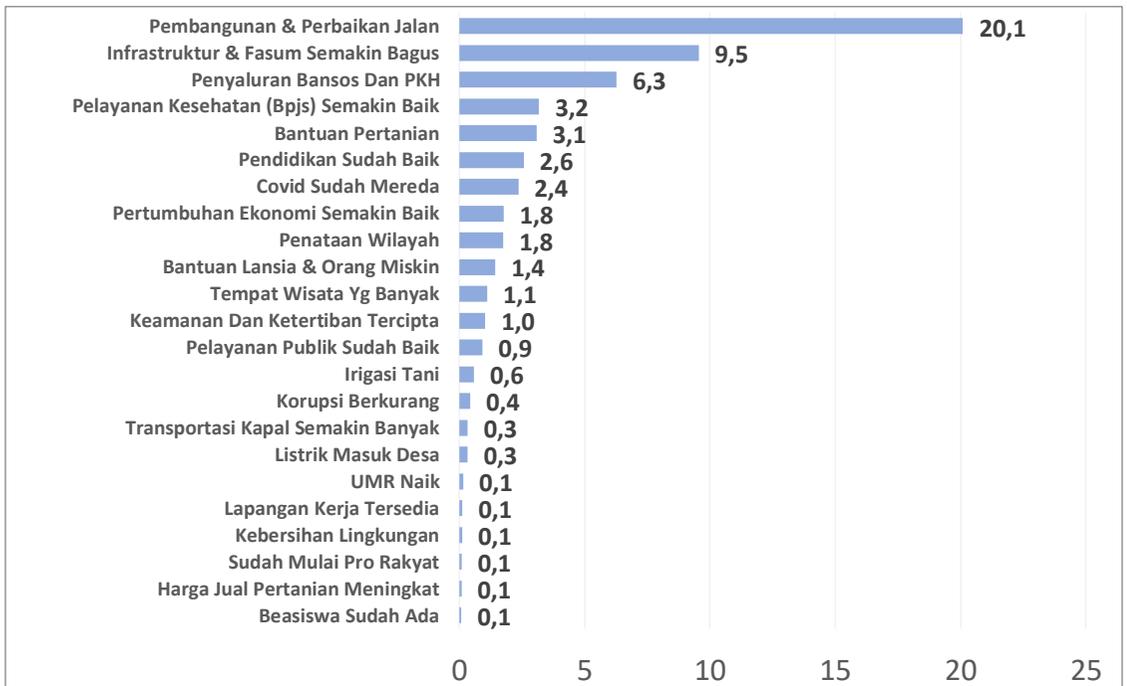
Dari pertanyaan terbuka mengenai masalah utama di Sulawesi Selatan adalah Jalan yang rusak. Sebesar 16,5 persen masyarakat menganggap bahwa infrastruktur jalan merupakan masalah utama di Sulawesi Selatan. Disusul berikutnya adalah masalah Ekonomi dan kemiskinan serta pengangguran atau lapangan pekerjaan. Permasalahan kedua dan ketiga masing-masing 14 persen dan 13,6 persen. Artinya bahwa masyarakat menilai permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang utama yang dirasakan keseharian mereka.

Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian khusus adalah permasalahan Bantuan Sosial yang dianggap oleh masyarakat tidak

merata. Sebesar 7,4 persen masyarakat Sulawesi Selatan menganggap hal ini menjadi salah satu permasalahan utama.

Selanjutnya responden ditanya secara terbuka mengenai keberhasilan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Apa saja yang dianggap berhasil oleh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.

Grafik 4.3. Keberhasilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: Diolah

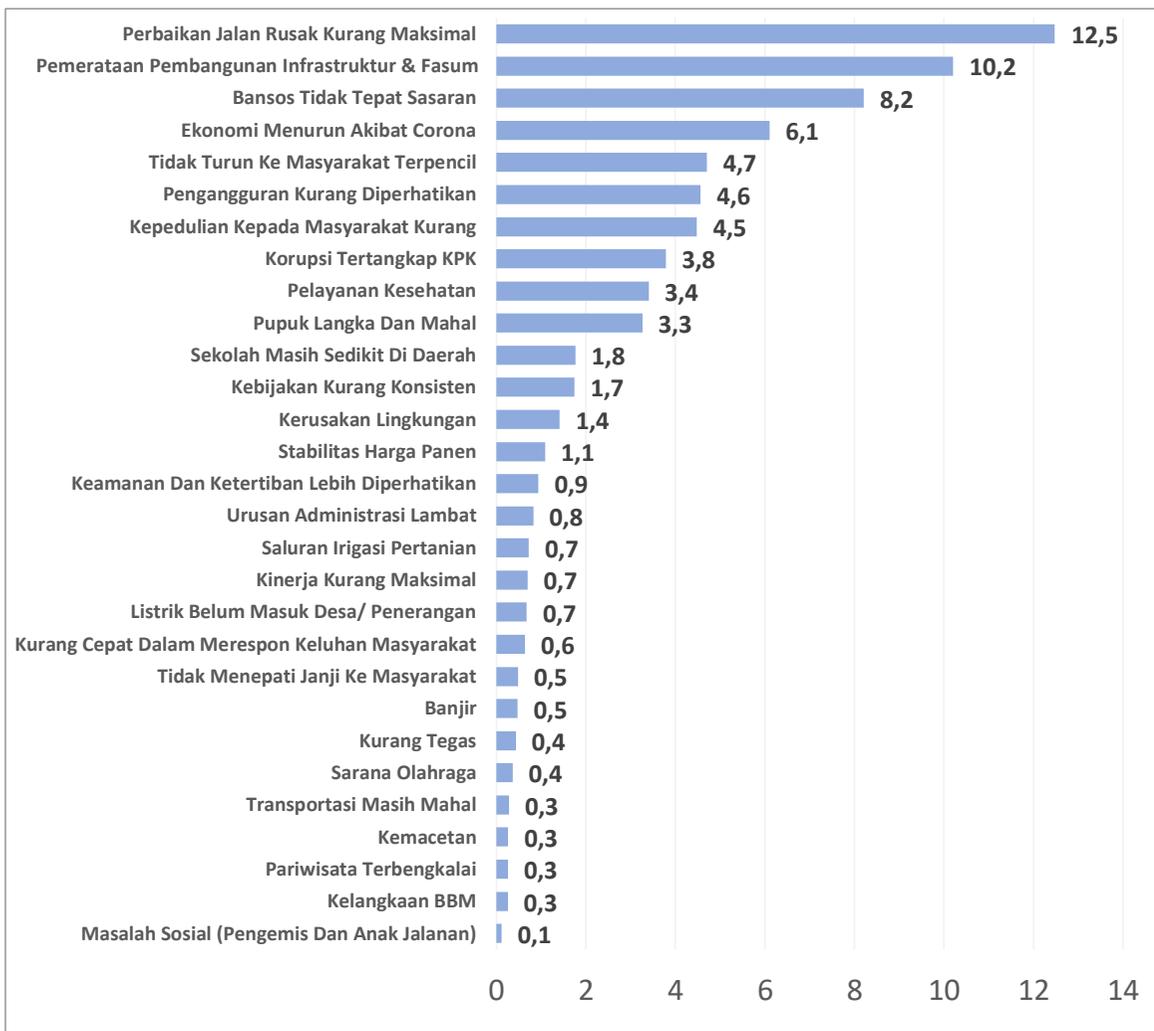
Hasil di atas menunjukkan bahwa di satu sisi infrastruktur jalan yang menjadi permasalahan utama di Sulawesi Selatan, di sisi lain masyarakat menilai bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga

berhasil dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur pembangunan dan perbaikan jalan. Sebesar 20,1 persen dan 9,5 persen responden menjawab infrastruktur jalan semakin baik.

Adapun sebanyak 6,3 persen masyarakat menjawab keberhasilan penyaluran bantuan sosial dan PKH menjadi salah satu keberhasilan dari Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, responden juga ditanya mengenai kekurangan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara terbuka. Hasilnya, infrastruktur jalan yang kurang maksimal menjadi persoalan. Masyarakat memiliki harapan yang cukup tinggi terhadap infrastruktur jalan. Meskipun sudah dibangun oleh pemerintah, masyarakat masih menganggap bahwa pemerintah masih bisa lebih maksimal dalam upaya pembangunan infrastruktur. Kekurangan selanjutnya adalah pembagian Bantuan Sosial yang tidak merata. Sekali lagi jika dilakukan dengan pertanyaan terbuka, maka terlihat bahwa masyarakat masih menganggap pembagian Bantuan Sosial masih banyak yang salah sasaran. Di satu sisi adalah keberhasilan dalam program tersebut, namun isu mengenai tidak meratanya pembagian Bantuan Sosial menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Grafik 4.4. Kekurangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber: diolah

Secara umum tingkat kepuasan Masyarakat Sulawesi Selatan dengan kinerja Pemerintah Provinsi masih rendah (44.6%). Karena umumnya pemerintah akan mampu dianggap berhasil (masyarakat puas) jika tingkat kepuasan kinerjanya berada diatas level 65%.

Karena itu menjadi penting bagi Pemerintah Provinsi untuk memenuhi ekspektasi publik akan kinerjanya dengan menyelesaikan atau minimal memperbaiki hal hal yang dianggap menjadi masalah krusial bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun 4 masalah besar yang krusial dan akan berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Ekonomi & kesejahteraan
2. Perbaikan Jalan
3. Perbaikan Fasilitas Umum
4. Pemerataan Bantuan Sosial

Karena itu penting bagi petahana pemerintah provinsi memilih fokus diantara 4 masalah utama tersebut yang memang menjadi domain dan sesuai dengan postur anggaran pemerintah provinsi.

Setelah upaya maksimal dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi maksimal terhadap capaian dan upaya yang telah dilakukan pemprov.

Dalam hasil ini, terlihat bahwa jika masyarakat diberikan pertanyaan terbuka, maka antara masalah dan keberhasilan serta kekurangan Pemerintah Provinsi terdapat isu strategis yang sama

muncul dalam persepsi masyarakat. Oleh karena itu untuk menggali lebih dalam, perlu dilakukan Importance and Performance Analysis (IPA) dalam setiap variabel-variabel yang sudah ditentukan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah hasil dari perubahan.

4.2.Importance and Performance Analysis (IPA).

Untuk dapat menyusun sebuah perencanaan strategis peningkatan kinerja yang harus dilaksanakan, maka dibutuhkan *Importance and Performance Analysis (IPA)*.

Metode *Importance Performance Analysis (IPA)* pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James 2013 (Martilla and James 2013) dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi masyarakat dan prioritas peningkatan kualitas produk/jasa. IPA dikenal pula sebagai *quadrant analysis* (Brandt, 2000 dan Latu & Everett, 2000).

IPA telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003).

IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor pelayanan yang menurut

masyarakat/pelanggan/pengguna jasa sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor pelayanan yang menurut masyarakat perlu ditingkatkan (*improvement*) karena kondisi saat ini belum memuaskan.

Pada IPA rata-rata tingkat kepentingan (*importance*) dilambangkan dengan \bar{Y} dan rata-rata tingkat kepuasan (*performance*) yang dilambangkan dengan \bar{X} akan diplotkan ke dalam kuadran *Cartesius* yang terdiri dari 4 kuadran. Keempat kuadran *Cartesius* tersebut memiliki arti sebagai berikut :

Kuadran pertama, terletak di sebelah kiri atas, yang berarti prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*).

Kuadran ini memuat indikator/atribut kepuasan masyarakat yang dianggap penting oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya kinerja indikator tersebut belum sesuai dengan harapan masyarakat. Tingkat kinerja dari indikator tersebut lebih rendah dari pada tingkat harapan masyarakat terhadap indikator tersebut. Indikator yang terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memuaskan masyarakat dan menjadi fokus perbaikan di masa yang akan datang.

Kuadran kedua, terletak disebelah kanan atas, yang berarti kinerja sudah dapat memenuhi harapan masyarakat dan berusaha terus mempertahankan kinerja tersebut.

Kuadran ini memuat indikator kepuasan masyarakat yang dianggap penting oleh masyarakat dan kinerjanya dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Indikator kepuasan masyarakat yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua indikator kepuasan ini menjadikan produk/jasa tersebut unggul dimata masyarakat.

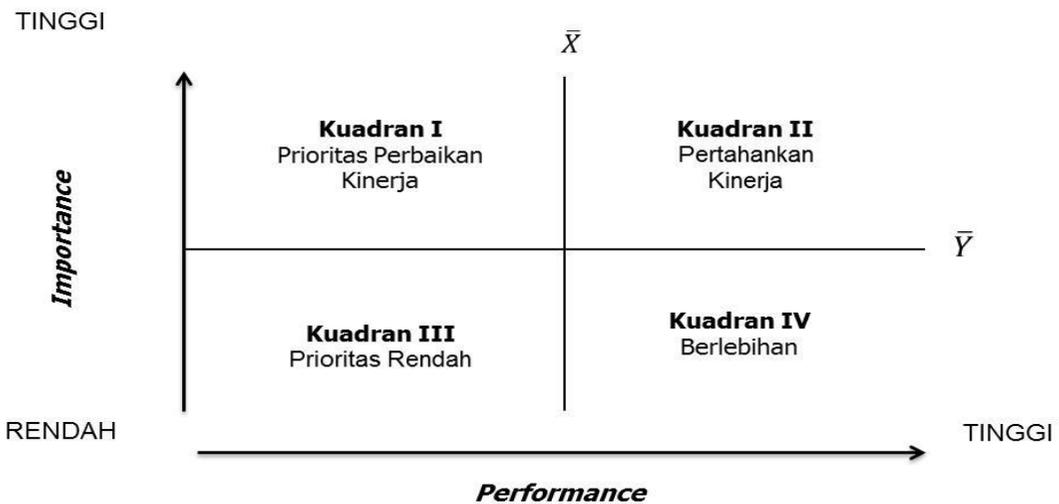
Kuadran ketiga, terletak disebelah kiri bawah, yang berarti prioritas rendah.

Kuadran ini memuat indikator kepuasan yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan pada kenyataannya kinerja indikator ini tidaklah terlalu istimewa.

Peningkatan kinerja indikator kepuasan masyarakat yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sangat kecil.

Kuadran keempat, terletak disebelah kanan bawah, yang berarti kinerja yang berlebihan sementara masyarakat menganggap kurang penting.

Kuadran ini memuat indikator kepuasan yang dianggap **kurang penting** oleh masyarakat dan dirasakan terlalu berlebihan. Indikator kepuasan masyarakat yang termasuk dalam kuadran ini dapat



dikurangi agar perusahaan dapat menghemat biaya.

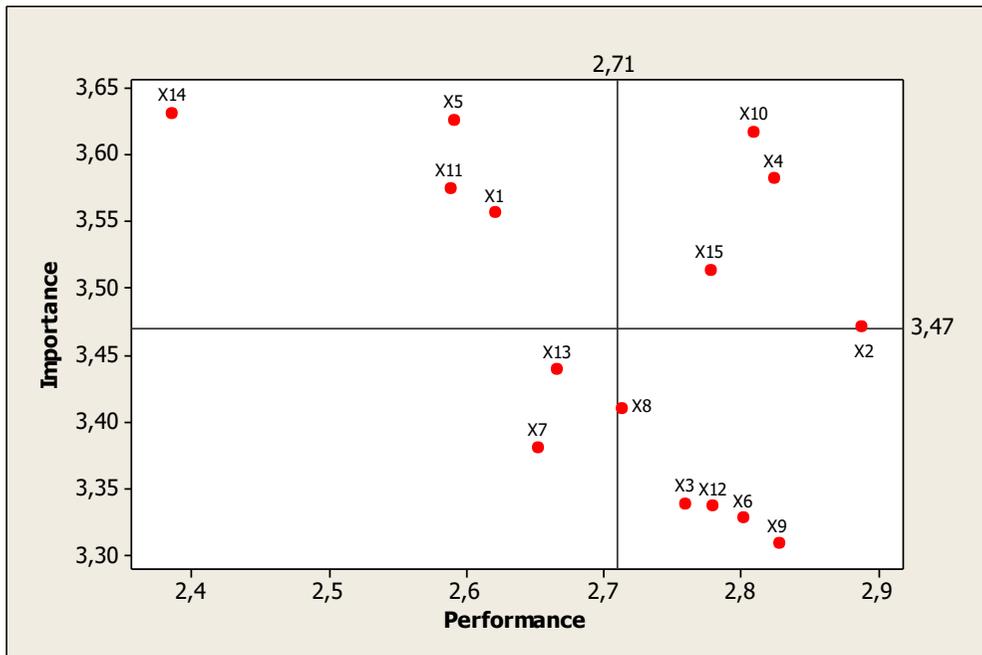
Grafik 4.5. Kuadran *Cartesius* IPA

4.3. Hasil dan Pembahasan IPA

Analisis tingkat kepentingan masyarakat dengan kinerja pelayanan (*Importance Performance Analysis*) digunakan untuk memetakan hubungan antara harapan atau tingkat kepentingan

(*importance*) dengan kepuasan atau tingkat kinerja (*performance*) dari masing-masing aspek Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Grafik 4.6. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan



sumber: Diolah

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Provinsi Sulawesi Selatan tersaji pada Grafik 4.1. adapun keterangan grafik dijelaskan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,56	2,62	Infrastruktur Jalan

Coding	Importance	Performance	Aspek
X2	3,47	2,89	Keamanan & Ketertiban
X3	3,34	2,76	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,58	2,82	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,63	2,59	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,33	2,80	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,38	2,65	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,41	2,71	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,31	2,83	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,62	2,81	Pelayanan Kesehatan
X11	3,57	2,59	Ekonomi Masyarakat
X12	3,34	2,78	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,44	2,67	Kerusakan Lingkungan
X14	3,63	2,39	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,51	2,78	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,47	2,71	

Sumber: Diolah

Berdasarkan Grafik 4.6 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 2 (dua), yaitu:

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X13= Kerusakan Lingkungan

Kuadran IV : Melebihi Harapan

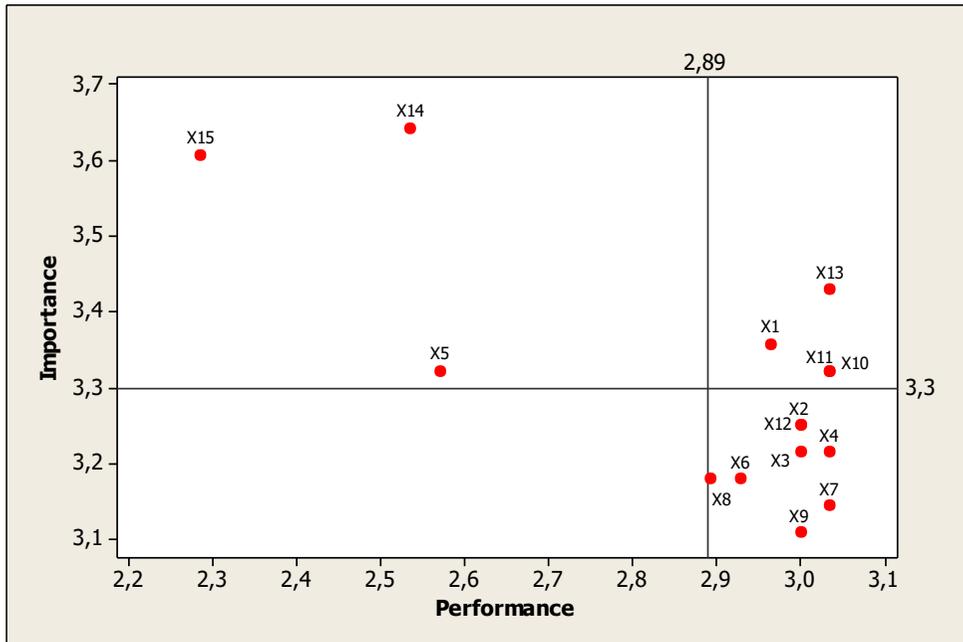
Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 6 (enam), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten

Bantaeng tersaji pada grafik berikut

Grafik 4.7. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantaeng



Sumber: Diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.2. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bantaeng

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,36	2,96	Infrastruktur Jalan
X2	3,25	3,00	Keamanan & Ketertiban
X3	3,21	3,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,21	3,04	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,32	2,57	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,18	2,93	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,14	3,04	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,18	2,89	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,11	3,00	Pengelolaan Pariwisata

Coding	Importance	Performance	Aspek
X10	3,32	3,04	Pelayanan Kesehatan
X11	3,32	3,04	Ekonomi Masyarakat
X12	3,25	3,00	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,43	3,04	Kerusakan Lingkungan
X14	3,64	2,54	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,61	2,29	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,30	2,89	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.7 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 4 (empat), yaitu:

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X13= Kerusakan Lingkungan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Tidak ada aspek yang termasuk dalam kuadran III

Kuadran IV : Melebihi Harapan

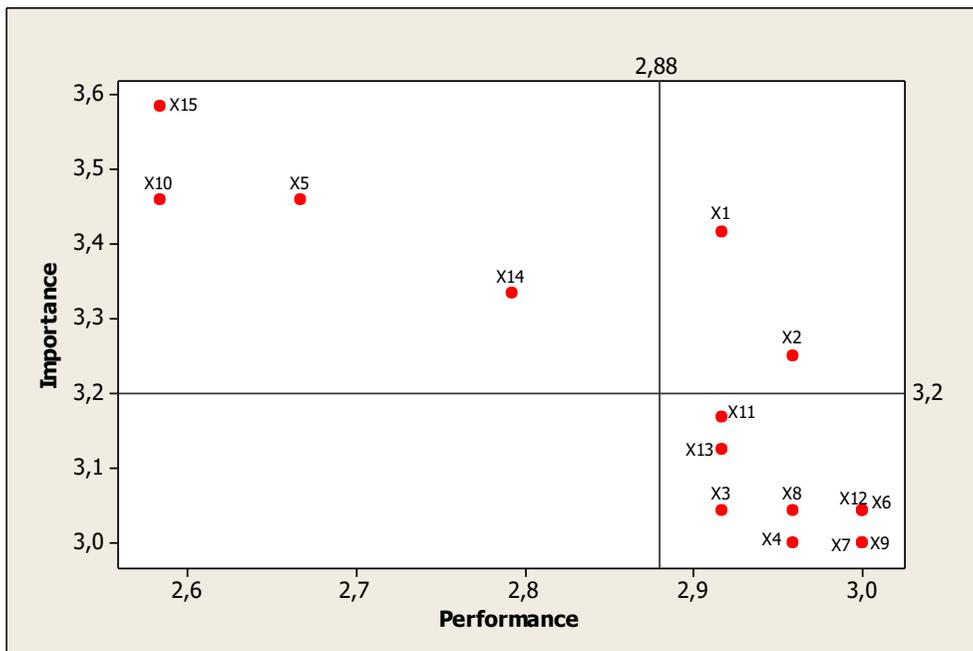
Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 8 (delapan),

yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Barru tersaji pada Grafik 4.8

Grafik 4.8. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru



sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.3. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Barru

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,42	2,92	Infrastruktur Jalan
X2	3,25	2,96	Keamanan & Ketertiban
X3	3,04	2,92	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,00	2,96	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,46	2,67	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,04	3,00	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,00	3,00	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,04	2,96	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,00	3,00	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,46	2,58	Pelayanan Kesehatan
X11	3,17	2,92	Ekonomi Masyarakat
X12	3,04	3,00	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,13	2,92	Kerusakan Lingkungan
X14	3,33	2,79	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,58	2,58	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,20	2,88	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.8 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 2 (dua), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X2 = Keamanan & Ketertiban

Kuadran III : Prioritas Rendah

Tidak ada aspek yang termasuk dalam kuadran III

Kuadran IV : Melebihi Harapan

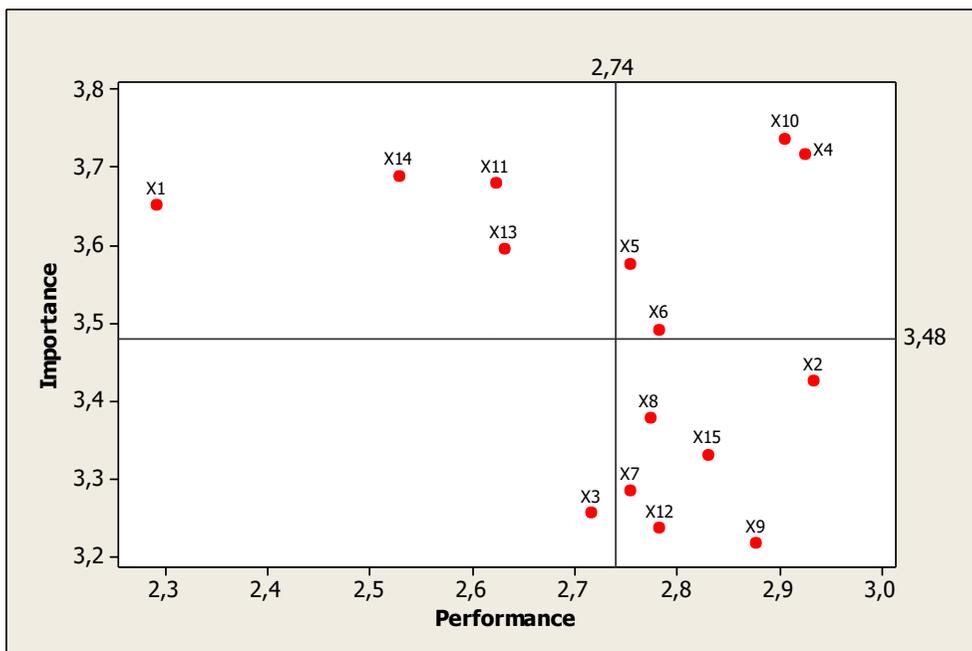
Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 9 (sembilan),
yaitu:

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten

Bone tersaji pada Grafik 4.9

Grafik 4.9. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bone



Sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.4. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bone

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,65	2,29	Infrastruktur Jalan
X2	3,42	2,93	Keamanan & Ketertiban
X3	3,25	2,72	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,72	2,92	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,58	2,75	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,49	2,78	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,28	2,75	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,38	2,77	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,22	2,88	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,74	2,91	Pelayanan Kesehatan
X11	3,68	2,62	Ekonomi Masyarakat

Coding	Importance	Performance	Aspek
X12	3,24	2,78	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,59	2,63	Kerusakan Lingkungan
X14	3,69	2,53	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,33	2,83	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,48	2,74	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.9 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X13= Kerusakan Lingkungan
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 4 (empat), yaitu:

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X10= Pelayanan Kesehatan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 1 (satu), yaitu :

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

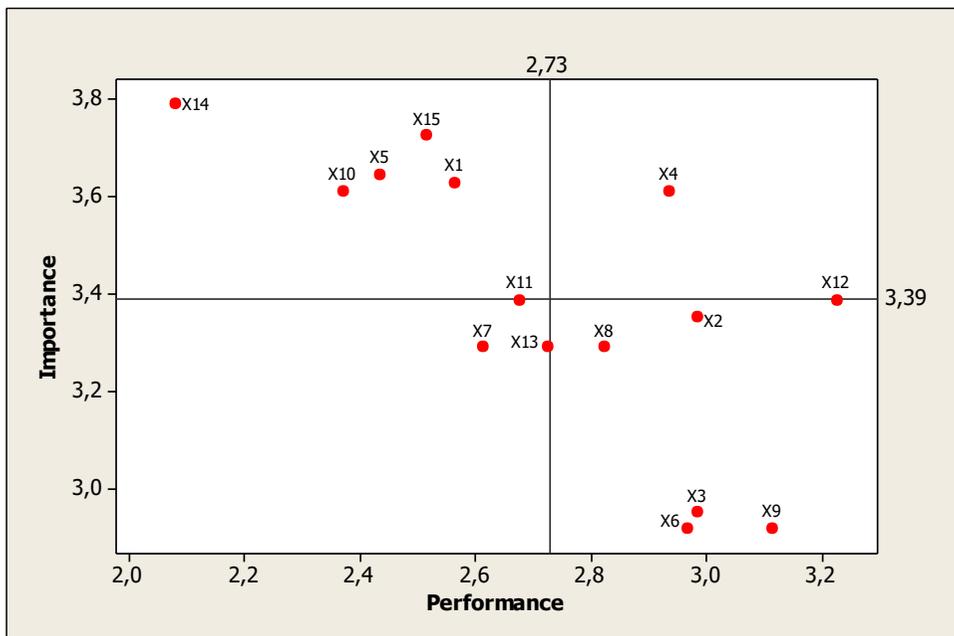
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 6 (enam), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Bulukumba tersaji pada grafik berikut

Grafik 4.10. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba



Sumber: Diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.5. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Bulukumba

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,63	2,56	Infrastruktur Jalan
X2	3,35	2,98	Keamanan & Ketertiban
X3	2,95	2,98	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,61	2,94	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,65	2,44	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	2,92	2,97	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,29	2,61	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,29	2,82	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	2,92	3,11	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,61	2,37	Pelayanan Kesehatan
X11	3,39	2,68	Ekonomi Masyarakat
X12	3,39	3,23	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,29	2,73	Kerusakan Lingkungan
X14	3,79	2,08	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,73	2,52	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,39	2,73	

Sumber: Diolah

Berdasarkan Grafik 4.10 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 6 (enam), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 2 (dua), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 2 (dua), yaitu :

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X13= Kerusakan Lingkungan

Kuadran IV : Melebihi Harapan

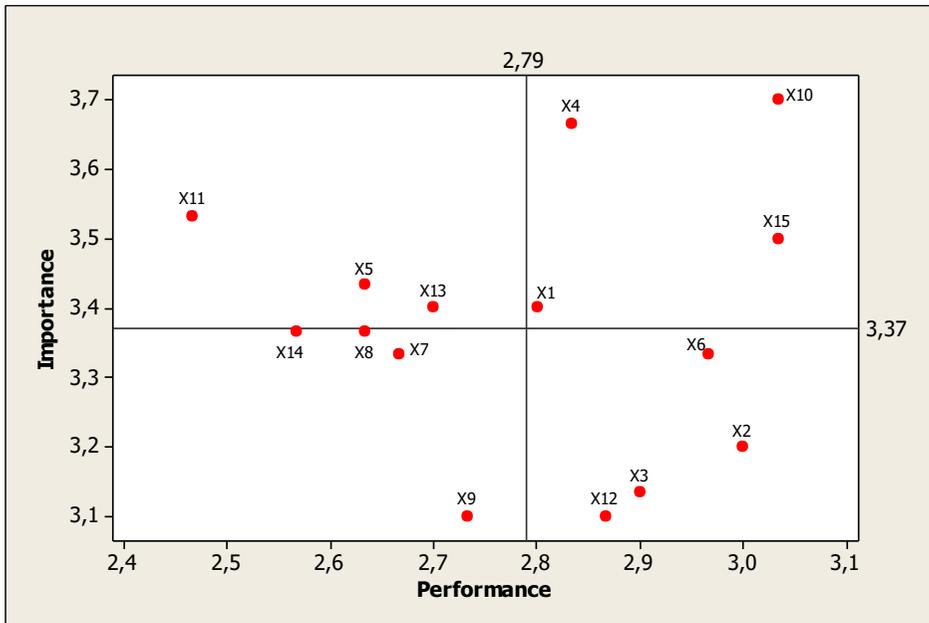
Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten

Enrekang tersaji pada Grafik 4.11

Grafik 4.11.. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Enrekang



sumber: Diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.6. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Enrekang

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,40	2,80	Infrastruktur Jalan
X2	3,20	3,00	Keamanan & Ketertiban
X3	3,13	2,90	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,67	2,83	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,43	2,63	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,33	2,97	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,33	2,67	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,37	2,63	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,10	2,73	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,70	3,03	Pelayanan Kesehatan

Coding	Importance	Performance	Aspek
X11	3,53	2,47	Ekonomi Masyarakat
X12	3,10	2,87	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,40	2,70	Kerusakan Lingkungan
X14	3,37	2,57	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,50	3,03	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,37	2,79	

Sumber: diolah

Berdasarkan Gambar 6 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X13= Kerusakan Lingkungan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 4 (empat), yaitu

:

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 4 (empat), yaitu:

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

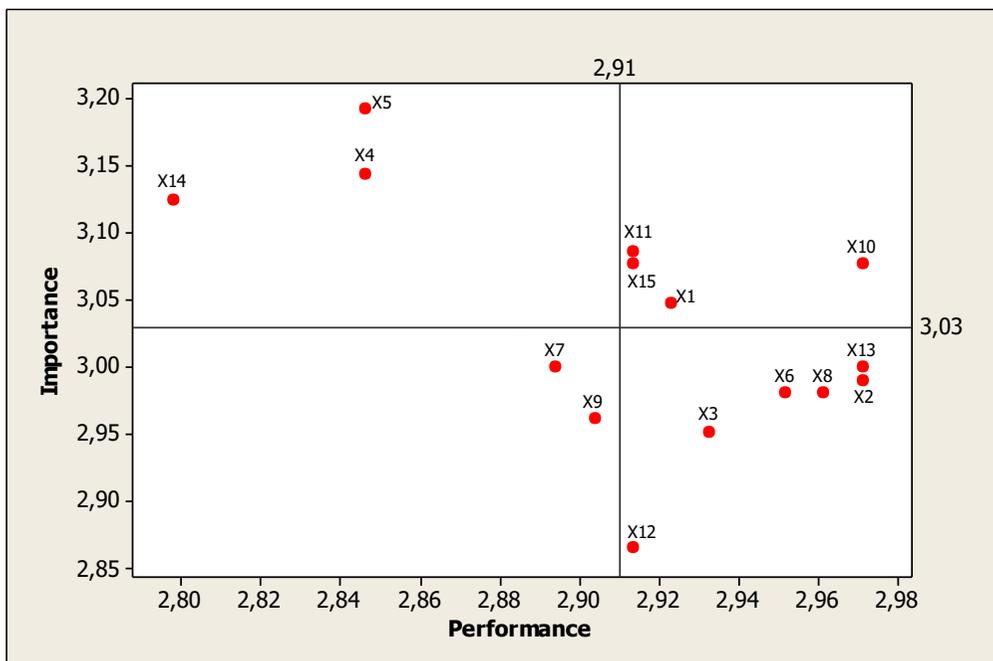
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 4 (empat), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Gowa tersaji pada grafik 4.12

Grafik 4.12. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa



Sumber: Diolah

Keterangan grafik disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.7. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gowa

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,05	2,92	Infrastruktur Jalan
X2	2,99	2,97	Keamanan & Ketertiban
X3	2,95	2,93	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,14	2,85	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,19	2,85	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	2,98	2,95	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,00	2,89	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	2,98	2,96	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	2,96	2,90	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,08	2,97	Pelayanan Kesehatan
X11	3,09	2,91	Ekonomi Masyarakat
X12	2,87	2,91	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,00	2,97	Kerusakan Lingkungan
X14	3,13	2,80	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,08	2,91	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,03	2,91	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT

- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 4 (empat), yaitu

:

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 2 (dua), yaitu :

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X9 = Pengelolaan Pariwisata

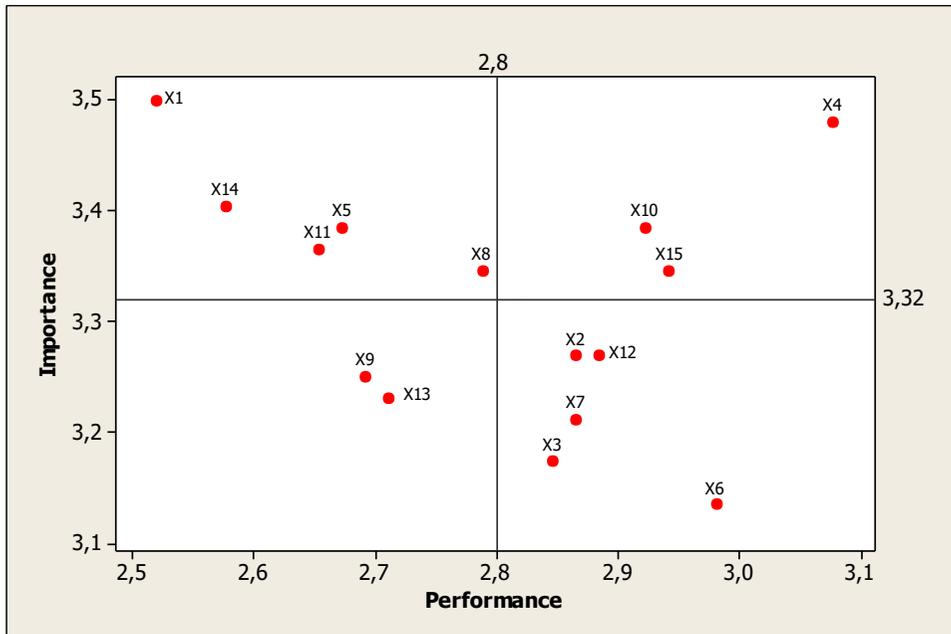
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 6 (enam), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Jeneponto tersaji pada grafik 4.13

Grafik 4.13 Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jeneponto



Sumber: diolah

Keterangan grafik disajikan dalam tabel berikut

Tabel 4.8. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jeneponto

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,50	2,52	Infrastruktur Jalan
X2	3,27	2,87	Keamanan & Ketertiban
X3	3,17	2,85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,48	3,08	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,38	2,67	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,13	2,98	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,21	2,87	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,35	2,79	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,25	2,69	Pengelolaan Pariwisata

Coding	Importance	Performance	Aspek
X10	3,38	2,92	Pelayanan Kesehatan
X11	3,37	2,65	Ekonomi Masyarakat
X12	3,27	2,88	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,23	2,71	Kerusakan Lingkungan
X14	3,40	2,58	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,35	2,94	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,32	2,80	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.13 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 5 (lima), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 2 (dua), yaitu :

- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X13= Kerusakan Lingkungan

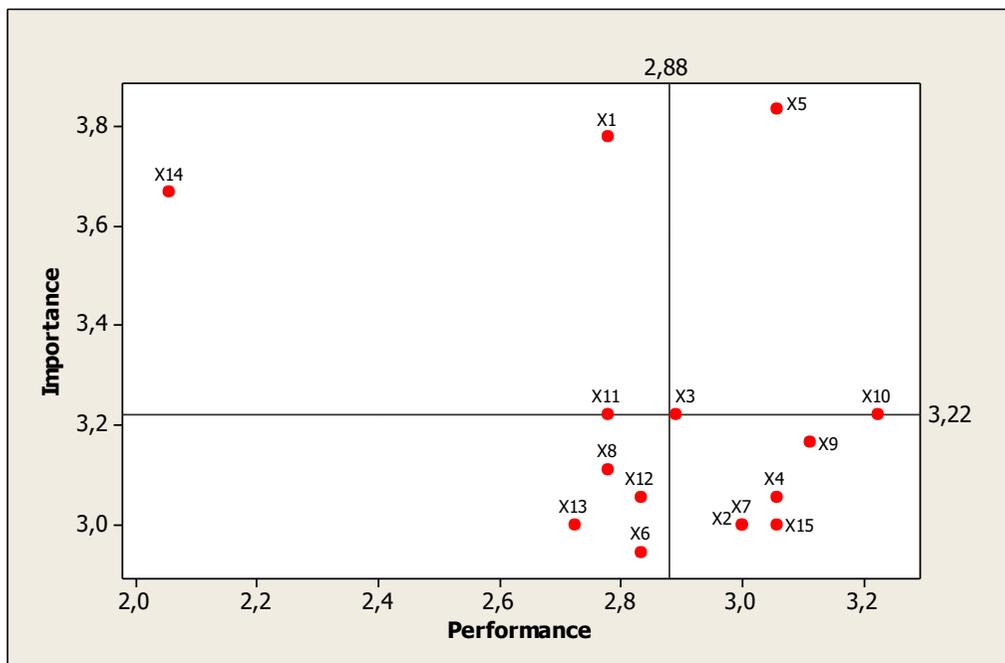
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Kepulauan Selayar tersaji pada Grafik 4.14

Grafik 4.14. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kepulauan Selayar



sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.9. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,78	2,78	Infrastruktur Jalan
X2	3,00	3,00	Keamanan & Ketertiban
X3	3,22	2,89	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,06	3,06	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,83	3,06	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	2,94	2,83	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,00	3,00	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,11	2,78	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,17	3,11	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,22	3,22	Pelayanan Kesehatan
X11	3,22	2,78	Ekonomi Masyarakat
X12	3,06	2,83	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,00	2,72	Kerusakan Lingkungan
X14	3,67	2,06	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,00	3,06	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,22	2,88	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.14 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X11= Ekonomi Masyarakat

- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X10= Pelayanan Kesehatan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 4 (empat), yaitu

:

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

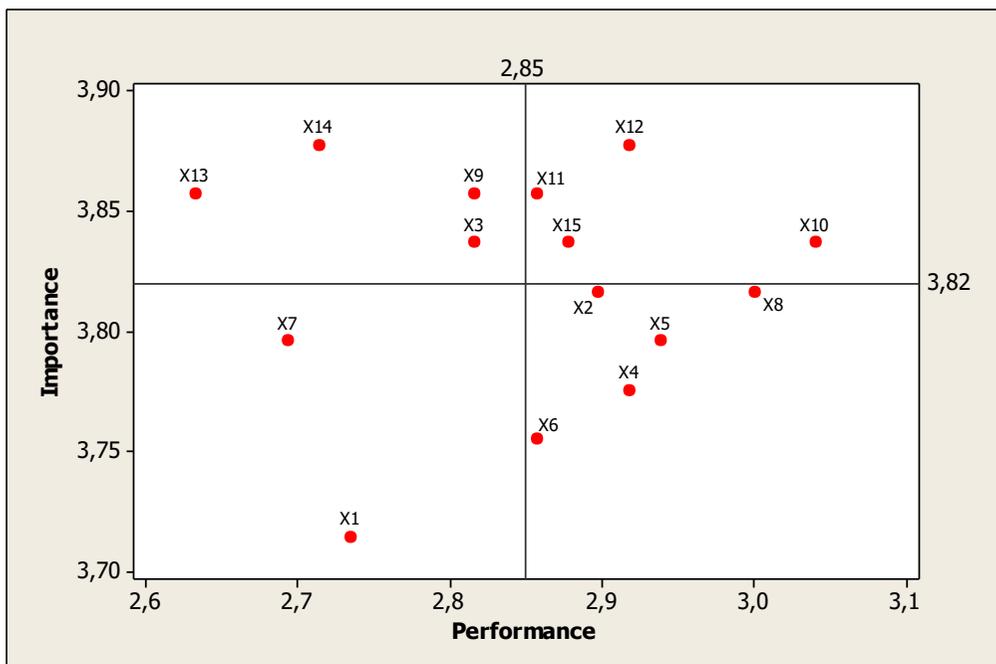
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Luwu tersaji pada Grafik 4.15.

Grafik 4.15. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu



sumber: Diolah

Keterangan grafik di atas dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.10. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,71	2,73	Infrastruktur Jalan
X2	3,82	2,90	Keamanan & Ketertiban
X3	3,84	2,82	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,78	2,92	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,80	2,94	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,76	2,86	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,80	2,69	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,82	3,00	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,86	2,82	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,84	3,04	Pelayanan Kesehatan
X11	3,86	2,86	Ekonomi Masyarakat

Coding	Importance	Performance	Aspek
X12	3,88	2,92	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,86	2,63	Kerusakan Lingkungan
X14	3,88	2,71	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,84	2,88	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,82	2,85	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.15 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X13= Kerusakan Lingkungan
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 4 (empat), yaitu:

- X10= Pelayanan Kesehatan
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 2 (dua), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll

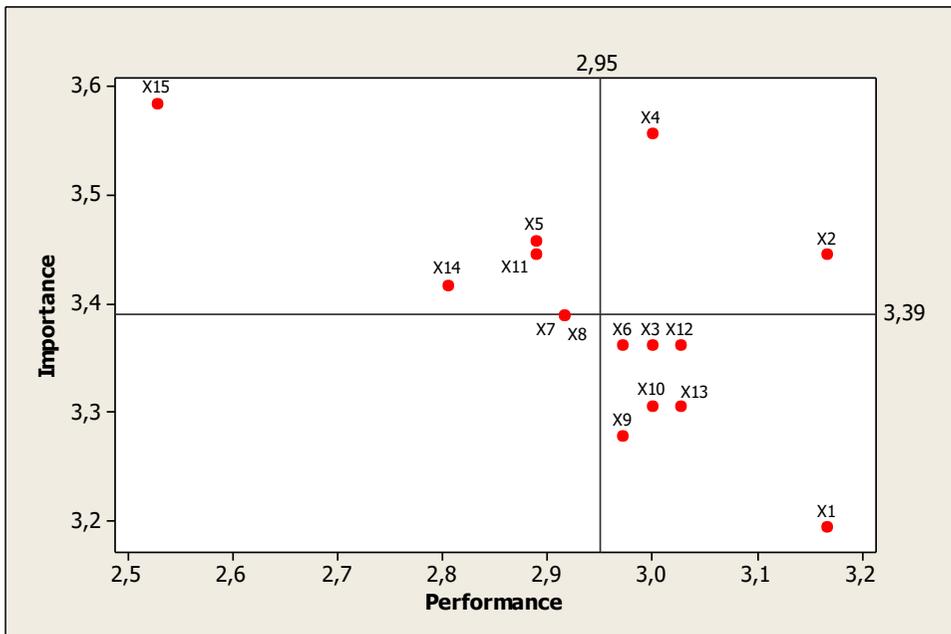
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Luwu Timur tersaji pada Grafik 4.16.

Grafik 4.16. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Luwu Timur



sumber: diolah

Keterangan grafik di atas akan dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.11. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,19	3,17	Infrastruktur Jalan
X2	3,44	3,17	Keamanan & Ketertiban
X3	3,36	3,00	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,56	3,00	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,46	2,89	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,36	2,97	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,39	2,92	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,39	2,92	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,28	2,97	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,31	3,00	Pelayanan Kesehatan
X11	3,44	2,89	Ekonomi Masyarakat
X12	3,36	3,03	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,31	3,03	Kerusakan Lingkungan
X14	3,42	2,81	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,58	2,53	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,39	2,95	

Sumber: Diolah

Berdasarkan grafik 4.16 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 2 (dua), yaitu :

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 2 (dua), yaitu :

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa

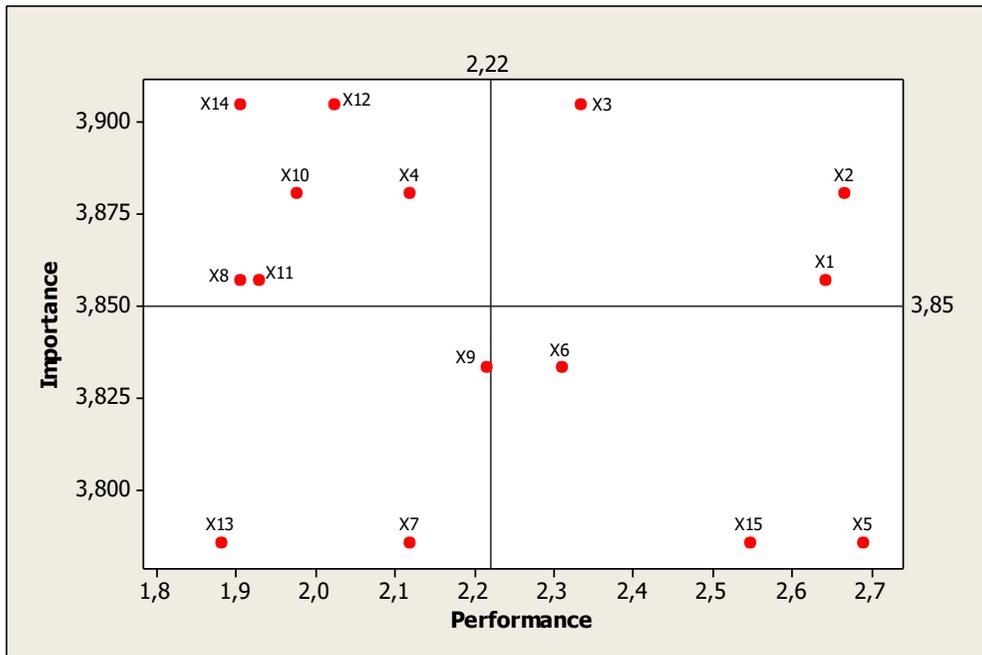
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 7 (tujuh), yaitu:

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Luwu Utara tersaji pada Grafik 4.17

Grafik 4.17. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara



Sumber: Diolah

Tabel 4.12. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,86	2,64	Infrastruktur Jalan
X2	3,88	2,67	Keamanan & Ketertiban
X3	3,90	2,33	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,88	2,12	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,79	2,69	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,83	2,31	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,79	2,12	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,86	1,90	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,83	2,21	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,88	1,98	Pelayanan Kesehatan
X11	3,86	1,93	Ekonomi Masyarakat

Coding	Importance	Performance	Aspek
X12	3,90	2,02	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,79	1,88	Kerusakan Lingkungan
X14	3,90	1,90	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,79	2,55	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,85	2,22	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 6 (enam), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X9 = Pengelolaan Pariwisata

- X13= Kerusakan Lingkungan

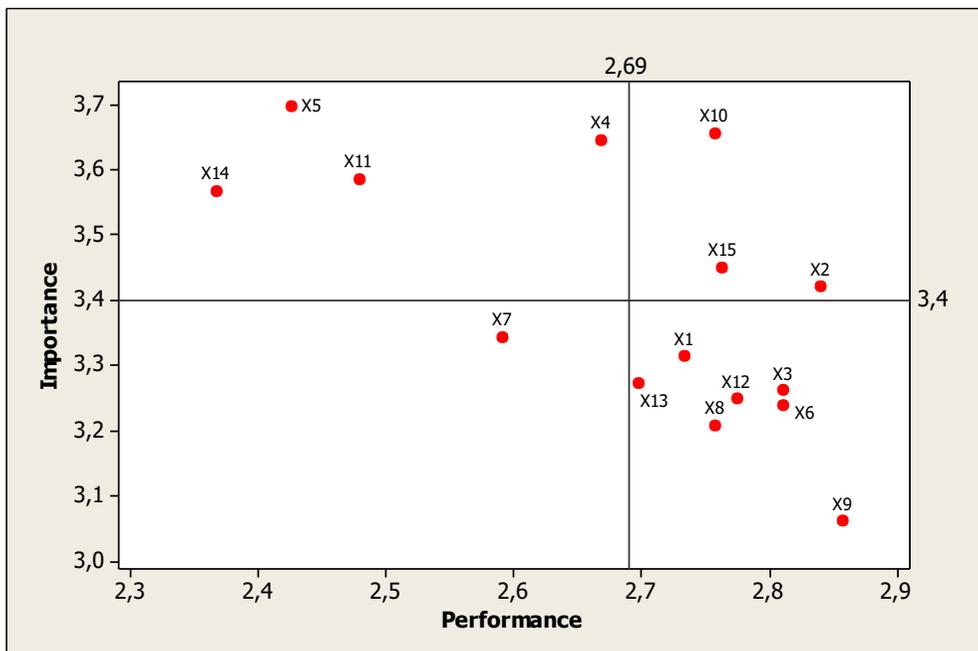
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 3 (tiga), yaitu:

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kota Makassar tersaji pada Grafik 4.18

Grafik 4.18. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Makassar



Sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.13. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Makassar

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,31	2,73	Infrastruktur Jalan
X2	3,42	2,84	Keamanan & Ketertiban
X3	3,26	2,81	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,64	2,67	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,70	2,43	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,24	2,81	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,34	2,59	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,21	2,76	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,06	2,86	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,66	2,76	Pelayanan Kesehatan
X11	3,59	2,48	Ekonomi Masyarakat
X12	3,25	2,78	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,27	2,70	Kerusakan Lingkungan
X14	3,57	2,37	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,45	2,76	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,40	2,69	

Sumber: Diolah

Berdasarkan Grafik 4.18 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 1 (satu), yaitu :

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll

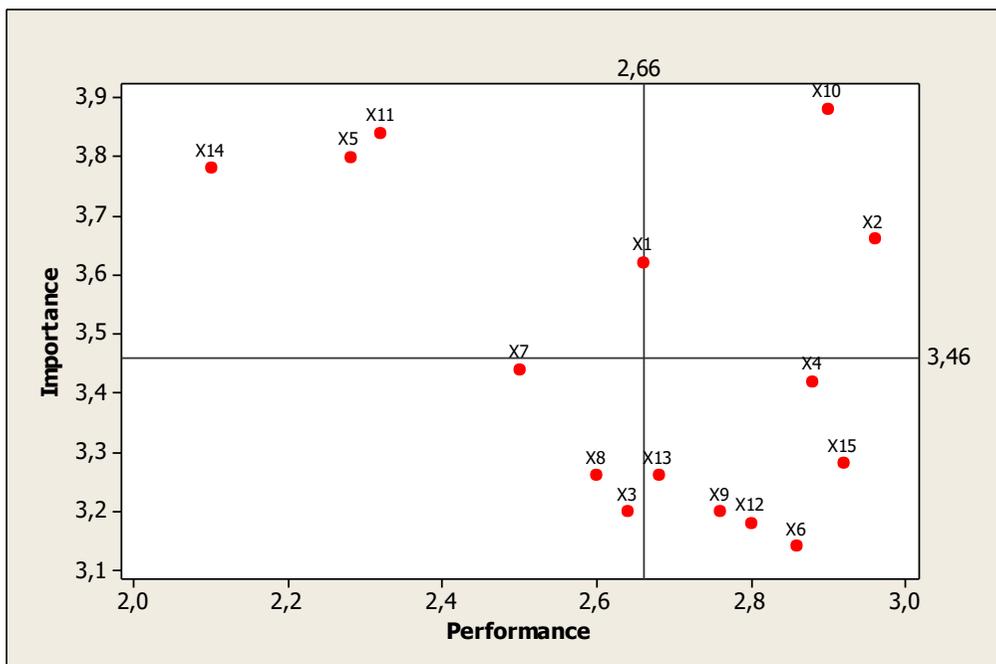
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 7 (tujuh), yaitu:

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Maros tersaji pada grafik 4.19.

Grafik 4.19. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Maros



Sumber: Diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.14. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Maros

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,62	2,66	Infrastruktur Jalan
X2	3,66	2,96	Keamanan & Ketertiban
X3	3,20	2,64	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,42	2,88	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,80	2,28	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,14	2,86	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,44	2,50	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,26	2,60	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,20	2,76	Pengelolaan Pariwisata

Coding	Importance	Performance	Aspek
X10	3,88	2,90	Pelayanan Kesehatan
X11	3,84	2,32	Ekonomi Masyarakat
X12	3,18	2,80	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,26	2,68	Kerusakan Lingkungan
X14	3,78	2,10	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,28	2,92	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,46	2,66	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.19 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X10= Pelayanan Kesehatan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa

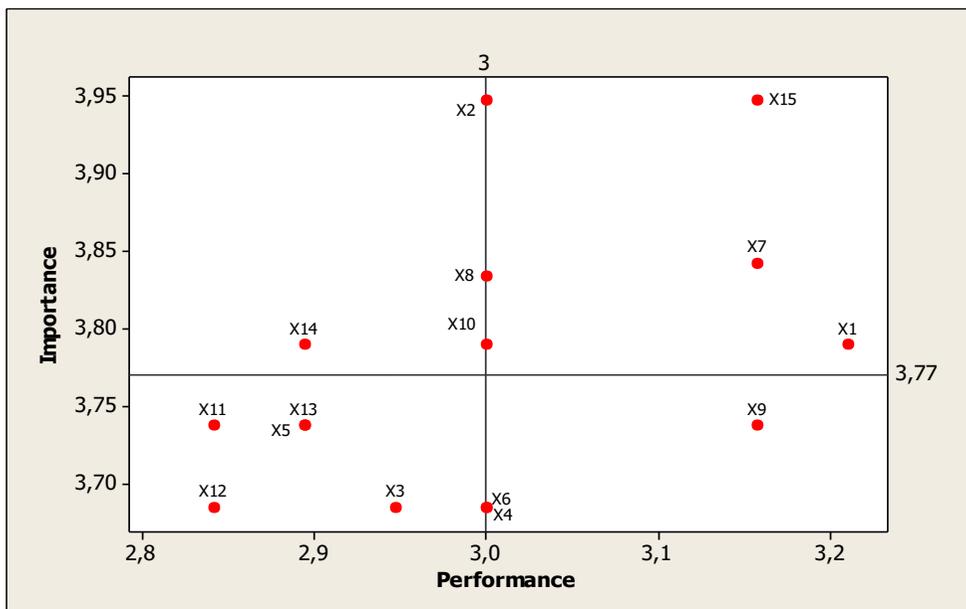
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 6 (enam), yaitu:

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kota Palopo tersaji pada Gambar 15.

Grafik 4.20. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Palopo



Sumber: Diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.15. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Palopo

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,79	3,21	Infrastruktur Jalan
X2	3,95	3,00	Keamanan & Ketertiban
X3	3,68	2,95	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,68	3,00	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,74	2,89	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,68	3,00	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,84	3,16	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,83	3,00	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,74	3,16	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,79	3,00	Pelayanan Kesehatan
X11	3,74	2,84	Ekonomi Masyarakat
X12	3,68	2,84	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,74	2,89	Kerusakan Lingkungan
X14	3,79	2,89	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,95	3,16	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,77	3,00	

Sumber: diolah

Berdasarkan Gambar 15 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X10= Pelayanan Kesehatan

- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 5 (lima), yaitu :

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

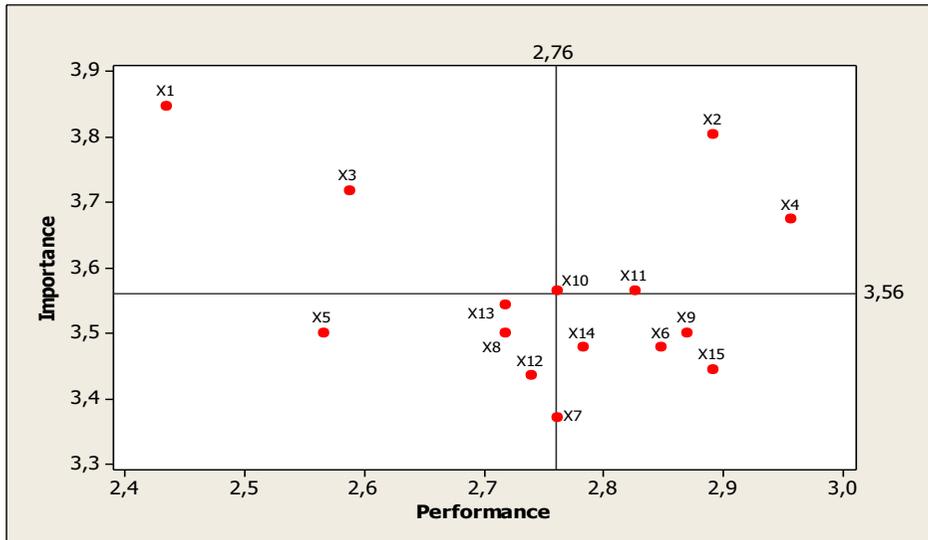
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 3 (tiga), yaitu:

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X9 = Pengelolaan Pariwisata

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tersaji pada Grafik 4.21

Grafik 4.21 Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan



Sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 4.16. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,85	2,43	Infrastruktur Jalan
X2	3,80	2,89	Keamanan & Ketertiban
X3	3,72	2,59	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,67	2,96	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,50	2,57	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,48	2,85	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,37	2,76	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,50	2,72	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,50	2,87	Pengelolaan Pariwisata

Coding	Importance	Performance	Aspek
X10	3,57	2,76	Pelayanan Kesehatan
X11	3,57	2,83	Ekonomi Masyarakat
X12	3,43	2,74	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,54	2,72	Kerusakan Lingkungan
X14	3,48	2,78	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,44	2,89	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,56	2,76	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.21 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 2 (dua), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 4 (empat), yaitu

:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X11= Ekonomi Masyarakat

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 4 (empat), yaitu

:

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

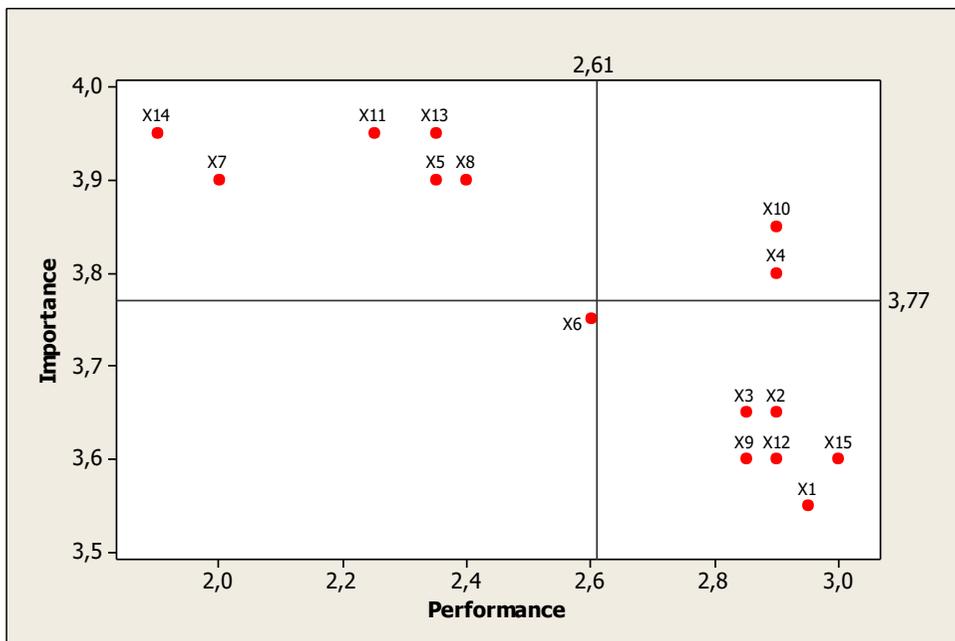
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kota Parepare tersaji pada Grafik 4.22

Grafik 4.22. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Parepare



Sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.17. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kota Parepare

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,55	2,95	Infrastruktur Jalan
X2	3,65	2,90	Keamanan & Ketertiban
X3	3,65	2,85	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,80	2,90	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,90	2,35	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,75	2,60	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,90	2,00	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,90	2,40	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,60	2,85	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,85	2,90	Pelayanan Kesehatan
X11	3,95	2,25	Ekonomi Masyarakat
X12	3,60	2,90	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,95	2,35	Kerusakan Lingkungan
X14	3,95	1,90	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,60	3,00	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,77	2,61	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.22 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 6 (enam), yaitu :

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X13= Kerusakan Lingkungan
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 2 (dua), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X10= Pelayanan Kesehatan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 1 (satu), yaitu :

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi

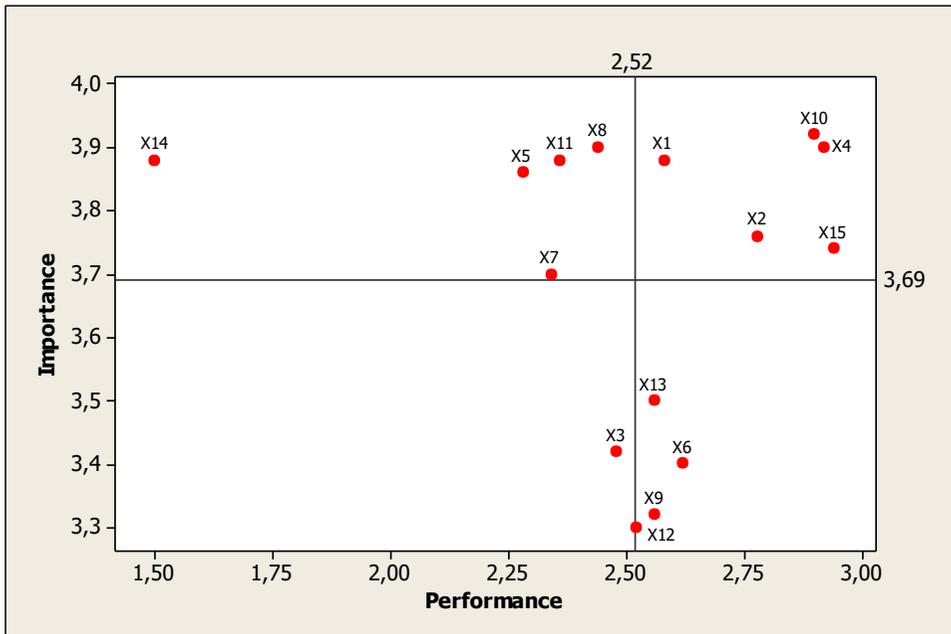
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 5 (lima), yaitu:

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Pinrang tersaji pada Grafik 4.23

Grafik 4.23. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pinrang



sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.18. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Pinrang

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,88	2,58	Infrastruktur Jalan
X2	3,76	2,78	Keamanan & Ketertiban
X3	3,42	2,48	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,90	2,92	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,86	2,28	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,40	2,62	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,70	2,34	Sosial Seperti Pengemis, Anak

Coding	Importance	Performance	Aspek
			Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,90	2,44	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,32	2,56	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,92	2,90	Pelayanan Kesehatan
X11	3,88	2,36	Ekonomi Masyarakat
X12	3,30	2,52	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,50	2,56	Kerusakan Lingkungan
X14	3,88	1,50	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,74	2,94	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,69	2,52	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.23 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 5 (lima), yaitu :

- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 5 (lima), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 1 (satu), yaitu :

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

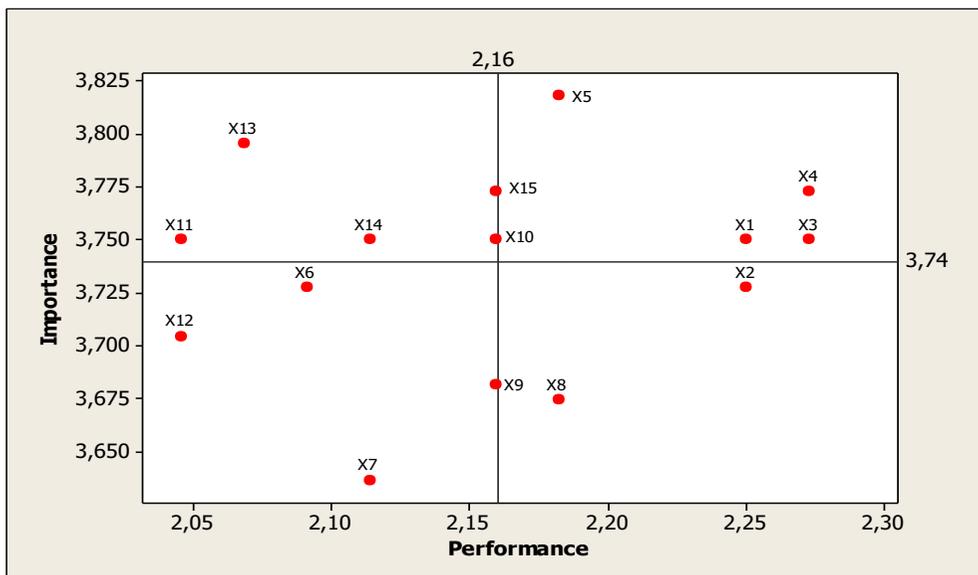
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 4 (empat), yaitu:

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Sidenreng Rappang tersaji pada Grafik 4.24.

Grafik 4.24. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Sidenreng Rappang



Sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.19. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,75	2,25	Infrastruktur Jalan
X2	3,73	2,25	Keamanan & Ketertiban
X3	3,75	2,27	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,77	2,27	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,82	2,18	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,73	2,09	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,64	2,11	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,67	2,18	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,68	2,16	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,75	2,16	Pelayanan Kesehatan
X11	3,75	2,05	Ekonomi Masyarakat
X12	3,70	2,05	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,80	2,07	Kerusakan Lingkungan
X14	3,75	2,11	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,77	2,16	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,74	2,16	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.24 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X11= Ekonomi Masyarakat
- X13= Kerusakan Lingkungan
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 6 (enam), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

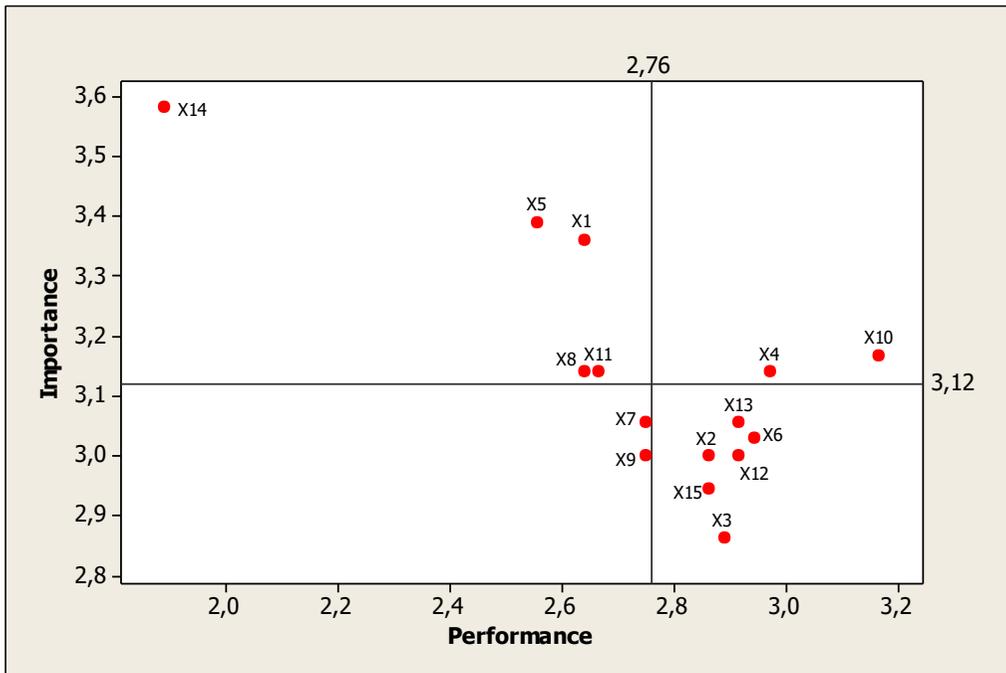
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 3 (tiga), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Sinjai tersaji pada grafik 4.25

Grafik 4.25. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sinjai



Sumber: diolah

Tabel 4.20. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Sinjai

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,36	2,64	Infrastruktur Jalan
X2	3,00	2,86	Keamanan & Ketertiban
X3	2,86	2,89	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,14	2,97	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,39	2,56	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,03	2,94	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,06	2,75	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,14	2,64	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,00	2,75	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,17	3,17	Pelayanan Kesehatan
X11	3,14	2,67	Ekonomi Masyarakat

Coding	Importance	Performance	Aspek
X12	3,00	2,92	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,06	2,92	Kerusakan Lingkungan
X14	3,58	1,89	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	2,94	2,86	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,12	2,76	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.25 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 5 (lima), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 2 (dua), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X10= Pelayanan Kesehatan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 2 (dua), yaitu :

- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X9 = Pengelolaan Pariwisata

Kuadran IV : Melebihi Harapan

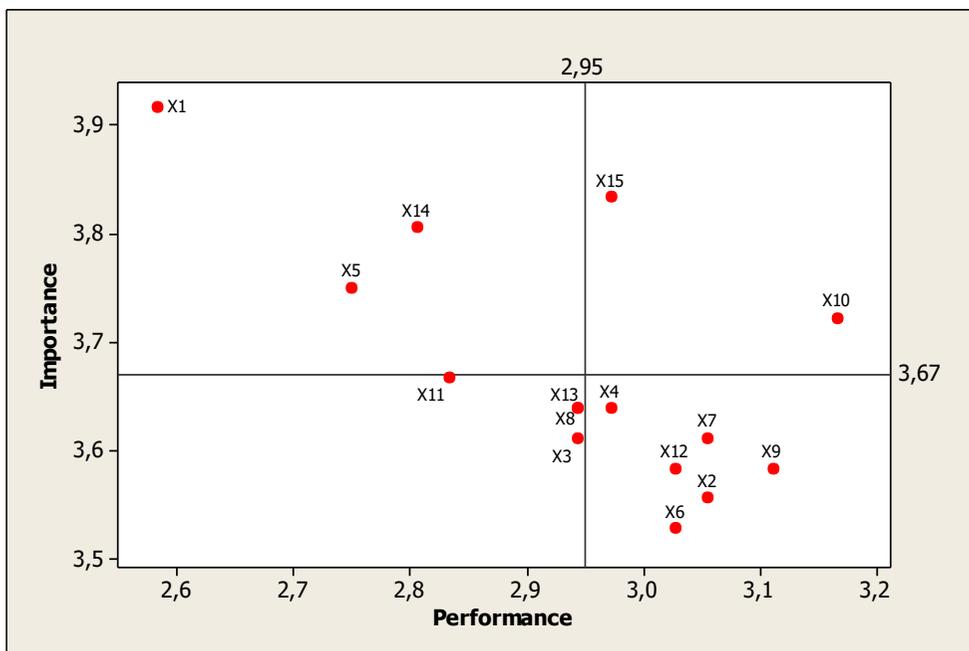
Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 6 (enam), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Soppeng tersaji pada grafik 4.26

Grafik 4.26. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng



sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.21. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Soppeng

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,92	2,58	Infrastruktur Jalan

Coding	Importance	Performance	Aspek
X2	3,56	3,06	Keamanan & Ketertiban
X3	3,61	2,94	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,64	2,97	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,75	2,75	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,53	3,03	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,61	3,06	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,64	2,94	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,58	3,11	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,72	3,17	Pelayanan Kesehatan
X11	3,67	2,83	Ekonomi Masyarakat
X12	3,58	3,03	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,64	2,94	Kerusakan Lingkungan
X14	3,81	2,81	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,83	2,97	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,67	2,95	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.26. dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 3 (tiga), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 2 (dua), yaitu :

- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 4 (empat), yaitu

:

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X13= Kerusakan Lingkungan

Kuadran IV : Melebihi Harapan

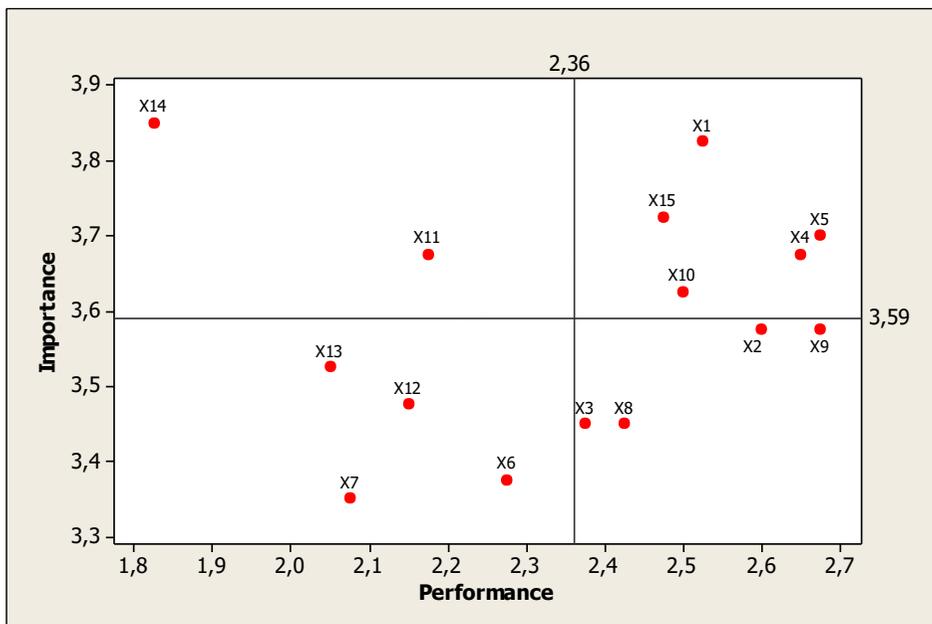
Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 6 (enam), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten

Takalar tersaji pada grafik 4.27

Grafik 4.27. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Takalar



Sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.22. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Takalar

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,83	2,53	Infrastruktur Jalan
X2	3,58	2,60	Keamanan & Ketertiban
X3	3,45	2,38	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,68	2,65	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,70	2,68	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,38	2,28	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,35	2,08	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,45	2,43	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,58	2,68	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,63	2,50	Pelayanan Kesehatan

Coding	Importance	Performance	Aspek
X11	3,68	2,18	Ekonomi Masyarakat
X12	3,48	2,15	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,53	2,05	Kerusakan Lingkungan
X14	3,85	1,83	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,73	2,48	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,59	2,36	

Sumber: diolah

Berdasarkan Grafik 4.27 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 2 (dua), yaitu :

- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 5 (lima), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 4 (empat), yaitu :

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X13= Kerusakan Lingkungan

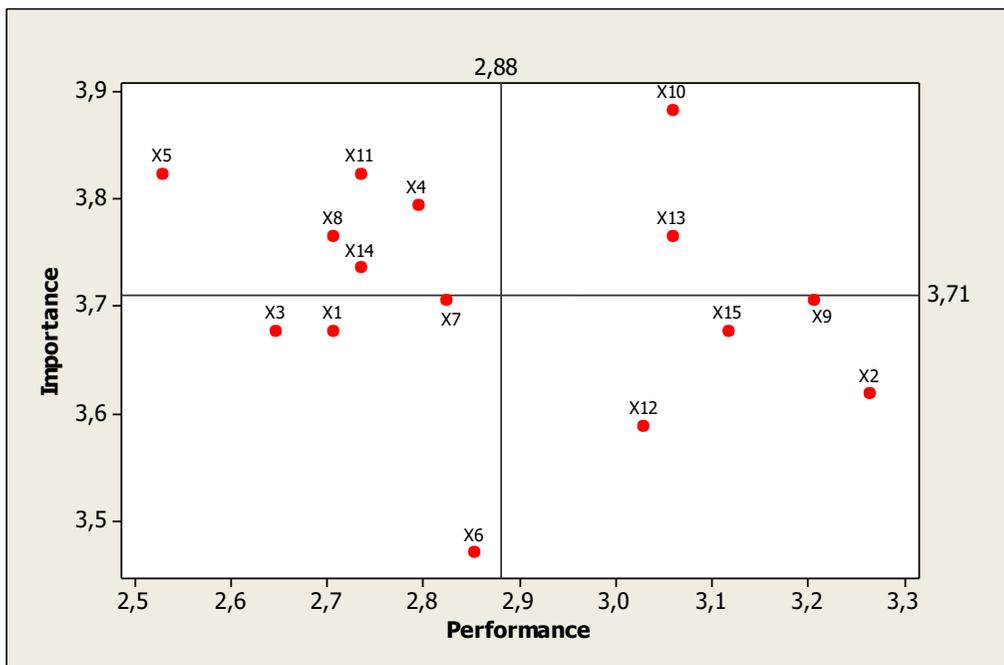
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 6 (enam), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X9 = Pengelolaan Pariwisata

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Tana Toraja tersaji pada grafik 4.28.

Grafik 4.28. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja



Sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.23. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,68	2,71	Infrastruktur Jalan
X2	3,62	3,26	Keamanan & Ketertiban
X3	3,68	2,65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,79	2,79	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,82	2,53	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,47	2,85	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,71	2,82	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,76	2,71	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,71	3,21	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,88	3,06	Pelayanan Kesehatan
X11	3,82	2,74	Ekonomi Masyarakat
X12	3,59	3,03	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,76	3,06	Kerusakan Lingkungan
X14	3,74	2,74	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,68	3,12	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,71	2,88	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.28 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 5 (lima), yaitu :

- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 2 (dua), yaitu :

- X10= Pelayanan Kesehatan
- X13= Kerusakan Lingkungan

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 4 (empat), yaitu

:

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll

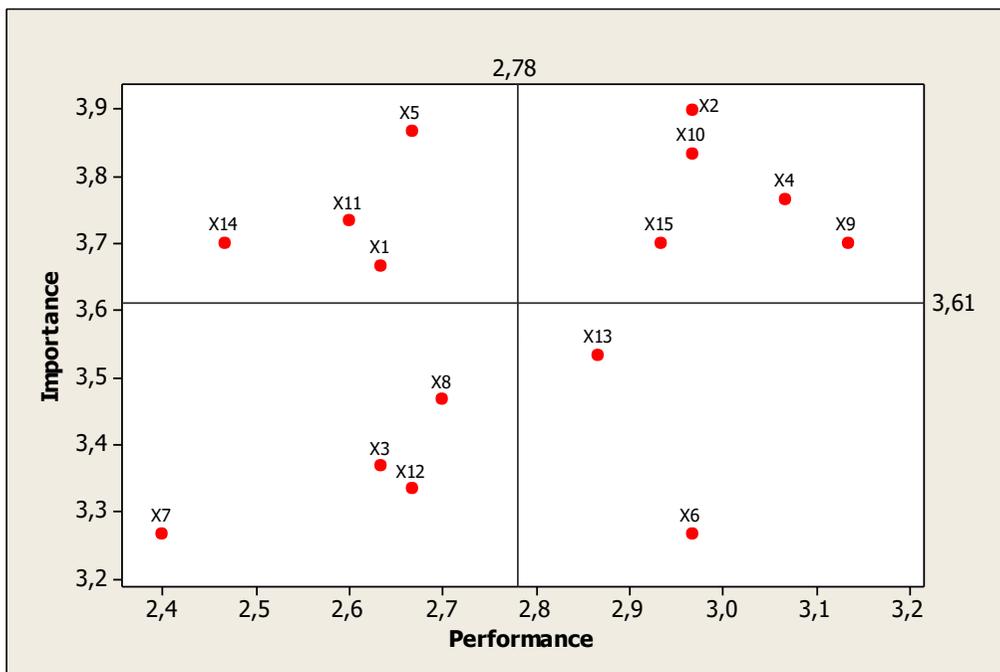
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 4 (empat), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Toraja Utara tersaji pada Grafik 4.29.

Grafik 4.29. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Toraja Utara



sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.24. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Toraja Utara

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,67	2,63	Infrastruktur Jalan
X2	3,90	2,97	Keamanan & Ketertiban
X3	3,37	2,63	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,77	3,07	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,87	2,67	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,27	2,97	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,27	2,40	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,47	2,70	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,70	3,13	Pengelolaan Pariwisata

Coding	Importance	Performance	Aspek
X10	3,83	2,97	Pelayanan Kesehatan
X11	3,73	2,60	Ekonomi Masyarakat
X12	3,33	2,67	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,53	2,87	Kerusakan Lingkungan
X14	3,70	2,47	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,70	2,93	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,61	2,78	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.29 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 4 (empat), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 5 (lima), yaitu :

- X2 = Keamanan & Ketertiban
- X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
- X9 = Pengelolaan Pariwisata
- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran III ini ada 4 (empat), yaitu :

- X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll

- X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
- X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau

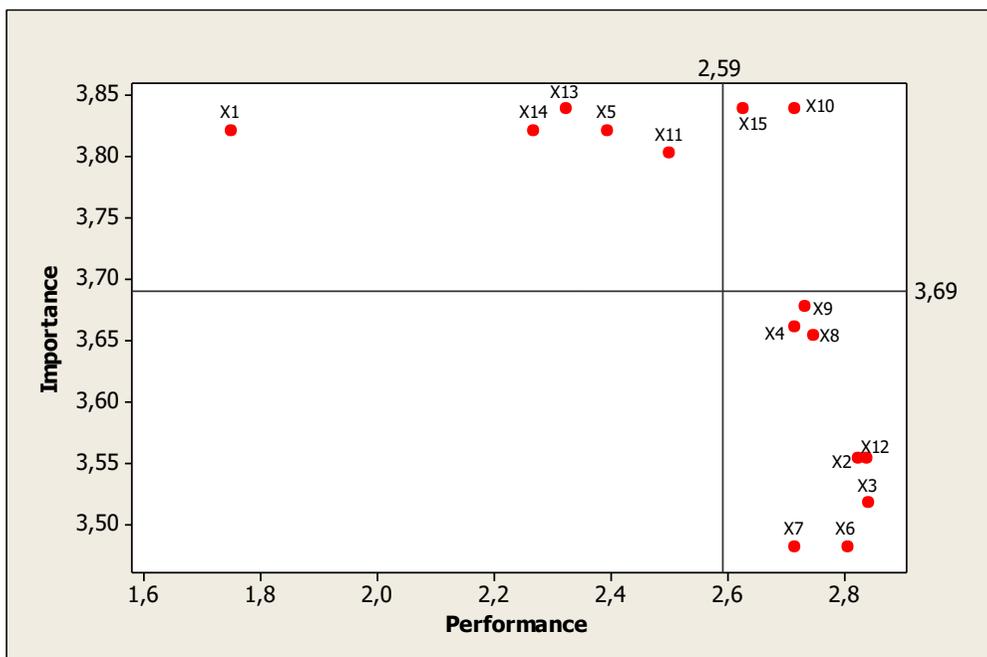
Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 2 (dua), yaitu:

- X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
- X13= Kerusakan Lingkungan

Hasil analisis kuadran terhadap data yang diperoleh di Kabupaten Wajo tersaji pada Grafik 4.30.

Grafik 4.30. Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Wajo



sumber: diolah

Keterangan grafik dijelaskan dalam tabel berikut

Tabel 4.25. Keterangan Grafik Pemetaan Aspek Kepuasan Masyarakat Kabupaten Wajo

Coding	Importance	Performance	Aspek
X1	3,82	1,75	Infrastruktur Jalan
X2	3,55	2,82	Keamanan & Ketertiban
X3	3,52	2,84	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
X4	3,66	2,71	Pendidikan (SMA Sederajat)
X5	3,82	2,39	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
X6	3,48	2,80	Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
X7	3,48	2,71	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
X8	3,65	2,75	Pemberdayaan Masyarakat Desa
X9	3,68	2,73	Pengelolaan Pariwisata
X10	3,84	2,71	Pelayanan Kesehatan
X11	3,80	2,50	Ekonomi Masyarakat
X12	3,55	2,84	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
X13	3,84	2,32	Kerusakan Lingkungan
X14	3,82	2,27	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
X15	3,84	2,63	Covid-19 (Virus Corona)
Rata-Rata	3,69	2,59	

Sumber: diolah

Berdasarkan grafik 4.30 dapat dirangkum bahwa:

Kuadran I : Prioritas utama peningkatan kinerja (*Performance Improvement*)

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran I ini ada 5 (lima), yaitu :

- X1 = Infrastruktur Jalan
- X5 = Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
- X11= Ekonomi Masyarakat
- X13= Kerusakan Lingkungan
- X14= Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Kuadran II : Pertahankan Prestasi

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran II ini ada 5 (lima), yaitu :

- X10= Pelayanan Kesehatan
- X15= Covid-19 (Virus Corona)

Kuadran III : Prioritas Rendah

Tidak ada aspek yang termasuk dalam kuadran III ini.

Kuadran IV : Melebihi Harapan

Aspek-aspek yang termasuk dalam kuadran IV ini ada 2 (dua), yaitu:

- X2 = Keamanan & Ketertiban
 - X3 = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - X4 = Pendidikan (SMA Sederajat)
 - X6 = Birokrasi dan Perizinan di Tingkat Provinsi
 - X7 = Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
 - X8 = Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - X9 = Pengelolaan Pariwisata
 - X12= Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
- Selanjutnya bisa kita rangkum dalam prioritas utama

peningkatan kinerja terkait isu strategis

Tabel 4.26. Prioritas Utama Peningkatan Kinerja

No	Kabupaten/Kota	Coding	Prioritas utama peningkatan kinerja berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA)
1	Bantaeng	X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
		X15	Covid-19 (Virus Corona)
2	Barru	X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X10	Pelayanan Kesehatan
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
		X15	Covid-19 (Virus Corona)
3	Bone	X1	Infrastruktur Jalan

No	Kabupaten/Kota	Coding	Prioritas utama peningkatan kinerja berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA)
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X13	Kerusakan Lingkungan
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
4	Bulukumba	X1	Infrastruktur Jalan
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X10	Pelayanan Kesehatan
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
		X15	Covid-19 (Virus Corona)
5	Enrekang	X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X13	Kerusakan Lingkungan
6	Gowa	X4	Pendidikan (SMA Sederajat)
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
7	Jeneponto	X1	Infrastruktur Jalan
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X8	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
8	Kepulauan Selayar	X1	Infrastruktur Jalan
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
9	Luwu	X3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		X9	Pengelolaan Pariwisata
		X13	Kerusakan Lingkungan
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
10	Luwu Timur	X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
		X15	Covid-19 (Virus Corona)

No	Kabupaten/Kota	Coding	Prioritas utama peningkatan kinerja berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA)
11	Luwu Utara	X4	Pendidikan (SMA Sederajat)
		X8	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		X10	Pelayanan Kesehatan
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X12	Fasilitas Umum, Khususnya Terkait Ruang Terbuka Hijau
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
12	Makassar	X4	Pendidikan (SMA Sederajat)
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
13	Maros	X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
14	Palopo	X2	Keamanan & Ketertiban
		X8	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		X10	Pelayanan Kesehatan
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
15	Pangkajene dan Kepulauan	X1	Infrastruktur Jalan
		X3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16	Parepare	X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X7	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
		X8	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X13	Kerusakan Lingkungan
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
17	Pinrang	X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X7	Sosial Seperti Pengemis, Anak Jalanan, Narkoba, PKL dll
		X8	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

No	Kabupaten/Kota	Coding	Prioritas utama peningkatan kinerja berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA)
18	Sidenreng Rappang	X11	Ekonomi Masyarakat
		X13	Kerusakan Lingkungan
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
19	Sinjai	X1	Infrastruktur Jalan
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X8	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
20	Soppeng	X1	Infrastruktur Jalan
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
21	Takalar	X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
22	Tana Toraja	X4	Pendidikan (SMA Sederajat)
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X8	Pemberdayaan Masyarakat Desa
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
23	Toraja Utara	X1	Infrastruktur Jalan
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
24	Wajo	X1	Infrastruktur Jalan
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X11	Ekonomi Masyarakat
		X13	Kerusakan Lingkungan
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan
Sulawesi Selatan		X1	Infrastruktur Jalan
		X5	Penyaluran Bantuan Sosial Seperti Raskin & BLT
		X11	Ekonomi Masyarakat

No	Kabupaten/Kota	Coding	Prioritas utama peningkatan kinerja berdasarkan Importance and Performance Analysis (IPA)
		X14	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan

Sumber: diolah

4.4. Media Sosialisasi

Selain mengevaluasi mengenai kinerja pembangunan, survei ini juga mencoba memotret perilaku media sosial. Pertanyaan tambahan ini adalah untuk mengetahui media apa yang paling tepat digunakan untuk mensosialisasikan hasil pembangunan kepada masyarakat.

1) Apakah anda memiliki akun media sosial berikut?



Grafik 4.31. Pemilik Akun Media Sosial di Provinsi Sulawesi Selatan

Dari grafik ini terlihat bahwa lebih dari 50 persen masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan memiliki aplikasi what's app dan hampir separuhnya (47,3%) memiliki facebook. Sisanya tidak terlalu signifikan jika dilihat dari jumlah pengguna.

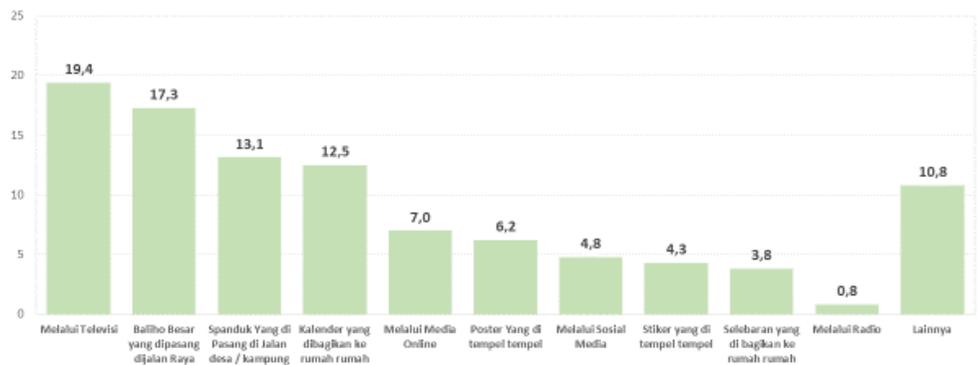
2) Akun yang sering anda gunakan?



Grafik 4.32. Akun Media Sosial yang sering digunakan di Provinsi Sulawesi Selatan

Dari grafik ini terlihat bahwa hampir separuh masyarakat Sulawesi Selatan aktif menggunakan What's app dan yang aktif menggunakan facebook sebesar 6.4 persen.

3) Media sosialisasi keberhasilan Program Pemerintah Provinsi



Grafik 4.33. Media Sosialisasi Keberhasilan Pemerintah di Provinsi Sulawesi Selatan

Media sosialisasi yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan masyarakat adalah dengan menggunakan media televisi dan selanjutnya adalah baliho ataupun spanduk yang dipasang sebagai bagian dari sosialisasi program pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, kalender yang dibagikan di masyarakat juga dianggap efektif bagi masyarakat untuk mengetahui program-program pemerintah.

BAB 5

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

1. Kepuasan masyarakat yang masih puas terhadap kinerja Pemerintah Provinsi dengan total 44,6 persen yang menyatakan puas dan 20,2 persen yang menyatakan tidak puas. Sisanya 35,2 persen menyatakan tidak menjawab. Kepuasan masyarakat yang baik, pada umumnya diperoleh dengan persentase diatas 65 persen
2. Aspek-aspek isu yang masih dipersepsikan oleh masyarakat untuk menjadi peningkatan kinerja Provinsi Sulawesi Selatan adalah
 - a. Infrastruktur jalan
 - b. Penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT
 - c. Ekonomi Masyarakat
 - d. Pengangguran dan lapangan pekerjaan

Dari keempat aspek tersebut, tiga aspek langsung berkaitan dengan perekonomian masyarakat yaitu bansos, ekonomi dan pengangguran dan lapangan pekerjaan. Sedangkan

infrastruktur adalah *intermediate input* yang akan memperlancar perekonomian masyarakat.

3. Dari keseluruhan hasil yang di dapat, masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, harapan masyarakat agar kinerjanya terus dipertahankan adalah dalam isu:
 - a. Pendidikan
 - b. Pelayanan Kesehatan
 - c. Penanganan Covid-19

Dari ketiga isu dasar ini, terlihat bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah berhasil memenuhi harapan masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pendidikan (SMA) dan pelayanan kesehatan.

5.2.Saran Kebijakan

1. Tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah (dibawah 50%) disebabkan salah satunya karena tingkat keterkenalan Plt. Gubernur Sudirman Sulaiman sebagai representasi Pemerintah Provinsi yang juga rendah. Sehingga masih banyak responden yang memilih untuk tidak menjawab, sebab belum tahu program apa yang sudah berhasil dilaksanakan dalam janji kampanye sebelumnya. Sehingga

perlu bagi pemerintah provinsi di tahun 2022 dan 2023 untuk fokus pada keempat isu yaitu Infrastruktur jalan, Penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT, Ekonomi Masyarakat dan Pengangguran dan lapangan pekerjaan. Seluruh anggaran agar difokuskan di keempat isu tersebut dengan prioritas daerah-daerah kota dan kabupaten yang memiliki persoalan dalam prioritas pertamanya.

2. Menentukan target agar kepuasan masyarakat terhadap kinerja pembangunan semakin meningkat dan di akhir periode 2024 sudah di atas 65%.
 - a. Tahun 2021 : 44,6%
 - b. Tahun 2022: 54,6 %
 - c. Tahun 2023 64,6%
 - d. Tahun 2024 74,6%
3. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan media-media luar seperti baliho, spanduk, kalender guna mensosialisasikan keberhasilan pembangunan, termasuk pemerintah provinsi sudah mulai massif untuk masuk di media sosial di Sulawesi Selatan.

4. Menentukan daerah-daerah prioritas yang akan dibangun melalui sinkronisasi perencanaan di RPJMD dengan hasil kebutuhan prioritas utama hasil survei ini di setiap Kota Kabupaten. Prioritas tersebut bisa dilakukan dengan kriteria- kriteria misalnya:
 - a. Daerah Prioritas Pertama, terdapat proyek nasional, wilayah dan masih tertinggal di prioritas utama
 - b. Daerah prioritas kedua, terdapat proyek nasional dan wilayah namun sudah lebih baik penanganan isu strategis
 - c. Daerah prioritas ketiga, terdapat sedikit proyek nasional dan dianggap tidak terjadi hal luar biasa seperti bencana alam besar dan lain sebagainya.

5.3.Rekomendasi Kebijakan

Dari temuan tersebut merekomendasikan poin-poin utama, yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjaga harmonisasi kebijakan, terutama di empat sektor yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Infrastruktur jalan. Pada variable ini setidaknya dua SKPD yang menjadi *leading sector*. SKPD yang menangani pekerjaan umum diharapkan, pertama, fokus kepada pelayanan inspraktuktur di kabupaten/kota yang paling prioritas

berdasarkan temuan IPA dan Sosialisasi *before and after* pekerjaan infrastruktur yang dianggap relatif bagus, namun namun tingkat kepuasaannya belum maksimal.

2. Penyaluran bantuan sosial seperti Raskin dan BLT. Pada poin ini, kebijakan yang perlu diambil oleh Dinas Sosial, pertama, perlu mengevaluasi proses distribusi terhadap 25 program nasional berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, yang salah satunya berkaitan dengan penyaluran raskin (BPNT, Beras Sejahtera, PKH, maupun bantuan-bantuan lainnya). Kedua, perlu adanya kajian efektivitas terhadap program penanggulangan kemiskinan secara khusus, sebagai upaya masukan kepada pemerintah pusat, dan bahan kebijakan menindaklanjuti dengan program turunan pemerintah provinsi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Ketiga, Aktivasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah, sebagai ujung tombak penanggulangan kemiskinan di provinsi Sulawesi selatan.
3. Ekonomi Masyarakat. Pada variable ini, pertama, diperlukannya harmonisasi dan koordinasi yang baik, karena isu ekonomi banyak berhubungan dengan berbagai SKPD dan tidak terkesan ego sektoral. Kedua, mengelaborasi Bersama *stakeholder* lainnya dalam upaya membangun kerja pemerintah dengan pendekatan *collaborative Governance*. Keempat, Pemerintah Provinsi memberi kemudahan dalam hal akses dan *disbursement* dana untuk penguatan ekonomi, tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek *good governance*. Membangun suatu sistem yang terintegrasi, transparan, dan juga akuntabel sesuai tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan

sehingga mengurangi kekakuan prosedur yang terjadi, sehingga program tersebut dapat optimal digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Kelima, Mendesain program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 berdasarkan kebutuhan (*bottom up approach*), salah satunya adalah harmonisasi dengan perbankan untuk sosialisasi berkaitan dengan restrukturisasi kredit serta kemudahan pembiayaan serta fleksibilitas program pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM. Keenam, Penguatan ekosistem digital dan Pemulihan sektor pariwisata. Program penguatan terhadap UMKM, perlu didorong tidak hanya dari informal ke formal, melainkan penguatan transformasi ke digital. Para pelaku usaha khususnya UMKM juga harus melakukan adaptasi teknologi dan digitalisasi baik dalam hal pelayanan maupun penjualan produk. Pembinaan dan pendampingan menyeluruh bagi UMKM perlu dilakukan, selain untuk mengurangi kesenjangan antar UMKM juga mendukung literasi teknologi bagi UMKM, sehingga pada akhirnya UMKM dapat mengembangkan produk lokal unggulan. Adapun dari Pemulihan sektor pariwisata adaptasi di destinasi wisata terhadap kondisi pandemi juga perlu dilakukan. Sehingga kolaborasi dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah, pusat maupun pihak lain yang terkait menjadi mutlak diperlukan dalam rangka mendorong geliat pariwisata dan ekonomi kreatif

4. Pengangguran dan lapangan pekerjaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus melakukan langkah-langkah strategis dalam investasi publik jangka panjang sekaligus

memperhatikan kesinambungan fiskal jangka Panjang, terlebih Kondisi paska pandemi menyebabkan terjadinya *accidental transformation* dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang menimbulkan potensi terjadinya perubahan struktural dalam perekonomian.

5. Melakukan evaluasi terkait program isu strategis yang sudah menjadi program prioritas dan yang tidak masuk ke dalam program prioritas untuk menjadi perhatian dalam dua tahun ke depan. Adapun program yang sudah maupun yang belum menjadi prioritas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Program Terkait Isu Strategis Berdasarkan Hasil Survey

No	Isu Strategis	Dinas	Kode			Program	Status Program
1	Infrastruktur Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.01	3	4	Program Bina Konstruksi	Prioritas
			1.01	3	5	Program Preservasi Jalan	Prioritas
			1.01	3	6	Program Pengendalian Jalan Akses Wilayah Terisolir	Prioritas
			1.01	3	9	Program Pembangunan jalan dan jembatan	
2	Penyaluran bantuan sosial (Raskin dan BLT)	Dinas Sosial	1.01	6	1	Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial	Prioritas
			1.01	6	3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
3	Ekonomi Masyarakat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	1.02	11	1	Program Pengembangan dan Pembinaan Kelompok UKM	Prioritas

No	Isu Strategis	Dinas	Kode			Program	Status Program
		Menengah				Bagi Masyarakat Miskin	
			1.02	11	4	Program Peningkatan Daya Saing SDM dan Sumber Daya Produktif Bagi KUMKM	
		Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.02	12	3	Program Pengembangan Penanaman Modal	
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.02	13	2	Program Pengembangan dan Kepeloporan Pemuda	Prioritas
		Dinas Perdagangan	2.00	5	3	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	
		Dinas Perindustrian	2.00	6	1	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri	Prioritas
			2.00	6	3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	
4	Pengangguran dan Lapangan Pekerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.02	1	1	Program Perluasan dan Pengembangan Tenaga Kerja	Prioritas
			1.02	1	2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	

Sumber: Diolah

6. Berdasarkan dari dokumen RPJMD Perubahan 2018-2023, disebutkan dengan beberapa program yang terkait langsung dengan hasil dari analisis IPA dan isu strategis yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini:
 - a) Ada 8 program yang bersatus Program Prioritas yang masuk ke dalam prioritas perbaikan kinerja berdasarkan persepsi masyarakat terkait isu strategis
 - b) Ada 7 Program yang tidak berstatus program prioritas yang masuk ke dalam prioritas perbaikan kinerja berdasarkan persepsi masyarakat terkait isu strategis

Program-program ini sangat direkomendasikan untuk mendapat perhatian khusus dalam dua tahun kedepan sebelum RPJMD 2018-2023 akan berakhir.

Daftar Pustaka

- Kelly, Janet M. 2003. "Urban Affairs Review CITIZEN SATISFACTION AND ADMINISTRATIVE PERFORMANCE."
- Martilla, John A, and John C James. 2013. "Importance-Per Analysis." 41(1): 77–79.
- Ryzin, Gregg G V A N, and Stephen Immerwahr. 2007. "IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS OF CITIZEN SATISFACTION SURVEYS." 85(1).
- Sever, Ivan. 2015. "Importance-Performance Analysis : A Valid Management Tool ?" *Tourism Management* 48: 43–53. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2014.10.022>.
- Walle, Steven Van De, and Geert Bouckaert. 2007. "International Journal of Public Administration Public Service Performance and Trust in Government : The Problem of Causality Trust in Government : The." (December 2014): 37–41.

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Sampel

NO	PROVINSI	STATUS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS	SAMPEL
1	SULAWESI SELATAN	DESA	BANTAENG	BANTAENG	ONTO	3447	10
2	SULAWESI SELATAN	DESA	BANTAENG	GANTARANGKEKE	BAJIMINASA	2730	10
3	SULAWESI SELATAN	DESA	BANTAENG	TOMPOBULU	PATTANETEANG	1574	8
4	SULAWESI SELATAN	KOTA	BARRU	BARRU	TUWUNG	2832	10
5	SULAWESI SELATAN	DESA	BARRU	SOPPENGRIAJA	BATUPUTE	2303	10
6	SULAWESI SELATAN	DESA	BARRU	SOPPENGRIAJA	LAWALLU	1562	6
7	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	AJANGALE	OPO	1293	10
8	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	AWANGPONE	MAPPALOU LAWENG	693	8
9	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	BONTOCANI	BULUSIRUA	1318	10
10	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	DUABOCCOE	PAKKASALO	1750	10
11	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	KAJUARA	TARASU	2026	10
12	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	LAPPARIAJA	TONRONGE	1875	10
13	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	PALAKKA	TANAHTENGNGA	1268	10

NO	PROVINSI	STATUS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS	SAMPEL
14	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	SIBULUE	MALLUSETASI	1585	10
15	SULAWESI SELATAN	KOTA	BONE	TANETERIATTANGBARAT	MACEGE	6755	10
16	SULAWESI SELATAN	KOTA	BONE	TANETERIATTANGTIMUR	LONRAE	4910	10
17	SULAWESI SELATAN	DESA	BONE	TONRA	LIBURENG	740	8
18	SULAWESI SELATAN	DESA	BULUKUMBA	BONTOTIRO	BATANG	2099	6
19	SULAWESI SELATAN	DESA	BULUKUMBA	BONTOTIRO	TAMALANREA	2166	10
20	SULAWESI SELATAN	DESA	BULUKUMBA	BULUKUMPA	BATULOHE	1745	8
21	SULAWESI SELATAN	DESA	BULUKUMBA	GANTARANG	BONTOMASILA	2691	10
22	SULAWESI SELATAN	DESA	BULUKUMBA	KAJANG	MATTOANGING	1356	8
23	SULAWESI SELATAN	DESA	BULUKUMBA	RILAUALE	KARAMA	2445	10
24	SULAWESI SELATAN	KOTA	BULUKUMBA	UJUNGBULU	LOKA	3323	10
25	SULAWESI SELATAN	DESA	ENREKANG	ALLA	PANA	1928	10
26	SULAWESI SELATAN	DESA	ENREKANG	BUNTUBATU	PASUI	1980	10
27	SULAWESI SELATAN	DESA	ENREKANG	ENREKANG	ROSOAN	877	10
28	SULAWESI SELATAN	DESA	GOWA	BAJENG	BONTOSUNGGU	4590	10
29	SULAWESI SELATAN	DESA	GOWA	BAJENGBARAT	BONTOMANAI	1761	8
30	SULAWESI SELATAN	DESA	GOWA	BIRINGBULU	BATURAPPE	2774	10
31	SULAWESI SELATAN	KOTA	GOWA	BONTONOMPO	TAMALLAYANG	3959	10
32	SULAWESI SELATAN	DESA	GOWA	BUNGAYA	SAPAYA	2492	8
33	SULAWESI SELATAN	KOTA	GOWA	PALLANGGA	BONTOALA	16210	10
34	SULAWESI SELATAN	KOTA	GOWA	PALLANGGA	TAENG	6525	10

NO	PROVINSI	STATUS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS	SAMPEL
35	SULAWESI SELATAN	KOTA	GOWA	SOMBAOPU	SUNGGUMINASA	4727	10
36	SULAWESI SELATAN	KOTA	GOWA	SOMBAOPU	TOMBOLO	10070	10
37	SULAWESI SELATAN	DESA	GOWA	TINGGIMONCONG	GANTARANG	1206	8
38	SULAWESI SELATAN	DESA	GOWA	TOMPOBULU	TANETE	3380	10
39	SULAWESI SELATAN	DESA	JENEPONTO	BANGKALA	TOMBOTOMBOLO	2115	8
40	SULAWESI SELATAN	DESA	JENEPONTO	BANGKALABARAT	BEROANGING	3232	10
41	SULAWESI SELATAN	KOTA	JENEPONTO	BINAMU	EMPOANG	5689	10
42	SULAWESI SELATAN	DESA	JENEPONTO	BONTORAMBA	LENTU	1765	6
43	SULAWESI SELATAN	DESA	JENEPONTO	TAMALATEA	TONROKASSIBARAT	2618	8
44	SULAWESI SELATAN	DESA	JENEPONTO	TURATEA	BULULOE	3381	10
45	SULAWESI SELATAN	DESA	KEPULAUAN SELAYAR	BONTOMATENE	BUNGAYYA	1331	8
46	SULAWESI SELATAN	DESA	KEPULAUAN SELAYAR	TAKABONERATE	RAJUNI	1403	10
47	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	Berua	12344	10
48	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	BIRINGKANAYA	SUDIANG	15200	10
49	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	BONTOALA	BUNGAEJAYA	3990	10
50	SULAWESI SELATAN	#N/A	KOTA MAKASSAR	KEPULAUANSANGKARRANG	BARRANGCADDI	3189	8
51	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	MAKASAR	MARDEKAYASELATAN	1559	10
52	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	MAMAJANG	TAMPARANGKEKE	3343	10
53	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	MANGGALA	BATUA	14100	10
54	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	MARISO	KUNJUNGMAE	2915	10

NO	PROVINSI	STATUS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS	SAMPEL
55	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	PANAİKANG	15289	10
56	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	PANAKUKKANG	TAMAMAUNG	18988	10
57	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	BANTABANTAENG	13561	10
58	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	RAPPOCINI	TIDUNG	11715	10
59	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	TALLO	PANNAMPU	10965	10
60	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	TALLO	TAMMUA	6653	10
61	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	TAMALANREA	TAMALANREAINDAH	9489	10
62	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	BAROMBONG	10667	10
63	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	MANGASA	21735	10
64	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	TAMALATE	PARANGTAMBUNG	14609	10
65	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA MAKASSAR	UJUNG Pandang	LAJANGIRU	3990	10
66	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA PALOPO	BARA	BALANDAI	3090	10
67	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA PALOPO	WARA	PAJALESANG	3111	10
68	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA PARE PARE	BACUKIKI	LOMPOE	6555	10
69	SULAWESI SELATAN	KOTA	KOTA PARE PARE	SOREANG	WATANGSOREANG	4924	10
70	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU	BAJO	SAMPA	1532	10
71	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU	BUA	PUTY	2856	10
72	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU	LAMASI	WIWITANTIMUR	1843	10
73	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU	PONRANG	TIROWALI	2226	10
74	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU	WALENRANG	BULO	1536	10
75	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU TIMUR	ANGKONA	TAMPINNA	2965	10

NO	PROVINSI	STATUS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS	SAMPEL
76	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU TIMUR	MALILI	WEWANGRIU	2060	8
77	SULAWESI SELATAN	KOTA	LUWU TIMUR	TOMONI	TOMONI	2338	8
78	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU TIMUR	WASUPONDA	LEDULEDU	4094	10
79	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU UTARA	BAEBUNTA	BUMIHARAPAN	927	6
80	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU UTARA	BAEBUNTA	SASSA	2284	10
81	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU UTARA	MALANGKEBARAT	CENNING	2385	10
82	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU UTARA	MALANGKEBARAT	KALITATA	1045	8
83	SULAWESI SELATAN	DESA	LUWU UTARA	SUKAMAJU	KALUKU	1863	8
84	SULAWESI SELATAN	DESA	MAROS	BANTIMURUNG	MINASABAJI	3004	10
85	SULAWESI SELATAN	DESA	MAROS	CENRANA	ROMPEGADING	1353	10
86	SULAWESI SELATAN	DESA	MAROS	MANDAI	BONTOMATENE	5158	10
87	SULAWESI SELATAN	DESA	MAROS	MONCONGLOE	MONCONGLOELAPPARA	3895	10
88	SULAWESI SELATAN	KOTA	MAROS	TURIKALE	PETTUADAE	4886	10
89	SULAWESI SELATAN	KOTA	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	BUNGORO	SAMALEWA	8850	10
90	SULAWESI SELATAN	DESA	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	LABAKKANG	KANAUNGAN	3277	10
91	SULAWESI SELATAN	DESA	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	LIUKANGTUPABBIRINGUTARA	MATTIROWALIE	1279	6
92	SULAWESI SELATAN	DESA	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	MINASATENE	BONTOKIO	3607	10
93	SULAWESI SELATAN	KOTA	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	SEGERI	SEGERI	2774	10

NO	PROVINSI	STATUS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS	SAMPEL
94	SULAWESI SELATAN	DESA	PINRANG	DUAMPANUA	BITTOENG	2072	10
95	SULAWESI SELATAN	DESA	PINRANG	LEMBANG	BENTENGPAREMBA	2305	10
96	SULAWESI SELATAN	DESA	PINRANG	MATTIROBULU	BUNGA	901	10
97	SULAWESI SELATAN	DESA	PINRANG	PATAMPANUA	PADANGLOANG	1845	10
98	SULAWESI SELATAN	DESA	PINRANG	WATANGSAWITO	MACCORAWALIE	7646	10
99	SULAWESI SELATAN	DESA	SIDENRENG RAPPANG	BARANTI	PASSENO	2658	8
100	SULAWESI SELATAN	DESA	SIDENRENG RAPPANG	DUAPITUE	TANRUTEDONG	3212	10
101	SULAWESI SELATAN	KOTA	SIDENRENG RAPPANG	MARITENGGAE	RIJANGPITTU	4751	10
102	SULAWESI SELATAN	DESA	SIDENRENG RAPPANG	PITURIASE	BILARIASE	1900	8
103	SULAWESI SELATAN	DESA	SIDENRENG RAPPANG	WATANGPULU	LAWAWOI	2501	8
104	SULAWESI SELATAN	DESA	SINJAI	PULAUSEMBILAN	PULAUHARAPAN	2305	10
105	SULAWESI SELATAN	DESA	SINJAI	SINJAISELATAN	PALAE	2491	10
106	SULAWESI SELATAN	DESA	SINJAI	SINJAITIMUR	PASIMARANNU	1403	8
107	SULAWESI SELATAN	DESA	SINJAI	TELLULIMPOE	LEMBANGLOHE	1983	8
108	SULAWESI SELATAN	DESA	SOPPENG	DONRIDONRI	SERING	1380	8
109	SULAWESI SELATAN	KOTA	SOPPENG	LALABATA	LALABATARILAU	6965	10
110	SULAWESI SELATAN	DESA	SOPPENG	LILIRIAJA	BARANG	1771	8
111	SULAWESI SELATAN	DESA	SOPPENG	MARIORIAWA	LARINGGI	2603	10

NO	PROVINSI	STATUS	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	PENDUDUK 17 TAHUN KE ATAS	SAMPEL
112	SULAWESI SELATAN	DESA	TAKALAR	GALESONG	BONTOLOE	1972	10
113	SULAWESI SELATAN	DESA	TAKALAR	GALESONGUTARA	TAMASAJU	3774	10
114	SULAWESI SELATAN	KOTA	TAKALAR	PATTALLASSANG	PATTALLASSANG	3690	10
115	SULAWESI SELATAN	KOTA	TAKALAR	POLOMBANGKENGUTARA	MALEWANG	2667	10
116	SULAWESI SELATAN	DESA	TANA TORAJA	BITTUANG	BALLA	1019	8
117	SULAWESI SELATAN	DESA	TANA TORAJA	BONGGAKARADENG	MAPPA	783	6
118	SULAWESI SELATAN	DESA	TANA TORAJA	MAKALESELATAN	BONEBUNTUSISONG	1281	10
119	SULAWESI SELATAN	DESA	TANA TORAJA	RANTETAYO	RANTETAYO	1314	10
120	SULAWESI SELATAN	DESA	TORAJA UTARA	BALUSU	BALUSU	730	10
121	SULAWESI SELATAN	DESA	TORAJA UTARA	NANGGALA	KARRELIMBONG	999	10
122	SULAWESI SELATAN	DESA	TORAJA UTARA	SANGGALANGI	TANDUNGLABO	1897	10
123	SULAWESI SELATAN	DESA	WAJO	BELAWA	MALAKKE	2205	10
124	SULAWESI SELATAN	DESA	WAJO	KEERA	LALLISENG	2283	10
125	SULAWESI SELATAN	DESA	WAJO	PAMMANA	PATILA	1846	10
126	SULAWESI SELATAN	DESA	WAJO	PITUMPANUA	ALESILURENGNGE	848	6
127	SULAWESI SELATAN	DESA	WAJO	TAKKALALLA	BOTTO	1572	10
128	SULAWESI SELATAN	KOTA	WAJO	TEMPE	WATALLIPUE	2385	10
						TOTAL	1204

Lampiran 2: Kuesioner

WAWANCARA DILAKUKAN DENGAN PERLAHAN, TIDAK TERBURU BURU,
CIPTAKAN SUASANA SANTAI AGAR RESPONDEN DAPAT MEMIKIRKAN
DENGAN BAIK JAWABAN JAWABANNYA.

--	--	--

NOMOR
KUISIONER

Kuesioner

Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Pembangunan Di Sulawesi Selatan

I. INFORMASI UMUM SURVEY				
NAMA RESPONDEN :			KOTA/KAB :	
KECAMATAN :			KELURAHAN/DESA :	
.....				
RW :	RT :	NO RUMAH :	NOMOR HP :	SURVEYOR :
II. UMUM		EVALUASI		KINERJA

1 Tolong anda sebutkan, apa masalah paling Penting yang menurut anda harus diselesaikan di PROVINSI SULAWESI SELATAN Saat ini, Khususnya di Kota/Kabupaten anda ? .

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

2 Hingga saat ini apakah anda sangat puas, puas, Tidak puas, atau sangat tidak puas dengan kinerja Andi Sudirman Sulaiman selaku Plt. GUBERNUR SULAWESI SELATAN SAAT INI ?

- jawab
- | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|
| 1. Sangat Puas | 3. Tidak Puas | |
| 2. Puas | 4. Sangat Tidak Puas | 5. Tidak tahu/tidak |

3 Apa Keberhasilan pemerintah PROVINSI SULAWESI SELATAN paling anda rasakan ?

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

4 Apa kekurangan pemerintah PROVINSI SULAWESI SELATAN yang paling anda rasakan ?

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

TUNJUKKAN TINGKAT KINERJA

1. Sangat tidak puas	2. Tidak puas	3. Puas	4. Sangat Puas
----------------------	---------------	---------	----------------

5 Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **INFRASTRUKTUR JALAN** di lingkungan tempat tinggal Anda?

6 Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **KEAMANAN & KETERTIBAN** di lingkungan tempat tinggal Anda?

7] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** di Provinsi SULAWESI SELATAN ?

8] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PENDIDIKAN (SMA SEDERAJAT)** di Provinsi SULAWESI SELATAN ?

9] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PENYALURAN BANTUAN SOSIAL seperti RASKIN & BLT** di lingkungan Anda?

10] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **BIROKRASI DAN PERIZINAN DI TINGKAT PROVINSI** di lingkungan tempat tinggal Anda?

11] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **SOSIAL seperti PENGEMIS, ANAK JALANAN, NARKOBA, PKL dll** di Provinsi SULAWESI SELATAN ?

12] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** di Provinsi SULAWESI SELATAN ?

13] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PENGELOLAAN PARIWISATA** di lingkungan tempat tinggal Anda?

14] Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PELAYANAN KESEHATAN?**

15) Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **EKONOMI MASYARAKAT** di lingkungan tempat tinggal Anda?

16) Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

Masalah **FASILITAS UMUM, KHSUSUNYA TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU?**

17) Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **KERUSAKAN LINGKUNGAN** di lingkungan tempat tinggal Anda?

18) Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PENGANGGURAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN** di lingkungan tempat tinggal Anda?

19) Seberapa puaskah Anda dengan upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **COVID-19 (VIRUS CORONA)** di lingkungan tempat tinggal Anda?

TUNJUKKAN TINGKAT HARAPAN

1. Jauh Lebih Buruk dari harapan Saya

2. Masih Lebih Buruk dari harapan Saya

3. Sudah Sesuai dari harapan Saya

4. Susah Lebih Baiki harapan Saya

20) Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **INFRASTRUKTUR JALAN** di lingkungan tempat tinggal Anda dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

21) Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **KEAMANAN & KETERTIBAN** di lingkungan tempat tinggal Anda

dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

22 Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** di Provinsi SULAWESI SELATAN

dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

23 Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PENDIDIKAN (SMA SEDERAJAT)** di Provinsi SULAWESI SELATAN

dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

24 Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PENYALURAN BANTUAN SOSIAL seperti RASKIN & BLT** di lingkungan Anda

dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

25 Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **BIROKRASI DAN PERIZINAN DI TINGKAT PROVINSI** di lingkungan tempat tinggal Anda dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

26 Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

MASALAH SOSIAL seperti PENGEMIS, ANAK JALANAN, NARKOBA, PKL dll di Provinsi SULAWESI SELATAN dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

27 Sejauh mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

Masalah **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

28 Sejahtera mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

Masalah **PENGELOLAAN PARIWISATA** di lingkungan tempat tinggal Anda dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

29 Sejahtera mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PELAYANAN KESEHATAN** dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

30 Sejahtera mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

Masalah **EKONOMI MASYARAKAT** di lingkungan tempat tinggal Anda dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

31 Sejahtera mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

Masalah **FASILITAS UMUM, KHSUSUNYA TERKAIT RUANG TERBUKA HIJAU,** dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

32 Sejahtera mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

Masalah **KERUSAKAN LINGKUNGAN** di lingkungan tempat tinggal Anda dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

33 Sejahtera mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **PENGANGGURAN DAN LAPANGAN PEKERJAAN** di lingkungan tempat tinggal Anda dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

34 Sejahtera mana kesesuaian antara upaya Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN dalam menangani

masalah **COVID-19 (VIRUS CORONA)** di lingkungan tempat tinggal Anda

dibandingkan dengan harapan Ibu/Bapak/Saudara ?

35 Tolong sebutkan 2 hal yang menurut anda harus diperbaiki dalam penanganan **Wabah Covid -19** di Provinsi Sulawesi Selatan?

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

36 Tolong sebutkan 2 hal yang menurut anda harus diperbaiki dalam **Pelayanan Kesehatan di RSUD Atau Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan** di Provinsi Sulawesi Selatan?

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

37 Tolong sebutkan 2 hal yang menurut anda harus diperbaiki dalam **Perbaikan Ekonomi** di Provinsi Sulawesi Selatan?

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

38 Tolong sebutkan 2 hal yang menurut anda harus diperbaiki dalam **Penyediaan Fasilitas Pendidikan dan Kualitas Pendidikan (Setingkat SMA)** di Provinsi Sulawesi Selatan?

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

39 Tolong sebutkan 2 hal yang Menurut anda harus diperbaiki dalam **Pembangunan** di Provinsi Sulawesi Selatan?

1., SELAIN ITU
ADA LAGI / TIDAK ?

2.

40 Apakah anda punya akun Facebook ?

1. Punya _____

50 Suku/etnis:

1 = Bugis

4 = Luwu

2 = Makassar

5 = Jawa

3 = Toraja

6 = Lainnya:

51 Agama :

1 = Islam

3 = Protestan

5 = Budha

2 = Katolik

4 = Hindu

6 = Konghuchu

7 = lainnya, sebutkan

.....

WAWANCARA SELESAI, BERIKAN

SOUVENIRNYA & UCAPKAN

TERIMA KASIH